

FORUM DISKUSI DENPASAR 12

KESADARAN BERBENAH

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
Wakil Ketua MPR RI

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12** KESADARAN BERBENAH

KESADARAN BERBENAH

Penggagas:

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Cetakan Agustus 2024

UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.:

Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T.

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.

Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si.

Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M.

Luthfi Assyaukanie, Ph.D.

Sadyo Kristiarto, S.P.

Anggiasari Puji Aryatie, S.S.

Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A.

Dr. Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A.

Sekapur Sirih

BAB 1 menyajikan pendapat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani, Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta Totok Binto, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi, Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa Ahmad Baidowi AR, anggota Komisi X DPR RI Mohammad Haerul Amri, dan wartawan *Kompas* bidang pendidikan Ester Lince Napitupulu.

Bab II berisi pandangan Kepala Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Julian Andarsa, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Putu Elvina, Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan, Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa Ahmad Baidowi AR, dan Irwansyah, Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.

Bab III memaparkan pandangan Staf Khusus Mendikbud Hamid Muhammad, Ketua Majelis Disdasmen PP Muhammadiyah H Kasiyanto, Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa Ahmad Baidowi AR, Ketua Forum Dosen Indonesia Wilayah Papua Ismail Suardi Wekke, dan Ketua DPP Partai NasDem Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Suyoto.

Bab IV berisi pandangan Ketua Umum PGRI Unifah Rosidi, Guru Besar Surya University Yohanes Surya, Rektor Universitas Negeri Goron-

talo Eduart Wolok, Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa Ahmad Baidowi AR, pemimpin komunitas Sokola Rimba Butet Manurung, Jurnalis senior *Kompas* Yovita Arika, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus Rusnoto.

Bab V memuat pendapat anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkaru, Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo, Wakil Sekjen PB PGRI Jejen Musfah, wartawan bidang pendidikan Indrastuti, Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa Ahmad Baidowi AR, dan Susan juga dari Yayasan Sukma Bangsa.

Bab VI berisi pandangan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkaru, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditono, Ketua Forum Rektor Indonesia Panut Mulyono, Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia Mohammed Ali Berawi, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Gufroni Sakaril, dan Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa Ahmad Baidowi AR.

Semua pemikiran di dalam Forum Diskusi Denpasar 12 itu dijahit menjadi buku ini oleh Kleden Suban, Gantyo Koespradono, dan Hillarius U. Gani. Naskah diperiksa secara *zooming*, dikerjakan secara kolektif, melibatkan ketiga penulis yang dikoordinasikan Ade Siregar.

Forum Diskusi Denpasar 12 terselenggara secara teratur berkelanjutan setiap Rabu berkat kerja tim yang solid. Topik diskusi, pembicara, pembahas ditentukan Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S.,

M.M., bersama Arief Adi Wibowo, S.Si, M.T., Dr. Radityo Fajar Ariananto, M.B.A., serta Staf Khusus Wakil Ketua MPR Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., dan Drs. Muchtar Lutfhi Mutty, M.Si., serta Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Arimbi Heroepoetri, S.H , L.LM., Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Sadyo Kristiarto, S.P., Anggiasari Puji Aryatie, S.S., dan Dr. Irwan-syah, S Sos., M.A.

Adapun teknis pelaksanaan Forum Diskusi Denpasar 12 secara virtual ditangani Tim Tenaga Ahli DPR, yaitu Shohibul Uman, S.E., Alma Costa, S.S., M.A., dan Affan Akbar Harahap, S Sos. Tim Tenaga Ahli DPR ialah tim Lestari Moerdijat dalam kedudukannya sebagai anggota DPR RI.

Tim Tenaga Ahli lainnya, Naila Fitria, S.Si., Lia Eldest Sihotang, S.IP, M.A., dan Ahmad Nur Saeful, S.Pd. bertugas melakukan riset untuk keperluan diskusi serta menghubungi pembicara dan pembahas sesuai otoritas ataupun kompetensi masing-masing.

Forum Diskusi Denpasar 12 berlangsung mulai pukul 14.00 WIB, didahului menyanyikan lagu *Indonesia Raya*, lalu dibuka dengan sambutan Lestari Moerdijat. Bergantung pada topik, diskusi dipimpin moderator Arimbi Heroepoetri, atau Luthfi Mutty, atau Luthfi Assyaukanie, atau Anggiasari Puji Aryatie, atau Radityo Fajar Ariananto, atau Irwan-syah. Saur Hutabarat terkadang menutup diskusi dengan opini singkat.

Perancang sampul dan penata letak buku ini ialah Briyanbodo Hendro. Buku ini pun mendapat sentuhan editor bahasa Adang Iskandar agar bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap terjaga dan terpelihara. ■

Menuju Manusia Pembelajar

DISKUSI mengenai pendidikan mengungkapkan berbagai kelemahan yang kita hadapi sebagai bangsa. Kelemahan itu misalnya menyangkut kesenjangan kualitas pendidikan antarpulau, antardaerah, antara kota dan desa bahkan di provinsi yang sama.

Kelemahan yang sangat utama ialah mengenai kesejahteraan guru. Padahal pendidikan bertumpu pada guru.

Berbenah memperbaiki nasib guru ini kiranya tak boleh diserahkan terutama kepada kemampuan keuangan daerah sebagai konsekuensi otonomi daerah. Konstitusi jelas memerintahkan negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu, konstitusi telah pula mematok anggaran pendidikan sebesar 20% APBN. Dalam kenyataan, hanya 3% yang dikelola Kemendikbudristek. Jauh panggang dari api.

Oleh karena itu, sangat penting adanya undang-undang baru yang dapat memastikan bahwa anggaran pendidikan dalam konstitusi itu nyata untuk pendidikan.

Undang-undang yang baru juga diperlukan untuk mengatasi ketumpangtindihan regulasi di bidang pendidikan. Kiranya perlu dipikirkan bahwa semua yang menyangkut pendidikan diatur di dalam satu undang-undang, bahkan di bawah satu atap Kemendikbudristek.

Tata kelola kebijakan pendidikan bertujuan utama memperbaiki

kualitas manusia Indonesia. Untuk itu, pendidikan haruslah diperlakukan sebagai sebuah proses yang dapat mendorong peserta didik mempunyai kemampuan berinovasi, kreatif, berpikir kritis, dan memiliki kepekaan akan realitas sosial.

Satu-satunya keniscayaan ialah perubahan. Kita hanya dapat menghadapi perubahan bila kita menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Kiranya ke sanalah kita terus membenahi pendidikan.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara, para penanggap, dan para peserta diskusi yang telah menyumbangkan pemikiran dalam Forum Diskusi Denpasar 12.

Jakarta, 11 September 2023



Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Wakil Ketua MPR RI

Demam Pendidikan

INI pertanyaan mengusik: apa yang membuat negara kalah perang, Jerman di Perang Dunia I dan Jepang di Perang Dunia II, cepat bangkit menjadi negara hebat? Apa pula yang membuat Korea Selatan yang menderita perang saudara *Korean War* cepat sekali bertumbuh menjadi negara industri?

Jawabnya kiranya dapat dicari di dalam satu perkara besar, yakni bagaimana negara itu berinvestasi dalam pengembangan mutu anak bangsa mereka melalui pendidikan. Tulisan ini hanya fokus melihat kemajuan pendidikan di Korea Selatan.

Korea Utara menyerbu Korea Selatan pada 25 Juni 1950. Perang saudara itu berakhir 27 Juli 1953. Sebuah perang yang tergolong panjang, berlangsung 3 tahun, 1 bulan, 2 hari.

Sebelum perang, pada 1945, orang dewasa di Korea Selatan yang dapat membaca diperkirakan hanya 22%. Tujuh belas tahun setelah perang, pada 1970, jumlahnya meningkat hampir empat kali lipat menjadi 87,6%. Pada akhir 1980-an jumlah orang dewasa Korea Selatan yang dapat membaca mencapai 93%. Boleh dikata, praktis saat ini tak ada lagi rakyat Korea Selatan yang buta huruf.

Sekalipun wajib sekolah hanya di sekolah dasar (kelas 1 sampai kelas 6), pada 1985 hampir semua siswa (99%) di Korea Selatan melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Pada 1987 sebanyak 34% rakyat Korea Selatan menempuh sekolah menengah atas, menjadikan negara itu termasuk salah satu negara dengan rakyat terbanyak yang tinggi

pendidikannya di dunia, yakni setara Jepang (30%) yang pernah menjajahnya bahkan melampaui Inggris (20%).

Korea Selatan sangat murah hati menyediakan anggaran belanja untuk pendidikan. Pada 1975 anggaran pendidikan 2,2% dari GNP atau 13,9% dari total pengeluaran pemerintah. Pada 1986 belanja untuk pendidikan naik dua kali lipat menjadi 4,5% dari GNP atau 27,3% dari total anggaran pemerintah. Pada 2020 anggaran itu meningkat lebih tinggi lagi menjadi 6,4% dari GNP.

Rakyat Korea Selatan demam pendidikan. Inilah demam yang membuat negara itu mengalami demokratisasi dan menikmati kemakmuran. Yang menarik ialah pada 1991, untuk pertama kali pemerintah negara itu menerapkan lokalitas pendidikan. Mereka tidak lagi memberlakukan kurikulum seragam untuk seluruh negeri. Sekolah diperbolehkan menerapkan sejumlah hal sesuai kearifan dan kebutuhan lokal.

Hemat saya, sedikitnya ada tiga pelajaran yang dapat dipetik dari kemajuan pendidikan di Korea Selatan untuk kita berbenah. Pertama, negara harus hadir dengan belanja untuk pendidikan yang terus meningkat. Patokan anggaran pendidikan 20% dari APBN rasanya harus diubah menjadi 'minimal 20%'. Bahkan perlu pula dipertimbangkan untuk mengubah ukurannya menggunakan GNP, sebagaimana dunia menggunakannya.

Kedua, kiranya Indonesia dengan luas wilayah hampir 19 kali luas Korea Selatan, jumlah penduduknya lebih lima kali lipat penduduk Korea Selatan, serta sangat majemuk (1.340 suku bangsa, jika dibandingkan dengan penduduk Korea Selatan yang 95,1% orang Korea), justru

jauh lebih perlu untuk menerapkan lokalitas pendidikan.

Ketiga, sangat mendesak menyebarluaskan demam pendidikan di seluruh penjuru negeri. Ini antitesis dari kenyataan yang kita hadapi sekarang, yakni tingginya angka putus sekolah.

Hanya satu perkara yang tak boleh ditiru dari Korea Selatan. Begitu hebat gairah berpendidikan menyebabkan kegagalan dalam hal ini membuat orang memilih bunuh diri.

Jakarta, 12 September 2023



Saur Hutabarat
Wartawan Senior

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih

7

Menuju Manusia Pembelajar

11

Demam Pendidikan

15

TRANSFORMASI GURU BERKUALITAS PASCA-PERHELATAN PRESIDENSI INDONESIA DALAM G20

20

1. Latar Belakang: Menyoal Kualitas Guru
2. Mencari Solusi atas Masalah yang Dihadapi Guru
3. Agenda Menghadirkan Guru Berkualitas
4. Dicari, Guru yang Memiliki Panggilan Jiwa
5. Instrumen Pendidikan belum Komprehensif

PERAN PENDIDIKAN MELAWAN INTOLERANSI DAN MENGAWAL KEBINEKAAN

60

1. Latar Belakang: Amanat Konstitusi tidak Sejalan dengan Realitas
2. Perlu Penerimaan Utuh atas Segala Atribut Perbedaan
3. Harus Ada Kolaborasi Hilangkan Tiga Dosa Pendidikan
4. Intoleransi Menjadi Beban Negara
5. Masih Ada Problem Penegakan Hukum
6. Guru Memegang Peran Kunci

PETA JALAN PENDIDIKAN NASIONAL

98

1. Latar Belakang: Beradaptasi dengan Perubahan
2. Terbelit Paradigma Lama
3. Covid-19 Percepat Perubahan
4. Guru Profesi Membanggakan

IV

POLEMIK GURU HONORER DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN NASIONAL

124

1. Latar Belakang: Status Guru dan Kesenjangan Kualitas
2. Membedah Kondisi Terkini Guru Indonesia
3. Harapan agar Guru Diprioritaskan
4. Solusi Digitalisasi Pendidikan
5. Kegagalan Menyusun Kurikulum

V

MEMPERSIAPKAN GENERASI PENERUS MENUJU INDONESIA 2045

166

1. Latar Belakang: Mengurai Benang Kusut Putus Sekolah
2. Sekolah sebagai Pusat Kemajuan
3. Libatkan Publik sejak Perencanaan
4. Mimpi Menjadi Kaya tanpa Sekolah
5. Kurikulum Merdeka dan Bingkai Indonesia
6. Gratiskan juga Sekolah Swasta
7. Mengubah Mindset

VI

KESETARAAN DAN INKLUSI RUU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

204

1. Latar Belakang: Kompleksitas UU Pendidikan
2. Kawal RUU Sisdiknas dengan Saksama
3. Kesenjangan yang Masih Berupa Angan-Angan
4. Memperkuat Pendidikan Anak Usia Dini
5. Menanti Produk Pendidikan yang Bisa Memakmurkan Indonesia
6. Mewujudkan Rasa Keadilan, Persamaan Hak dan Kesempatan

Catatan Moderator

250

Biodata Tim Ahli

262

A woman wearing a light-colored hijab and a red long-sleeved shirt is pointing her right index finger at a document held in her left hand. The document appears to be a curriculum or lesson plan, with a table titled 'KONSEP' visible. The background is a blurred classroom setting with a whiteboard. The image is overlaid with a dark blue gradient and decorative white and yellow lines. The title text is in a bold, yellow, sans-serif font.

Transformasi Guru Berkualitas Pasca- Perhelatan Presidensi Indonesia dalam G20

1

Latar Belakang: Menyoal Kualitas Guru

HARI Guru Nasional secara resmi ditetapkan pada 1994 melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional. Momen pemilihan Hari Guru Nasional bertepatan dengan hari lahirnya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Penetapan Hari Guru Nasional merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan kepada para guru. Di 2022, perhelatan Hari Guru Nasional mengusung tema Serentak Berinovasi Wujudkan Merdeka Belajar.

Segala daya dan upaya untuk mengembalikan muruah guru sebagai pendidik profesional pada hakikatnya merupakan bentuk

ikhtiar yang dilakukan oleh semua pihak, tidak terkecuali pemerintah. Karena itu, mutu kompetensi pendidik harus ditingkatkan secara signifikan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI mencatat jumlah guru yang tersertifikasi di Indonesia hingga 2019 belum mencapai 50%. Persentase guru yang tersertifikasi paling banyak ada di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 48,44%.

Persentase terbanyak selanjutnya ada di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) sebesar 45,77%. Adapun persentase terkecil ada di jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) yang hanya sebesar 28,49%.

Di sisi lain, World Bank dalam laporan penelitiannya menyebutkan bahwa pada 2020 kualitas guru di Indonesia rendah akibat dari adanya *learning loss* selama pandemi covid-19 dalam 1,5 tahun terakhir.

Mereka mengatakan rendahnya kualitas guru Indonesia itu dari aspek kompetensi hingga kemampuan mengajar.

Kemudian, 53% siswa di kelas 4 sekolah dasar tak memiliki buku pelajaran. Lalu dari sebanyak 29% kelas yang disurvei, tidak memiliki standar minimum pembelajaran oleh guru.

Terkait presidensi Indonesia dalam G20, Kemendikbudristek mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan saling menguatkan demi pemulihan bersama pascapandemi covid-19.

Ada empat agenda utama yang diangkat oleh Kemendik-

budristek dalam kegiatan G20 di Bali. Pertama, pendidikan berkualitas untuk semua. Kedua, teknologi digital dalam pendidikan. Ketiga, solidaritas dan kemitraan. Keempat, masa depan pekerjaan pascapandemi covid-19.

Pertanyaannya, apakah program-program yang dicanangkan Kemendikbudristek dalam G20 dapat menjawab permasalahan guru di Indonesia?

Fakta di lapangan, ada sejumlah permasalahan yang sering dihadapi oleh guru di Indonesia, di antaranya beban kerja yang berat. Guru di Indonesia sering kali menghadapi beban kerja yang tinggi. Mereka harus mengajar beberapa kelas dengan jumlah siswa yang besar, mempersiapkan materi pelajaran, memberikan tugas, mengoreksi pekerjaan, dan melaksanakan tugas administratif. Kondisi tersebut bisa membuat guru merasa kelelahan dan sulit untuk memberikan perhatian kepada setiap siswa.

Selain itu, kurangnya fasilitas dan sumber daya. Banyak sekolah di Indonesia masih kekurangan fasilitas dan sumber daya yang memadai, seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, laboratorium, akses internet yang stabil, dan materi pembelajaran yang mutakhir. Kurangnya fasilitas dan sumber daya ini dapat membatasi kemampuan guru untuk memberikan pengajaran yang efektif.

Selanjutnya, kurangnya dukungan dan pengembangan profesional. Dalam hal ini, guru di Indonesia sering kali merasa kurang mendapatkan dukungan dan pengembangan profesional



MI/RAHMANI

Guru memberikan pelajaran kepada siswa kelas 7 saat sekolah tatap muka di SMP 245, Petukangan, Jakarta, Senin (30/8/2021). World Bank dalam laporan penelitiannya menyebutkan bahwa pada 2020 kualitas guru di Indonesia rendah akibat dari adanya *learning loss* selama pandemi covid-19.

yang memadai. Pelatihan dan pengembangan yang kontinu dapat membantu guru meningkatkan keterampilan mengajar mereka, tetapi sering kali pelatihan tersebut terbatas dan tidak teratur.

Persoalan lainnya terkait dengan disiplin dan perilaku siswa. Beberapa guru menghadapi tantangan dalam menjaga disiplin dan mengelola perilaku siswa di kelas. Kurangnya peraturan yang konsisten di sekolah atau ketidakhadiran orangtua dalam mendukung pengaturan disiplin dapat menyulitkan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Berikutnya mengenai gaji dan status sosial. Situasi dan kondisi-

nya memang telah berangsur membaik, tetapi banyak guru masih menghadapi masalah terkait gaji yang rendah dan status sosial yang kurang dihargai. Hal itu dapat memengaruhi motivasi dan kepuasan kerja mereka.

Lalu, evaluasi kinerja yang kurang objektif. Sistem evaluasi kinerja guru di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk menjadi lebih objektif dan berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran. Beberapa guru mungkin merasa evaluasi kinerja mereka tidak adil atau tidak akurat.

Penting untuk dicatat bahwa pemerintah Indonesia dan banyak organisasi telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi kerja guru di negeri ini. Kendati demikian, masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan. ■



Belajar harus menjadi sebuah proses yang logis dengan pendekatan reflektif, adaptif, dan transformatif.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Mencari Solusi atas Masalah yang Dihadapi Guru

TERLEPAS dari berbagai masalah yang dihadapi guru, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat optimistis Indonesia mampu mewujudkan ruang belajar yang dapat mendorong dan membuat para guru mampu menciptakan kondisi, situasi, dan inovasi dalam membuat ekosistem pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar.

Membuka diskusi, Lestari mengungkapkan ia mendapatkan banyak masukan, baik dalam kapasitas selaku anggota DPR RI di Komisi X maupun dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua MPR RI, yang intinya perlu melihat masalah yang dihadapi para guru dalam konteks bagaimana melihat tantangan yang dihadapi dan mencari solusinya.

Berbagai kendala yang mesti dipecahkan ialah bagaimana kondisi guru saat ini agar mampu memiliki pemahaman yang benar saat siswa harus belajar, kemudian bagaimana persiapan-persiapan emosionalnya ketika harus berhubungan dengan banyak siswa dengan ragam kebutuhan.

Masih banyak isu lain dalam pendidikan seperti kurikulum dalam konteks mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh. Para guru masih pula berhadapan dengan kesejahteraan.

Beberapa catatan yang masih dihadapi para guru, menurut Lestari, seyogianya menjadi masukan dan perlu pendalaman agar bisa memberikan solusi yang tepat.

Lestari mengingatkan, proses pembelajaran saat ini tidak hanya terbatas pada upaya memenuhi tuntutan seperti meningkatkan capaian nilai, tapi bisa juga hal-hal lain yang selama ini tidak pernah terpikirkan dan harus diatasi oleh para guru.

Dalam konteks Merdeka Belajar, Lestari mengatakan, belajar harus menjadi sebuah proses yang logis dengan pendekatan reflektif, adaptif, dan transformatif.

Seluruh elemen pemangku kepentingan harus dapat mengawal transformasi guru, bagaimana kemudian terjadi perubahan pola didik yang memungkinkan pelajar mengembangkan potensinya mengikuti perkembangan dunia yang menciptakan ragam keterhubungan tak terbatas. “Saya kira ini menjadi tantangan bagi kita semua,” katanya.

Sebuah pola belajar harus diciptakan dengan keterlibatan ak-

tif para pelajar dan guru. Lestari menambahkan, ini hanya bisa terjadi apabila pola pembelajaran dilakukan melalui implementasi pedagogi yang terstruktur.

“Mudah-mudahan kita mendapatkan gambaran model transformasi guru yang berkualitas dan mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman sehingga memiliki kemauan untuk menciptakan pola belajar yang berorientasi masa depan dan mampu mengimplementasikan kehidupan berbangsa dalam tindakan sehari-hari,” tukas Lestari. ■



Guru menjadi salah satu kunci atau katalisator dunia pendidikan Indonesia yang dapat mengurai persoalan di tingkat paling mendasar.”

Nunuk Suryani

Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI

3 Agenda Menghadirkan Guru Berkualitas

PELAKSANA Tugas (Plt) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI Nunuk Suryani menelaah latar belakang agenda prioritas pada Education Working Group (EWG) Presidensi G20 Indonesia dalam upaya menghadirkan guru berkualitas.

Dengan mengetahui agenda-agenda tersebut, menurut dia, setidaknya dapat diketahui manfaat bagi masyarakat dunia, khususnya Indonesia, serta apa yang diharapkan pemerintah (Kemendikbudristek) bagi upaya meningkatkan kualitas guru dan pendidikan di Tanah Air.

Nunuk menjelaskan Education Working Group adalah salah satu kelompok kerja dalam G20 yang bertanggung jawab untuk

merumuskan kebijakan dan inisiatif dalam bidang pendidikan.

Presidensi G20 Indonesia telah menetapkan empat agenda prioritas untuk EWG, dengan latar belakang yang melibatkan tantangan dan kebutuhan yang ada di tingkat global dalam pendidikan. Berikut ini latar belakang penetapan empat agenda prioritas tersebut.

1. *Teachers and Education Personnel* (Guru dan Tenaga Pendidik Berkualitas): Latar belakang agenda ini ialah pentingnya memiliki guru dan tenaga pendidik yang berkualitas tinggi.

Guru yang baik adalah faktor kunci dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Kurangnya guru berkualitas di banyak negara menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem pendidikan global. Dengan meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

2. *Inclusive and Equitable Education* (Pendidikan Inklusif dan Merata): Latar belakang agenda ini ialah untuk mengatasi kesenjangan dalam akses pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan tersedia bagi semua orang tanpa diskriminasi.

Masalah ketimpangan akses pendidikan masih menjadi isu di banyak negara, terutama di daerah perdesaan, komunitas miskin, dan kelompok minoritas. Dengan memprioritaskan pendidikan inklusif dan merata, diharapkan setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

3. *Digital Transformation in Education* (Transformasi Digital

dalam Pendidikan): Latar belakang agenda ini ialah pentingnya menghadapi tantangan dan peluang yang disajikan oleh transformasi digital dalam pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita belajar dan mengajar.

Namun, masih ada kesenjangan digital di berbagai negara, pun tantangan lain seperti keamanan siber dan privasi data. Dengan fokus pada transformasi digital dalam pendidikan, diharapkan pendidikan dapat lebih relevan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

4. *Lifelong Learning* (Pembelajaran Sepanjang Hayat): Latar belakang agenda ini ialah pengakuan bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di masa muda, tetapi juga harus berlangsung sepanjang hayat. Perubahan cepat dalam dunia kerja dan kehidupan membutuhkan kemampuan adaptasi dan pembelajaran yang berkelanjutan.

Dengan mendorong pembelajaran sepanjang hayat, individu dapat terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk menghadapi perubahan dan mengejar kesempatan yang ada.

Menurut Nunuk, penetapan empat agenda prioritas ini didasarkan pada pemahaman bahwa pendidikan merupakan elemen kunci dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan fokus pada guru berkualitas, akses pendidikan yang merata, transformasi digital, dan pembelajaran sepanjang hayat, diharapkan G20 dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara global dan menghadapi tantangan yang ada.

Nunuk menjelaskan, salah satu karakteristik Forum G20 ialah kesepakatan anggotanya yang berupaya menjaga keberlanjutan setiap agenda yang diusung pada setiap presidensi.

WEG sebelumnya berlangsung di Argentina pada 2018, Arab Saudi (2020), dan Italia (2021). Dalam forum-forum tersebut, Kemendikbudristek melakukan sejumlah dialog dengan berbagai mitra nasional dan juga mitra internasional.

Di Italia, para anggota membahas secara luas isu ketimpangan akses pendidikan selama pandemi covid-19. “Kami berpendapat bahwa inisiatif yang sudah dibahas tahun lalu perlu tetap diperkuat untuk memulihkan kondisi pendidikan dan dapat ditingkatkan lebih baik lagi di masa pandemi ini,” ungkap Nunuk.

Negara-negara G20 memang perlu bergotong royong dalam mengatasi sejumlah tantangan di dunia pendidikan dan mendorong upaya pemulihannya pascapandemi covid-19.

“Kami juga terinspirasi dari terobosan-terobosan program Merdeka Belajar yang sangat transformatif dengan masukan-masukan dari beragam pemangku kepentingan,” kata Nunuk.

Dengan terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang inovatif itulah, Indonesia menetapkan dan memimpin diskusi dalam *Education Working Group* melalui empat agenda prioritas. Lantas apa



123RF

Seorang guru sedang mengajar peserta didiknya di luar kelas, beberapa waktu lalu. Guru diharapkan dapat memberikan pembelajaran dengan cara menyentuh hati sehingga saat murid-murid pulang dari pembelajaran, mereka bahagia dan rindu untuk kembali ke sekolah karena mendapatkan pembelajaran yang sangat menyenangkan dan sesuai minat bakat mereka.

kebermanfaatan yang kita harapkan dari keempat agenda prioritas tersebut?

Nunuk menjawab, pertemuan tersebut memberikan kesempatan bagi negara-negara G20, negara undangan, organisasi internasional, serta *working group* dan *engagement group* lainnya untuk saling belajar. Satu sama lain saling belajar dari praktik-praktik baik yang telah dilakukan di tiap-tiap negara untuk memulihkan atau menyempurnakan sistem pendidikan dunia.

Lewat pertemuan-pertemuan itu, “Kami ingin memperkenalkan konsep gotong royong dan memperkuat kolaborasi glo-

bal guna menciptakan masa depan pendidikan dunia yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan,” kata Nunuk.

Ia lalu menjelaskan beberapa program transformatif prioritas Kemendikbudristek yang saat ini diimplementasikan. Salah satunya program kurikulum penggerak. “Kita semua tahu Indonesia mengalami krisis pembelajaran. Krisis ini sudah terjadi bahkan jauh sebelum masa pandemi covid-19.”

Pandemi, menurut Nunuk, kian memperparah krisis tersebut. Muirid-murid di Indonesia juga mengalami *learning loss* selama satu setengah tahun. “Guru menjadi salah satu kunci atau katalisator dunia pendidikan Indonesia yang dapat mengurai persoalan ini di tingkat paling mendasar.”

Salah satu program Kemendikbudristek untuk menghadirkan guru berkualitas ialah dengan meluncurkan program guru penggerak. Dalam episode Merdeka Belajar bulan Juli 2020, jelas Nunuk, program pendidikan guru penggerak berupaya menghidupkan kembali semangat, daya juang, dan pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam membangun ekosistem pendidikan di Indonesia yang merdeka belajar dan selalu berpihak dan menghamba kepada murid-murid.

Nunuk menyebut, guru penggerak adalah pemimpin-pemimpin pembelajaran yang diharapkan menggerakkan roda-roda transformasi pendidikan di Indonesia.

Selain itu, juga sudah dikeluarkan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 yang mengatur penugasan guru sebagai kepala se-

kolah, yang menegaskan bahwa jalur kepemimpinan pendidikan ke depan ialah dari jalur guru penggerak.

Menurut Nunuk, guru penggerak merupakan program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan guru.

Program ini berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar guru dapat menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah dan diharapkan dapat mendorong terwujudnya cita-cita Merdeka Belajar para peserta didik.

Nunuk melanjutkan, program guru penggerak juga bertujuan mendorong guru-guru agar menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa aman, nyaman, dan kebahagiaan bagi peserta didik.

Program ini dirancang dengan menggunakan pendekatan andragogi dan *blended learning* selama enam bulan serta didesain untuk mendukung hasil belajar yang implementatif dan berbasis lapangan.

Implementasi dan kiprah guru penggerak, disebut Nunuk, sudah tampak dari perubahan-perubahan ekosistem belajar di sekitar mereka.

Selain program pendidikan guru penggerak, program transformasi pendidikan lain yang sekarang sedang diimplementasikan ialah pendidikan profesi guru dalam jabatan dan pendidikan profesi guru prajabatan.

Program ini, ungkap Nunuk, bertujuan meningkatkan SDM

dan profesionalisme guru. “Kami menyelenggarakan program ini, tujuan utamanya ialah agar guru-guru menjadi lebih profesional dan akan menjadi pengganti guru-guru yang sudah memasuki masa pensiun.”

Kemendikbudristek, masih menurut Nunuk, juga telah mengubah beberapa arah kebijakan dalam pelaksanaan program pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan dengan harapan lulusan PPG yang dilatih nantinya terpacu untuk menjadi guru profesional dalam mendidik para murid.

Dalam semua program ini, substansi, kurikulum, dan proses pembelajarannya sudah disesuaikan dengan transformasi yang diturunkan dalam kebijakan Merdeka Belajar. “Kami berharap guru-guru lulusan program ini dapat menstimulasi dan mendorong diri sendiri untuk terus menjadi pembelajar sepanjang hayat bersama-sama murid mereka karena di sini konsep Ki Hadjar Dewantara juga diimplementasikan dalam substansi kurikulum PPG dalam jabatan,” kata Nunuk.

Kemendikbudristek juga berharap lulusan PPG, dalam praktik pengajaran ke depan di sekolah-sekolahnya dapat memberikan perhatian lebih kepada murid. Para guru benar-benar lebih memusatkan perhatian dan melihat keunikan tiap-tiap murid. Di samping itu, dapat memberikan pembelajaran dengan cara menyentuh hati sehingga saat murid-murid pulang dari pembelajaran, mereka bahagia dan rindu untuk kembali ke sekolah karena mendapatkan pembelajaran yang sangat menyenangkan

kan dan sesuai minat bakat mereka.

Program PPG dalam jabatan juga dirancang agar dapat membekali guru dengan kemampuan *problem solving*, lebih kritis, dan lebih kreatif mengatasi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di kelas-kelas mereka. ■



Eksistensi sebuah bangsa akan goyah bila generasi yang sedang berkuasa melalaikan pendidikan generasi penerus melalui ‘pelecehan’ terhadap kinerja pengabdian nomor satu di bidang pendidikan, yakni guru.”

Totok Bintoro

Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta

4 Dicari, Guru yang Memiliki Panggilan Jiwa

PEMBUKAAN Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 sangat jelas mengamanatkan bahwa negara harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Ujung-ujungnya, selain harus tetap utuh, Indonesia harus maju. Tidak bisa tidak, posisi guru menjadi teramat penting.

Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta, Totok Bintoro, mengatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) belum pernah direvisi atau diganti. Saat UU tersebut disusun, segala sesuatunya, menurut dia, sudah dirumuskan dengan sangat baik, terutama terkait dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Apa sesungguhnya tujuan pendidikan nasional? Totok menjawab bahwa semua penyelenggara pendidikan sampai kepada para praktisi pendidikan, pendidik (guru), semuanya harus sadar

betul bahwa muara pelaksanaan tugas kependidikan ialah mewujudkan lahirnya SDM unggul.

SDM yang unggul akan menghasilkan Indonesia yang unggul. Negara yang unggul, apabila dikelola oleh generasi yang unggul, maka akan menghasilkan pula pendidik-pendidik unggul.

Pendidik unggul dihasilkan dari pendidikan guru yang unggul. Untuk keperluan itu diperlukan satu regulasi yang memuliakan pendidik dan pendidikan dengan guru yang juga unggul.

Totok kemudian menyinggung Pasal 8 UU No. 14 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S-1, memiliki kompetensi mengajar, sertifikasi PPG (pendidikan profesi guru), sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Persoalannya, apakah semua penyelenggara pendidikan dan pendidik menyadari akan amanah tersebut?

Menjawab pertanyaan tersebut, Totok mengutip apa yang pernah dikatakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef bahwa tidak gampang untuk membuat suatu bangsa ini kokoh dan maju. Namun, sebaliknya kita mudah apabila mengatakan kapan eksistensi bangsa ini mulai goyah.

Eksistensi sebuah bangsa akan goyah bila generasi yang sedang berkuasa melalaikan pendidikan generasi penerus melalui ‘pelecehan’ terhadap kinerja pengabdian nomor satu di bidang pendidikan, yakni guru. “Jadi jangan sampai kita menzalimi guru, termasuk pendidikan guru,” tutur Totok.

Lagi-lagi Totok mengajukan pertanyaan reflektif dan introspektif. Apakah tujuan pendidikan nasional kita sudah tercapai? Apakah program wajib belajar 9 tahun sudah tuntas atau belum, terutama di daerah-daerah 3T (terdepan, terpencil, dan terluar) di saat kita berbicara mengenai revolusi industri 4.0 yang semuanya berbasis teknologi? Faktanya, ada daerah 3T yang masih belum tersentuh. “Saya lama mengawal program ini. Saya paham betul, ada daerah-daerah yang sama sekali tidak ada sinyal untuk bisa belajarnya melalui *online*,” katanya.

Bagaimana wujud antara cita-cita kemerdekaan, persoalan guru, dan pendidikan guru? Para pendiri bangsa Indonesia amanahkan kita harus maju, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Totok mengatakan, dalam praktiknya, mewujudkan generasi unggul ternyata tidak mudah. Ia memberikan contoh distribusi guru masih tidak merata, *mismatched* masih banyak. Waktu kuliah seorang mahasiswa ingin menjadi insinyur, tapi setelah lulus akhirnya mengajar PKn (pendidikan kewarganegaraan).

Masih banyak pula guru yang belum S-1. Belum semua guru profesional di bidangnya. Bagaimana menghasilkan guru yang memiliki kompetensi unggul, *full passion*? Selain harus pintar, guru juga dituntut harus patriotik, cinta tanah air, memiliki karakter kuat, berwawasan masa depan, dan memiliki kemampuan teknologi informasi komunikasi yang baik. Sudahkah kemampuan tersebut dimiliki para guru?

Mengutip Winarno Surachmad, pakar pendidikan, Totok mengatakan banyak guru yang sekarang ini mendidik tapi tanpa ilmu pendidikan. Guru-guru saat ini terbelenggu oleh rutinitas administratif. Akhirnya guru sekadar mengajar.

Selain itu, guru-guru juga mulai kehilangan ikatan emosional dengan anak didik mereka. Bagaimana agar para guru memiliki jiwa murah hati dan sepenuh hati? “Apakah betul ini masih ada atau sekadar akan menjadi seperti ini?” kata Totok.

Totok menambahkan ada tiga tipe guru, yaitu guru pendidik, guru pengajar, dan guru pencari nafkah. Guru pendidik adalah guru yang mewakafkan seluruh jiwa raganya untuk keberhasilan peserta didiknya. Dia akan resah kalau muridnya belum berhasil.

Guru pengajar, menurut Totok, yang penting sudah menunaikan tugas mengajarnya. Adapun guru pencari nafkah semata-mata hanya mencari nafkah.

Meskipun demikian, guru pendidik bukannya tidak butuh nafkah. Guru pendidik yakin bahwa dengan menjadi guru yang mengajar penuh pengabdian sepenuh jiwa raganya, nafkahnya pun nanti akan datang, bakal menghampiri.

Guru yang baik ialah yang punya panggilan jiwa untuk melengkapi kemampuan akademiknya yang memang baik. Panggilan jiwa ini menjadi penentu karena panggilan jiwa adalah dorongan dari dalam diri pendidik untuk terus mengembangkan kemampuan dan memperkuat kemauan.

Lalu apa ukuran panggilan jiwa? Totok mengatakan sang guru

akan terus belajar. Dia akan mencari sesuatu untuk menyiapkan siswanya menjadi berkarakter, cerdas, dan terampil. Kalau belajar tentang kompetensi abad ke-21, dia ingin menyiapkan lulusannya siap memasuki abad ke-21 dengan sepenuh jiwa raga.

Panggilan jiwa akan muncul seperti itu. Jika panggilan jiwanya tinggi, kecintaan mereka pada pengetahuannya pun tinggi. Pengetahuan yang diperolehnya itu lantas diajarkan kepada murid-muridnya. Ia juga berusaha untuk terus mencari dan menggali potensi murid-muridnya.

Indonesia membutuhkan guru-guru yang memiliki panggilan jiwa. ■

“

Peningkatan kompetensi guru bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek dan Kementerian Agama, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama.”

Mohammad Haerul Amri
Anggota Komisi X DPR RI

5 Instrumen Pendidikan belum Komprehensif

KETUA Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, menegaskan bahwa agenda pendidikan pasca-Presidensi G20 Indonesia ialah bagaimana menghadirkan pendidikan berkualitas untuk semua yang di dalamnya berkaitan dengan teknologi digital, membangun solidaritas dan kemitraan serta masa depan pekerjaan di dunia kependidikan pascapandemi covid-19.

Dia menjelaskan, bangsa yang besar ini harus serius mengutamakan sektor pendidikan, termasuk di dalamnya upaya meningkatkan kualitas guru untuk masa depan generasi bangsa. “Pasca-presidensi G20, tantangan berikutnya ialah bagaimana kita memperbaiki instrumen kebijakan dan bagaimana kita serius menatanya?”

Menurut dia, betapa pun kita bicara tentang mutu, yang paling

utama sebenarnya ialah bagaimana kita bisa menciptakan suasana harmonis di kelas. “Para gurunya, kepala sekolahnya, penguasanya mesti harus bagaimana?” ujarnya.

Instrumen kebijakan tentang kurikulum sekolah, proses asesmen guru dalam rangka menghadirkan pendidikan berkualitas bagi semua sudah dipersiapkan dengan baik.

Instrumen kebijakan seperti kurikulum merdeka, guru penggerak memang sudah disiapkan. “Tapi kami belum melihat sebagai sesuatu yang komprehensif, belum menjadi penggerak perubahan. Kita belum melihat sebagai sebuah sistem,” kata Unifah.

Kalau sekarang kita fokus kepada guru penggerak, apakah guru-guru di daerah-daerah sudah dilibatkan dalam program guru penggerak? Menurut Unifah, ini persoalan yang amat sangat serius karena terkait langsung dengan mutu pengajaran di kelas.

Unifah melihat upaya peningkatan kapasitas para ‘aktor’ (guru) tersebut melalui program penggerak lebih bersifat *ad hoc* yang hanya mungkin cocok untuk sementara.

Ia mengkritik Kemendikbudristek belum membenahi sistem pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga pendidikan secara ter-sistem dan berkelanjutan.

Mereviu Kurikulum

Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa, Ahmad Baedowi AR, yang punya pengalaman mengajar di perguruan tinggi, melatih guru-guru, dan keliling Indonesia berinteraksi dengan mereka,

menyatakan sependapat dengan apa yang disampaikan Unifah.

“Infrastruktur sistem pendidikan kita memang *nggak* solid atau boleh saya katakan *nggak* bagus untuk menumbuhkan kualitas pendidikan yang lebih baik,” kata Baedowi.

Masalahnya, ketidaksolidan itu ada di mana? Ia mengatakan problemnya seperti bagaimana tanggung jawab Kementerian Agama dengan guru-gurunya? Misalnya fakultas tarbiyah di seluruh universitas Islam negeri dan institut agama Islam negeri memproduksi guru sampai sekarang. Ini mengikuti model FKIP atau IKIP yang sekarang sudah berubah menjadi universitas.

Dari sini, Baedowi melihat ada masalah birokrasi yang tidak bisa diselesaikan secara sederhana. Kementerian Agama mengikuti implementasi pendidikan dengan basis undang-undang yang tersentralisasi, sementara Kemendikbud mengikuti basis undang-undang desentralisasi. Padahal dua-duanya menangani pendidikan.

“Saya melihat agak aneh. Di Kementerian Agama ada Direktorat Perguruan Tinggi, yang pejabatnya masuk dalam eselon II. Tapi dia seolah-olah menjadi atasan dari semua rektor yang ada di eselon I. Bayangkan, dari struktur saja sudah kelihatan sistemnya begitu rumit,” ungkap Baedowi.

Apa implikasinya dari kerumitan birokrasi itu? Siapa yang bertanggung jawab mendesain kurikulum untuk FKIP? “Kalau kita lihat, kita pelajari dalam sejarah Republik ini, sejarah pendidikan kita sampai hari ini belum pernah melakukan reviu terha-

dap kurikulum. Sekarang kita ribut soal PPG, bagaimana sertifikasi dan lain sebagainya untuk para guru,” ujar Baedowi.

Namun, menurut Baedowi, “Kita tidak pernah duduk melakukan revid kurikulum terkait bagaimana cara kita melahirkan guru? Benar, semuanya ingin berkualitas. Guru dulu setahu saya belajar lima tahun, sekarang menjadi empat tahun. Setelah itu belum cukup, para guru masih harus masuk LPTK, ikut PPG dan sebagainya. Sistem ini kacau menurut saya.”

Bagaimana supaya guru ini ketika lulus dari pendidikan lima tahun, dibalik, diputar. Pedagoginya yang harus diperbanyak menjadi misalnya 60%. Sekarang ini basis teoretisnya, kalau kita telusuri, semua kurikulum FKIP dan tarbiyah 70% teori, pedagoginya kecil sekali.

Baedowi pernah mengetes guru di lapangan. Kalau ia bertanya teori belajar, pemahaman para guru dangkal sekali. “Teori belajar *nggak* paham, aspek pedagogi juga *nggak* paham. Ini menjadi problem kita bersama,” katanya.

Baedowi menegaskan, kalau untuk menjadi guru harus kuliah selama lima tahun, teorinya jangan 70%. Selama ini praktik mengajarnya diletakkan di ujung, di semester enam atau tujuh. “Mes-tinya praktik mengajar langsung di semester dua. Mereka harus sudah praktik di sekolah.”

Memberikan contoh, saat kuliah S-2 di Amerika, mata kuliahnya satu semester cuma tiga atau empat. “Coba bandingkan dengan bagaimana kita mendesain kurikulum di sini,” katanya.

Menurut Baedowi, itulah yang menjadi fondasi awal mengapa mutu guru kita *nggak* bisa terangkat. “Anda mau menyebut namanya, guru penggerak, guru apa saja itu, kalau di ujungnya tidak pernah dibenahi, kurikulumnya tidak pernah dibenahi, kita tetap akan memproduksi guru dengan kualitas yang seperti sekarang.”

Kalau nanti ada revid kurikulum, apa yang kita lakukan? Baedowi menyebut banyak, misalnya buku mata ajar dan buku teks perkuliahan. Jika revid terhadap kurikulum ini kita lakukan, akan berimplikasi pada program secara nasional.

Tidak perlu lagi misalnya sarjana pendidikan yang sudah lulus tapi belum punya sertifikat mengajar, masih harus ikut pendidikan lagi dua tahun untuk mendapatkan sertifikat mengajar. “Menurut saya ini mengada-ada,” ungkap Baedowi.

Perbaiki Infrastruktur

Berbicara sebagai penanggap, anggota Komisi X DPR RI, Mohammad Haerul Amri, sependapat dengan para pembicara utama bahwa upaya membenahi sistem pendidikan nasional agar pendidikan kita semakin berkualitas sangat penting dilakukan. “Saya sepakat infrastruktur pendidikan kita harus diperbaiki.”

Haerul memberikan contoh. Katanya, kita tidak usah jauh-jauh membandingkan dengan Indonesia di wilayah timur atau yang lainnya. “Di dapil saya saja yang notabene masih wilayah Jawa dan mudah dijangkau dari Jakarta, saya melihat ada infra-



Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram membuat modul pembelajaran bagi guru-guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (21/9/2020). Kemudahan akses koneksi internet memudahkan para tenaga didik dan siswa untuk memperluas cakupan pengetahuan serta literatur yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Infrastruktur pendidikan di Indonesia, khususnya di luar Jawa, harus segera ditingkatkan agar kualitas pendidikan nasional bisa merata.

struktur lembaga pendidikan yang kondisinya sangat menyedihkan.”

Ia menyatakan untuk membenahi infrastruktur tersebut seyogianya tidak hanya ditanggung oleh Kemendikbudristek atau Kementerian Agama kalau ini menyangkut pendidikan agama, tetapi juga para *stakeholder*, para pengusaha, dan para milyuner kita sebaiknya ikut ambil bagian untuk memperbaiki infrastruktur yang memprihatinkan itu.

Haerul memberikan contoh yang baik untuk ditiru, yakni keterlibatan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mendirikan Yayasan Sukma Bangsa dan Sekolah Sukma Bangsa di Aceh pascatsunami.

Warga Aceh yang terkena dampak tsunami benar-benar merasakan Sekolah Sukma Bangsa yang didirikan di sejumlah tempat di provinsi itu. Mereka bisa mengenyam pendidikan secara normal. “Oleh karenanya mengimbau kepada *stakeholder* lainnya untuk ikut bahu-membahu memperbaiki infrastruktur pendidikan,” ujarnya.

Haerul mengajak semua pihak, khususnya mereka yang peduli kepada dunia pendidikan, untuk menciptakan atmosfer belajar yang lebih kondusif dan lebih bersemangat.

Kebiasaan ganti menteri ganti kebijakan harus mulai dikurangi. Fakta membuktikan sering kali setiap ada pergantian menteri, agar sang menteri dibilang eksis atau berani membuat terobosan, tanpa melihat latar belakang silabus yang lama, langsung merevisi dan membuat silabus baru.

Terkait dengan peningkatan kompetensi guru, Haerul mengatakan hal itu bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek dan Kementerian Agama, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya lembaga-lembaga pada kementerian yang kebetulan langsung bersentuhan, bersinggungan dengan Kementerian Agama dan Kemendikbudristek.

“Tentu harus pula ada kepedulian dari para *stakeholder*, para

pengusaha, orang-orang kaya di Indonesia. Daripada duitnya dilarikan ke luar negeri, seyogianya diinvestasikan buat pendidikan di Indonesia,” kata dia.

Haerul mengakui mengurus guru yang jumlahnya tidak kecil itu bukan hal yang mudah. “Namun, saya kira kalau ada kemauan yang tinggi di antara kita semua, ini bukan menjadi persoalan yang sangat rumit, bukan beban buat kita. Yang penting ada kesadaran bersama, saling berkomunikasi, dan terjadi kolaborasi antara kementerian dan Komisi X DPR, juga dengan lembaga-lembaga atau kementerian lain.”

Salah satu agenda pendidikan yang dibawa Indonesia dalam G20 ialah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Ada alasan kuat yang mendasarinya.

Menurut Haerul, pertama, Indonesia sedang dalam proses menjemput peluang bonus demografi. Persentase usia produktif 15-64 tahun menurut Sensus Penduduk 2020 mencapai angka 70,72%. Ini aset yang sangat berharga dalam bingkai pembangunan.

Semua itu akan menjadi aset yang berharga apabila Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Akan tetapi, apabila target sektor pendidikan tidak terpenuhi, akan menjadi sebuah kerugian besar.

“Saya sebagai generasi muda akan terus membangkitkan jiwa saya dan teman-teman yang lain, bagaimana agar kita bisa ambil bagian di bonus demografi ini,” katanya.

Tujuan pendidikan, imbuh Haerul, ialah menciptakan masa depan yang lebih baik. Masa depan akan jauh lebih dinamis dari saat ini, terlebih dengan hadirnya teknologi yang terus berkembang. Mau tidak mau, kita harus ambil bagian di dalamnya.

Wartawan *Kompas* bidang pendidikan, Ester Lince Napitupulu, mencoba menarik benang merah diskusi. Dari diskusi yang berkembang, menurut dia, ada pengakuan penting dan siapa pun tidak ada yang menolak bahwa guru menempati posisi vital untuk masa depan bangsa ini.

Ester berpendapat, apa pun yang terkandung dalam setiap komitmen bagi hadirnya pendidikan berkualitas, seperti pengoptimalan pendidikan teknologi digital, mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat, sampai bagaimana membangun solidaritas dan komitmen bersama untuk membangun itu semua, bangsa ini membutuhkan peran guru.

Ia mencoba melihat laporan kelompok kerja G20 yang dikepalai oleh Kemendikbudristek, di situ ada hal bagaimana sebenarnya pengakuan terhadap guru.

Pada laporan presidensi G20 disebutkan bahwa guru adalah pilar utama dalam sistem pendidikan di negara mana pun. Di sana juga dinyatakan bahwa para pemimpin dunia anggota G20 mendukung *Transforming Education Summit* yang digagas oleh PBB di dalam *Future of Education* tentang bagaimana pendidikan masa depan bahwa yang namanya guru tidak pernah ditinggalkan.

Indonesia mengakui semua itu bahwa guru punya peran sen-

tral. Ini terbukti saat pandemi covid-19. Para guru terus melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka agar pembelajaran terus berlangsung.

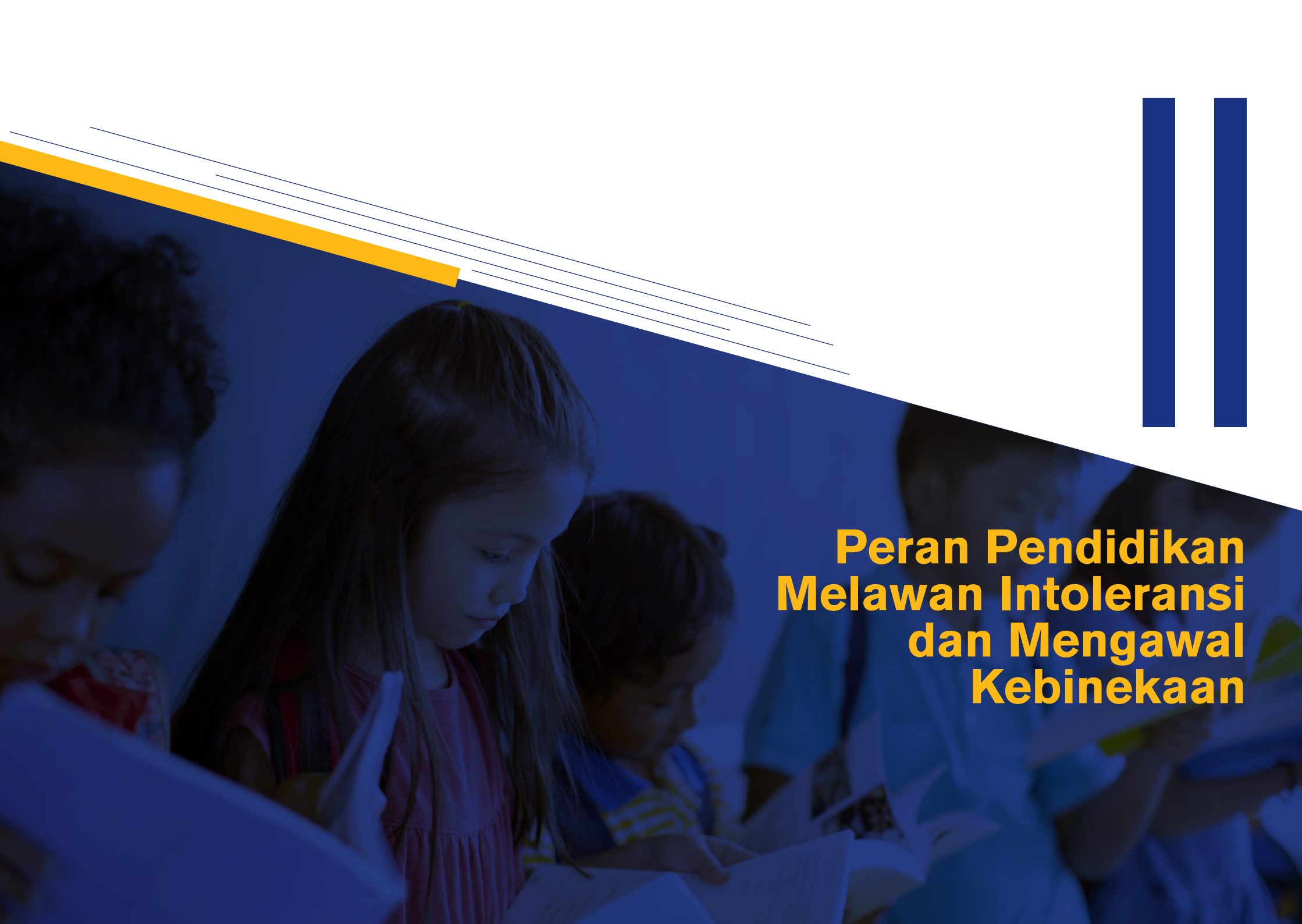
Ester menjelaskan, dalam presidensi G20 juga ada tuntutan terkait dengan kesejahteraan guru, bagaimana pemerintah harus memberikan gaji yang layak kepada para guru.

Kita juga dituntut untuk bertanggung jawab bagaimana membuat guru menjadi profesi yang menarik, pun untuk orang-orang yang bertalenta baik.

Dalam soal ini, kita perlu melihat Singapura dan Finlandia serta negara-negara maju lain. “Mereka mampu menarik anak-anak muda yang memiliki talenta untuk berkiprah di dunia pendidikan,” ujar Ester.

Menutup diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat mengajukan pertanyaan reflektif. “Bapak dan Ibu, izinkan saya bertanya, apakah bangsa ini bangsa yang suka belajar? Apakah bangsa ini bangsa yang rajin belajar atau malas belajar?”

Apa pun jawaban kita, “Mari kita tingkatkan gairah belajar kita sebagai bangsa.” ■



Peran Pendidikan Melawan Intoleransi dan Mengawal Kebinekaan

1 Latar Belakang: Amanat Konstitusi tidak Sejalan dengan Realitas

KONSTITUSI negeri ini dengan jelas dan tegas menjamin kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Kata dan kalimat dalam konstitusi itu terdengar indah, manis, dan menyejukkan. Akan tetapi, keindahan dan kesejukan tersebut kerap berbeda dengan realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan data hasil riset Setara Institute pada 2021, Depok menjadi kota paling intoleran dengan skor 3,577 dari 94 kota di seluruh Indonesia. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tahun 2022 menyebut masyarakat Indonesia belum toleran.

Adapun berdasarkan hasil pemantauan Imparsial (The Indonesia Human Right Monitor) sepanjang 2022, terdapat 25 pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terekam oleh media.

Di beberapa daerah, kelompok minoritas masih dipersulit untuk mendirikan rumah ibadah. Kasus terbaru terjadi di Bandar Lampung ketika warga melakukan persekusi terhadap jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Rajabasa. Dalam aksi yang viral di media sosial itu, mereka membubarkan peribadatan dengan alasan gereja yang digunakan belum mendapatkan izin.

Apa pun dalihnya, bagaimanapun caranya, menghalangi umat yang menjalankan perintah agamanya adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran semua agama yang menjunjung toleransi. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun nilai-nilai toleransi dalam menumbuhkembangkan kesadaran untuk menghargai keberagaman. ■



Selain pengetahuan akademis, pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai universal seperti toleransi, keadilan, dan persamaan.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Perlu Penerimaan Utuh atas Segala Atribut Perbedaan

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa Indonesia memiliki semboyan *unity in diversity. Bhinneka Tunggal Ika*. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Atau dalam konsep yang lebih spesifik, satu dalam keragaman. Moto itu mestinya disadari sebagai jiwa yang menggerakkan seluruh aspek bagi tumbuh kembangnya bangsa ini. Artinya, dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak boleh menonjolkan perbedaan. Yang paling penting untuk diimplementasikan ialah persamaan sebagai anak bangsa Indonesia.

Mengutip data dari Setara Institute for Democracy and Peace, sepanjang 2022, kata Rerie--sapaan akrab Lestari Moerdijat, kasus intoleransi mengalami tren peningkatan jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Kasus terbanyak terkait dengan pendirian rumah ibadah, disusul penolakan ceramah, kasus penodaan agama, dan pelanggaran kebebasan beragama.

Berdasarkan hasil pemantauan Imparsial sepanjang 2022, im-buh Rerie, terdapat 25 pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan yang dianut masyarakat. Dimulai dari perusakan rumah ibadah, perusakan atribut keagamaan, serangan terhadap kelompok keluarga yang berbeda agama, penyegelan tempat ibadah, pengucilan masyarakat, hingga larangan beribadah.

Ragam kasus yang terjadi, menurut Rerie, seharusnya menjadi cambuk bagi seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat bahwa sebagai negara kesatuan diperlukan penerimaan utuh atas segala atribut perbedaan sesuai semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Semboyan tersebut mesti diimplementasikan sebagai cara hidup sesuai Pancasila dan UUD 1945.

“Salah satu wadah untuk membangun kesadaran bersama dimaksud ialah pendidikan,” kata Rerie saat memberikan kata pengantar dalam diskusi bertajuk Peran Pendidikan Melawan Intoleransi dan Mengawal Kebinekaan yang digelar Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023.

Sebagai ruang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kata Rerie, selain mencerdaskan, pendidikan juga mesti menjadi wadah bagi seluruh anak bangsa untuk menyelami dan mengenal diri sendiri. Mengutip Ki Hadjar Dewantara, selain pengetahuan akademis, pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai universal seperti toleransi, keadilan, dan persamaan. “Pendidikan mesti mencakup pengembangan karakter dan etika,” jelasnya.



MIRAMDANI

Peserta didik baru kelas 1 SD berdiri di dekat mural toleransi antarumat beragama saat mengikuti rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SDN Petukangan Utara 07 Pagi, Jakarta, Rabu (12/7/2023). Pendidikan harus menjadi sarana untuk memperkuat kerukunan dan toleransi antaragama di Indonesia. Kerukunan dan toleransi beragama menjadi fondasi hadirnya persatuan di negeri ini.

Mengutip Azyumardi Azra, Rerie mengatakan bahwa pendidikan harus menjadi sarana untuk memperkuat kerukunan dan toleransi antaragama di Indonesia. Kerukunan dan toleransi beragama menjadi fondasi hadirnya persatuan di negeri ini. Untuk itu, diperlukan sikap saling menghormati terhadap perbedaan-perbedaan, pengakuan terhadap keragaman, kemajemukan atau pluralisme.

Dalam *Democracy and Education* (1916), John Dewey, seorang

pemikir pendidikan, menegaskan bahwa pendidikan yang baik harus memberikan kesempatan kepada individu untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya, juga memperkenalkan nilai-nilai toleransi dan kerja sama. “Pendidikan untuk kecerdasan intelektual mesti diimbangi dengan pengembangan kemampuan moral dan etika,” tegas Rerie.

Pendidikan, imbuhnya, mesti menjadi wadah untuk menanamkan nilai kebangsaan sejak dini yang bersumber dari konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan *Bhinneka Tunggal Ika*. “Kita bangun kesadaran bersama untuk berbenah, mencegah kasus-kasus intoleransi kembali terjadi. Tugas bagi kita, khususnya lembaga pendidikan, untuk menanamkan bahwa belajar adalah seni untuk memaknai kehidupan sebagai manusia dan pada saat yang sama menjadi ruang untuk merawat gaung harmoni dalam perbedaan,” urai anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Sebagai bangsa beragam, kata Rerie lagi, diperlukan penerimaan atas kultur ‘terbuka dan terintegrasi’ tanpa menanggalkan segala atribut diri dalam relasi dengan yang lain melalui pendidikan. ■

“

Keberagaman merupakan kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan, seperti dalam menjawab tantangan zaman ke depan.”

Julian Andarsa

Kepala Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan
Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek

3 Harus Ada Kolaborasi Hilangkan Tiga Dosa Pendidikan

KEPALA Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbudristek) Julian Andarsa menyatakan bahwa isu intoleransi sebenarnya bukanlah persoalan baru.

Menurut arahan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim, kata dia, ada tiga dosa besar di lingkungan pendidikan, yaitu perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Dosa-dosa itu harus dihapuskan untuk menjaga hak warga negara atas pendidikan. Untuk itu, seluruh satuan pendidikan bertanggung jawab menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi semua.

Bagaimana caranya satuan pendidikan menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi semua? Menurutinya, harus memas-



123RF

Peserta didik bertugas menjadi pengibar bendera merah putih dalam upacara di sekolah, beberapa waktu lalu. Mengikuti upacara di sekolah dapat menumbuhkan rasa nasionalisme sehingga tumbuh pula rasa kebersamaan dan mencintai keberagaman.

tikan tersedia lingkungan belajar yang bebas dari perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual.

“Tiga hal ini harus segera dihilangkan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi semua yang pada akhirnya membuat seluruh satuan pendidikan mencintai keberagaman dan mewujudkan kesetaraan yang berkeadilan,” kata Julian.

Semua komponen pendidikan, lanjutnya, harus menjadi contoh dan teladan tentang hidup di tengah keberagaman karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang beragam. Tidak hanya perbedaan gender laki-laki dan perempuan, setiap indivi-

du juga memiliki karakteristik yang beragam, fisik yang berbeda satu sama lain, dan hobi berbeda-beda. Kegemaran dan gaya belajar pun berbeda-beda. “Inilah yang harus kita jaga, kita rawat dalam semangat *Bhinneka Tunggal Ika*.”

Mengapa kita harus mencintai keberagaman? Menurut Julian, keberagaman merupakan kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan, seperti dalam menjawab tantangan zaman ke depan sehingga anak-anak sejak dini perlu dilatih dan dibiasakan untuk hidup dan beraktivitas dalam iklim keberagaman.

Lebih lanjut ia menjelaskan, aktualisasi keberagaman di dunia pendidikan dapat diwujudkan melalui pemberian ruang kebebasan bagi para siswa untuk berkreaitivitas, membangun pola komunikasi yang baik antarsiswa, serta berkolaborasi dalam menghadapi berbagai persoalan. “Kolaborasi penting banget dan harus terus dilatih agar anak didik dan seluruh peserta didik mencintai keberagaman dan kebersamaan,” jelasnya.

Bila anak didik tidak mencintai keberagaman, berarti akan mengalami kerugian besar. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan. Selain itu, bila tidak mencintai keberagaman, berarti akan mengalami kesulitan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. “Kesadaran untuk beradaptasi dengan perubahan amat sangat penting karena satu-satunya hal yang pasti terjadi di dunia ini ialah perubahan,” tegas Julian.

Dia mengakui bahwa selama ini inspektorat jenderal yang dipimpinnya banyak menerima laporan tentang kasus-kasus terkait tiga dosa besar pendidikan. Salah satu yang beraroma intoleransi ialah pemaksaan menggunakan hijab. “Laporan itu kita tangani sehingga muncullah SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri terkait dengan pakaian atau seragam sekolah.”

Menurutnya, bagaimana bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan kalau guru yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman malah melakukan tindakan yang melampaui batas sehingga meresahkan siswa di sekolah.

Julian mengapresiasi Forum Diskusi Denpasar 12 yang telah menginisiasi diskusi kali ini sehingga muncul berbagai pemikiran, usulan, serta kritik sebagai masukan bagi Kemendikbudristek tentang apa saja yang harus diperhatikan dan dilakukan bersama-sama ke depan.

“Jadi, berbicara tentang tiga dosa besar pendidikan, yang kita perlu lakukan bukan hanya penanganan masalah, tapi juga ada upaya pencegahan. Karena, kalau hanya penanganan, kita kayak pemadam kebakaran, *nggak* akan pernah selesai,” paparnya.

Julian mengungkapkan, selama ini Kemendikbudristek memiliki program dan materi penguatan keberagaman, materi kampanye pencegahan kekerasan seksual, materi kampanye pencegahan perundungan. Ada pula pelatihan guru tentang wawasan kebinekaan dan penerapan profil pelajar Pancasila yang diimplementasikan melalui Kurikulum Merdeka. ■



Harus tertanam paradigma dan perspektif tentang kebinekaan sehingga menghargai orang lain, melihat keberagaman sebagai suatu modalitas untuk kemajuan bangsa.”

Putu Elvina

Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan
Komnas HAM

4 Intoleransi Menjadi Beban Negara

KOMISIONER Pendidikan dan Penyuluhan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Putu Elvina menyatakan pendidikan dan penegakan HAM untuk mencegah intoleransi dan mengawal kebinekaan bukanlah hal yang mudah. Meski demikian, kita harus memiliki komitmen untuk memastikan bahwa toleransi benar-benar hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai kekuatan bersama yang menopang dan memperkaya kebinekaan. Adapun intoleransi menjadi beban negara karena dapat memicu berbagai peristiwa dan gesekan sosial yang memecah belah.

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010, Indonesia memiliki enam agama dan banyak aliran kepercayaan, juga terdapat 1.128 suku yang terdiri atas 633 kelompok suku besar. Dalam studinya, BPS mengatakan keanekaragaman suku yang ada membuat Indonesia sangat heterogen atau majemuk sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk mengelola keragaman menjadi modal yang efektif untuk menjadi bangsa yang besar. Se-

baliknya, bila tidak mampu mengelola keberagaman, kondisi itu akan menjadi risiko yang besar pula terhadap kehancuran yang memunculkan friksi-friksi di masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhitungkan, kata Elvina, ialah dinamika global dan organisasi terkait dengan informasi dan teknologi yang melahirkan relasi atau pola relasi dalam masyarakat. “Kita bisa melihat dengan gamblang bagaimana kedekatan, kelekatan yang dulu kita nikmati, sekarang semakin berkurang karena jarak antara kita dan tetangga, misalnya, semakin lebar, antara orangtua dan anak-anak juga mengalami perubahan. Ini tentu menjadi ancaman yang diperparah oleh dampak negatif dari media sosial yang memunculkan berbagai kejahatan seperti kejahatan transnasional.”

Oleh karena itu, peluang menjadikan pendidikan sebagai salah satu jalan keluar untuk mewujudkan toleransi dan merekatkan kebinekaan menjadi hal yang wajib, yakni bagaimana usaha sadar kita sebagai bangsa untuk mewujudkan suasana dan proses belajar mengajar yang menjunjung tinggi kebinekaan. “Artinya, harus tertanam paradigma dan perspektif tentang kebinekaan sehingga menghargai orang lain, melihat keberagaman sebagai suatu modalitas untuk kemajuan bangsa,” jelasnya.

Selain itu, perlu dikuatkan pula dengan kesadaran dan pemahaman bersama bahwa tidak boleh seorang pun menjadi sasaran diskriminasi oleh negara, lembaga, kelompok, atau individu atas dasar agama dan kepercayaan. Toleransi pada tingkat negara

membutuhkan jaminan berupa payung hukum dan penegakan hukum yang tegas dan adil.

Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut Elvina, kerap muncul persoalan yang dilematis. Misalnya, di satu sisi kita berupaya membangun kesadaran untuk saling menghormati kebinekaan yang ada, tapi di sisi yang lain perbedaan kerap memunculkan masalah yang berujung pada pelanggaran hak-hak warga negara, termasuk pelanggaran HAM. “Karena itu, negara harus hadir menyelesaikannya melalui penegakan hukum secara tegas dan adil tanpa pandang bulu.”

Negara harus menciptakan regulasi yang bisa dipatuhi dan menjadi landasan perilaku toleransi bagi warga negara. “Kewajiban negara masuk dalam urusan memperkuat toleransi saya pikir menjadi hal mendasar di negara pluralis seperti Indonesia, karena intoleransi biasanya bermetamorfosis menjadi diskriminatif yang pada ujungnya mengancam persatuan dan keutuhan bangsa,” Elvina mengingatkan.

Ia menilai, dalam pendidikan karakter, Indonesia banyak memiliki kebijakan atau regulasi serta mata pelajaran yang spesifik untuk meningkatkan karakter anak didik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kendati demikian, harus kita akui bahwa pendidikan karakter belum menjadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai masalah yang ada.

“Perlu evaluasi yang serius, termasuk evaluasi kurikulum dan implementasi kebijakan *national character building* yang

diterapkan selama ini, apakah sudah berjalan sebagaimana diharapkan atau masih perlu perubahan dan perbaikan ke depan,” paparnya.

Lalu apa yang sudah dilakukan Komnas HAM selama ini? Elvina mengatakan intoleransi berkaitan erat dengan HAM warga negara. Berkenaan dengan hal itu, salah satu program prioritas nasional Komnas HAM ialah Standar Norma dan Pengaturan (SNP) hak asasi manusia.

SNP adalah dokumen yang merupakan penjabaran secara praktis dan implementatif mengenai berbagai instrumen HAM, baik internasional maupun nasional, supaya mudah dipahami, diimplementasikan, dan dipatuhi para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara.

Salah satu *concern* dari SNP ialah memberikan perlindungan terhadap para pembela HAM di Indonesia karena ancaman dan serangan sering ditujukan kepada mereka lantaran aktivitas dalam melakukan kerja-kerja pembelaan dan penegakan HAM.

Pembela HAM, kata Elvina, sering mengalami berbagai bentuk serangan dan ancaman, seperti serangan fisik, psikis, seksual, stigmatisasi, diskriminasi, penggunaan hukum yang sewenang-wenang, hingga berujung pada pembunuhan.

Padahal, hak untuk melakukan pembelaan HAM telah diakui konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, meskipun hingga saat ini belum ada peraturan yang lebih eksplisit dan operasional terkait perlindungan hak bagi para pem-

bela HAM.

Berdasarkan permasalahan dan kondisi tersebut, kata dia, Komnas HAM menyusun SNP tentang Pembela HAM sebagai panduan bagi pengemban kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak pembela HAM.

SNP tentang Pembela HAM telah dibahas dan disahkan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM pada 7 September 2021 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela HAM.

Lebih lanjut, Elvina mengatakan upaya pencegahan intoleransi hingga ke akar rumput harus dilakukan secara komprehensif. Jika upaya tersebut gagal, negara atau pemerintah sebagai institusi yang memiliki mandat melindungi, menghormati, dan menjamin pemenuhan HAM, terutama kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara, akan mengalami masalah besar. “Negara akan sulit untuk mengeliminasi kekerasan yang timbul sebagai dampak dari persepsi intoleransi,” tuturnya.

Komnas HAM, kata dia, telah memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. “Tapi perlu kita sadari bahwa upaya untuk mencegah sikap dan pandangan intoleran bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau Komnas HAM, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama karena akar intoleransi itu ada di masyarakat,” papar Elvina. ■

“

Ada lima faktor yang secara akumulatif memengaruhi tingkat toleransi pelajar di Indonesia, yakni orangtua, guru agama, teman bergaul, organisasi ekstrakurikuler yang diikuti, dan literatur keagamaan.”

Halili Hasan

Direktur Riset Setara Institute

5 Masih Ada Problem Penegakan Hukum

DIREKTUR Riset Setara Institute Halili Hasan mengatakan ada riset terbaru oleh Setara Institute yang menunjukkan hasil cukup mencengangkan. Hasilnya, antara lain, bahwa ada peningkatan jumlah pelajar intoleran aktif di sekolah tingkat menengah atas (SMA) dan sederajat di lima kota Indonesia yang disurvei.

Jika dibandingkan dengan hasil survei serupa pada 2016, kini ada peningkatan jumlah pelajar yang intoleran aktif. Dalam survei tujuh tahun lalu, terdapat 2,4% pelajar yang intoleran aktif, sedangkan yang terpapar sebanyak 0,3%. “Sekarang meningkat kecemasan kita karena (pelajar) yang intoleran aktif itu berada di angka 5,6%, sementara yang terpapar 0,6%. Jadi ada 5,6% yang harus kita cemas,” kata Halili.

Survei melibatkan 947 pelajar laki-laki dan perempuan sebagai responden. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka di Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta, dan Padang.

Menurutnya, sebanyak 99,3% pelajar menerima perbedaan

keyakinan; 99,6% menerima perbedaan ras dan etnis; 98,5% menerima perbedaan agama dan keyakinan; dan 93,8% menerima kesetaraan gender dalam pemilihan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Namun, ketika ditanya tentang tanggapan terhadap penghinnaan agama, sekitar 20,2% pelajar mengaku tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan. Survei itu juga mengungkapkan bahwa 51,8% pelajar menganggap negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, merupakan ancaman terhadap agama dan budaya Indonesia.

Selanjutnya sebanyak 61,1% pelajar menyatakan merasa lebih nyaman jika semua siswi muslim berjilbab dan 56,3% pelajar menyokong penerapan syariat Islam. Temuan mengejutkan lain ialah 83,3% menilai Pancasila bukan ideologi negara yang bersifat permanen dan dapat diganti. Lalu, sekitar 33% pelajar setuju untuk membela agama, termasuk harus mati dalam membela agama.

Menurut Halili, ada lima faktor yang secara akumulatif memengaruhi tingkat toleransi pelajar di Indonesia, yakni pengaruh orangtua, guru agama, teman bergaul, organisasi ekstrakurikuler yang diikuti, dan literatur keagamaan.

Untuk mencegah meningkatnya intoleransi di kalangan pelajar, menurutnya perlu dilakukan perbaikan pada kelima faktor tersebut. Alternatif lain ialah menyajikan program-program untuk meningkatkan toleransi di kalangan guru karena mereka

akan sangat menentukan.

“Identitas seseorang bisa menguat ketika isu toleransi terkait erat dengan agama. Oleh karena itu, Setara Institute sangat mengkhawatirkan terjadinya politisasi agama yang berpotensi memecah belah persatuan dan keutuhan bangsa,” katanya.

Kecemasan dan kekhawatiran berkenaan dengan meningkatnya intoleransi sebenarnya berkaitan erat dengan dua faktor, yakni faktor negara dan faktor masyarakat. Dari aspek negara, kebijakan tentang regulasi yang menjamin tegaknya kebinekaan di negeri ini belum selesai. “Pusat mengatakan seperti apa, daerah melakukan seperti apa, tidak jelas. Bahkan ada perda yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat,” ungkap Hilili.

Problem hukum yang kita hadapi, baik di pusat maupun daerah, akan berpengaruh pada penegakan hukum yang lemah, dan bila hukum tidak ditegakkan maka akan muncul kejahatan baru yang mungkin lebih besar lagi. “Ketiadaan penegakan hukum berarti memenangkan kejahatan,” kata dia.

Selanjutnya dari aspek masyarakat, lanjut Halili, ada ketidak-tahuan tentang bagaimana beragama yang baik dan benar, serta cara membangun relasi dalam hubungan antarumat beragama.

“Orang menolak pembangunan rumah ibadah agama tertentu cuma karena rumah ibadah itu hanya berjarak 100 meter dari rumah ibadah mereka. Yang gitu-gitu terjadi karena mereka *nggak* paham. Ini problem literasi yang memengaruhi psikologis sehingga merasa terancam bila melihat adanya perbedaan,” jelasnya.

Ia berharap diskusi yang diinisiasi oleh Forum Diskusi Denpasar 12 ini dapat menggugah berbagai pemangku kepentingan seperti Kemendikbudristek untuk melakukan revitalisasi tata kelola dan membangun kultur yang toleran di setiap jenjang pendidikan.

Di sisi lain, Hilili juga menyorot tentang pro dan kontra di masyarakat mengenai ada tidaknya intoleransi. “Kita harus akui secara jujur bahwa intoleransi itu memang ada. Itu suatu hal yang harus diakui secara objektif dan berupaya untuk mengatasinya, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan-kebijakan konkret.” ■



Salah satu cara mengelola struktur agar drainase emosi bisa dikelola dengan baik sehingga tidak muncul *bullying*, kekerasan, dan saling curiga, maka setiap sekolah harus memiliki tata kelola yang spesifik berdasarkan visi dan misinya.”

Ahmad Baedowi AR

Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa

6 Guru Memegang Peran Kunci

DIREKTUR Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa, Ahmad Baedowi AR, selaku penanggap, menyatakan apa yang dipaparkan oleh para narasumber dalam diskusi kali ini semakin menegaskan bahwa intoleransi sebetulnya bukanlah problem sederhana. Ia mengaku menghadapi hal serupa secara nyata di Sekolah Sukma di Aceh.

Proses pendidikan itu, menurutnya, sebetulnya hanya ada dua hal, yaitu bagaimana mempraktikkan demokratisasi dan keterbukaan. “Ini memang abstrak sekali, tapi saya bisa berikan contoh,” katanya.

Sekolah Sukma setelah 17 tahun, jelasnya, punya siswa hampir 2.000 orang. Ketika sekolah itu mulai beroperasi pada 2006, masyarakat Aceh, khususnya yang ada di sekitar lingkungan Sukma, kalau bertemu orang asing, mereka merasa takut dan curiga. Melihat warna kulit yang berbeda saja, anak-anak sudah menilai dengan label tertentu seperti kafir dan sebagainya.

“Waktu itu saya melakukan penelitian kecil terhadap guru.

Pertanyaanya begini, “Kalau misalnya suatu ketika di Sekolah Sukma ada pengajar nonmuslim, setuju atau tidak?” Rata-rata guru di Aceh mengatakan tidak setuju. Itu pada 2006. Tapi ketika ditanya bagaimana kalau ada siswa nonmuslim, jawabannya terbalik. Mereka bilang kalau siswa boleh saja.

Baedowi menilai ada kontradiksi terkait dengan jawaban atas pertanyaannya tersebut. Dalam proses perjalanannya, kata dia, memang tidak mudah bagi nonmuslim untuk masuk Sekolah Sukma Bangsa. Keadaan itu berlangsung cukup lama dan baru pada 2011 ada siswa nonmuslim sebanyak tujuh orang. Selanjutnya terus bertambah setiap tahun, dan pada 2022 jumlah siswa nonmuslim mencapai 87 orang.

Pesan moral dari pengalaman yang terjadi di Sekolah Sukma Bangsa tersebut bahwa keberagaman adalah sebuah keniscayaan walaupun harus melalui proses yang tidak sederhana.

Problem intoleransi seperti yang dikemukakan oleh pihak Kemendikbudristek dan Setara Institute, kata Baedowi, pernah didalaminya melalui riset pada 2010. Ada kekhawatiran bahwa siswa SMA dan perguruan tinggi terpapar paham radikal, tapi tidak pernah ada riset tentang siswa SD dan SMP. Juga jarang ada riset dengan subjek bukan siswa, melainkan para guru.

Menurut Baedowi, karena sistem yang tidak baik, rata-rata guru memberikan *pressure* psikologis kepada anak-anak dengan cara diskriminatif yang luar biasa. Contohnya, anak yang tidak mau belajar disebut bandel, malas, nakal. Praktik *labeling* dan

diskriminatif seperti itu sudah dimulai dari PAUD, SD, dan SMP.

Hasil riset yang mengkhawatirkan seperti yang ditemukan Setara Institute dan Kemendikbudristek, kata dia, sebenarnya berawal atau bersumber dari perlakuan guru terhadap siswa yang selama ini kurang menjadi perhatian dan catatan. Padahal sebenarnya yang paling fundamental ialah bagaimana memperbaiki aspek guru sejak dari pendidikan tingkat dasar, dari PAUD dan SD.

Bila perlu, profesor doktor juga ikut berperan di pendidikan dasar karena mereka paham psikologi pertumbuhan anak sehingga perilaku diskriminatif dapat diminimalkan sebab siswa mendapatkan contoh yang baik dari para guru sejak dini. “Sekarang kita tes *aja* guru-guru SD dan PAUD, praktik *labeling* masih kerap terjadi, dan itu terbawa oleh anak-anak,” ungkap Baedowi.

Selain itu, imbuhnya, bagaimana menanggulangi intoleransi melalui sistem yang baik di sekolah. “Saya dengar tadi dalam paparannya, pihak Kemendikbudristek hanya menyampaikan imbauan-imbauan. Padahal dosa besar pendidikan sebenarnya ialah praktik manajemen sekolah dalam mengelola keuangan sekolah,” ujarnya.

“Pernah saya diminta KPK untuk bicara kurikulum antikorupsi. Saya mengatakan waktu itu, berdasarkan riset yang dilakukan di beberapa sekolah, sumber berbagai persoalan di sekolah itu bermula dari cara guru, kepala sekolah, dan komite dalam mengelola dana sekolah,” ungkapnya.

Persoalan tersebut tidak akan terjadi bila seluruh proses

pengelolaan sekolah dilakukan secara transparan. Misalnya, bagaimana menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS); bila antara guru dan komite sekolah saling terbuka, tidak akan ada masalah.

Mengenai *bullying*, Baedowi menilai hal itu merupakan salah satu efek dari buruknya manajemen sekolah. Hal penting yang harus dipraktikkan secara simultan, seperti yang dilakukan Sekolah Sukma Bangsa, ialah setiap sekolah harus punya struktur yang baik seperti negara.

“Kalau melihat sekolah itu sehat atau tidak, ukurannya dari strukturnya. Salah satu cara mengelola struktur agar drainase emosi bisa dikelola dengan baik sehingga tidak muncul *bullying*, kekerasan, dan saling curiga, maka setiap sekolah harus memiliki tata kelola yang spesifik berdasarkan visi dan misinya.”

Namun, perlu disadari juga bahwa tidak mungkin sekolah akan bebas dari konflik. Pasti ada konflik, apa pun bentuknya. Yang penting, sekolah memiliki struktur yang bisa mengelola konflik secara baik dan benar. “Ini perlu cara, petunjuk praktis, dan itu bisa dilakukan. Tidak sekadar mengimbuai tanpa intervensi, tapi harus secara spesifik mencari jalan keluar atau solusi terbaik,” tukasnya.

Bila pihak Kemendikbudristek menyebut ada tiga dosa besar di dunia Pendidikan, maka menurut Baedowi, persoalan besar itu harusnya menjadi bagian dari sistem yang dibangun untuk menanggulangnya. Guru harus dilatih untuk berperilaku baik



Suasana kelas di salah satu sekolah negeri di Desa Ngilgof, Pulau Kei, Maluku, beberapa waktu lalu. Untuk menghindari tumbuhnya *bullying* di lingkungan sekolah, setiap sekolah harus memiliki struktur yang bisa mengelola konflik secara baik dan benar.

dan bertanggung jawab. Itu penting agar tidak hanya menyalahkan siswa.

“Ke depan perlu ada riset tentang guru. Menurut saya, semua guru bidang studi bisa jadi intoleran, tidak hanya guru agama. Ada *unfairness* di sini.”

Selanjutnya, kata dia, anasir-anasir tentang sekolah tertentu harus bersih dari praktik manipulatif. Ketika mengelola ke-

uangan, misalnya DAU, DAK, BOS, harus bisa diatasi secara bersama-sama. Itu menjadi sumber masalah ketika ada perasaan saling curiga satu sama lain yang umumnya dipicu oleh tidak adanya transparansi.

Dalam hal melakukan transparansi, Baedowi menyebut Sekolah Sukma Bangsa selama ini telah memberikan solusi konkret. “Kita melakukan pendekatan *basket system*. Sistem ini menarik untuk dieksplorasi. Bagaimana setiap guru, kepala sekolah, pengawas, konselor, dan siswa terlibat semua untuk mendesain dan melihat kewajiban dan hak mereka di mana,” jelasnya.

Ia mengaku punya imajinasi suatu ketika nama-nama sekolah di negeri ini jangan diseragamkan seperti SMP 1, 2, 3, dan seterusnya. Nama sekolah sebaiknya dikaitkan dengan *local wisdom*, misalnya Sekolah Cut Ketapa, sehingga masyarakat punya partisipasi konkret terhadap dunia pendidikan di sekitar mereka.

Baedowi menilai nama sekolah di negeri ini sejak awal sudah diskriminatif. Misalnya, kalau SMA 1, SMP 1, pasti bagus. Negara tidak hadir di situ dalam menyebarkan aspek kualitatif bagi setiap sekolah dengan misalnya mengubah diksi atau nomenklatur.

“Ini saya kira pandangan saya terhadap materi hari ini. Saya menghargai hasil risetnya, tapi riset itu harus diperdalam lagi, bukan hanya guru agama, ya. Kebanyakan dalam diskusi hari ini yang disalahkan hanya guru agama. Jadi siapa bilang guru biologi tidak bisa diskriminatif atau guru pelajaran yang lain. Ini kan soal perilaku guru yang perlu diasah. Jadi *capacity building* guru harus

berjalan di setiap sekolah,” tandasnya.

Permasalahan tersebut, lanjut Baedowi, perlu diintervensi oleh Kemendikbudristek dengan membuat *mapping* secara tepat. *Roadmap* pengaturan psikologis guru dalam mengajar juga perlu ditetapkan sehingga menjadi lebih baik dan harus masuk kerangka sistem. “Ini kalau bisa masuk dalam RUU Sisdiknas sehingga sekolah tidak menimbulkan ketakutan-ketakutan seperti yang diutarakan dalam diskusi ini,” harapnya.

Sebagai penutup, Irwansyah, Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, menyatakan diskusi kali ini mengingatkan kita untuk melihat bahwa pendidikan itu penting dan menjadi awal dari upaya antisipasi. Namun, dalam praktiknya, pendidikan justru menjadi salah satu sektor yang diintervensi atau kontra terhadap dasar negara Pancasila dan kemudian mulai melupakan dasar-dasar tentang kebebasan, salah satunya *Bhinneka Tunggal Ika*.

Lembaga riset memiliki peran penting untuk melihat wajah pendidikan di Tanah Air, dan hasil riset hendaknya menjadi bagian untuk memberikan rekomendasi yang implementatif serta *guide line* atau panduan yang kemudian bisa diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Hal itu penting agar pemerintah punya peringkat terkait sekolah-sekolah intoleran, sekaligus menjadi bagian dari upaya penyelesaian permasalahan intoleransi di lembaga pendidikan dalam rangka menjaga keberagaman dan kebinekaan yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. ■



Peta Jalan Pendidikan Nasional

1 Latar Belakang: Beradaptasi dengan Perubahan

KONSEKUENSI dari perkembangan zaman ialah perubahan, baik perubahan teknologi, sosiokultural, maupun perubahan lingkungan. Perubahan-perubahan itu sedang terjadi secara global, ditambah lagi dengan adanya pandemi covid 19.

Seluruh perubahan tersebut tentu memengaruhi perilaku masyarakat dan kebijakan pemerintah, tidak terkecuali di bidang pendidikan.

Pandemi covid-19 telah mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat. Misalnya saja di bidang pendidikan, dengan adanya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, sekolah-sekolah di seluruh dunia harus cepat beradaptasi dengan sistem di-

gital untuk memfasilitasinya.

Visi Pendidikan Indonesia ialah membangun rakyat untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.

SDM unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Inilah yang disebut dengan ‘pelajar Pancasila’. Pengembangan SDM unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus pada kemampuan kognitif saja.

Presiden Joko Widodo menekankan beberapa hal dalam Peta Jalan Pendidikan 2035. Di antaranya, *benchmarking* sistem pendidikan pada negara yang telah berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan; membangun SDM unggul berkarakter, berakhlak mulia, dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila; menetapkan target yang terukur tentang angka partisipasi untuk pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi, serta target untuk hasil belajar berkualitas; juga mewujudkan distribusi pendidikan yang inklusif dan merata.

Reformasi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tetapi juga memerlukan dukungan komunitas pendidikan, masyarakat, pemerintah daerah, dan kemitraan swasta. Hal itu karena reformasi pendidikan bukan hanya mencakup penyesuaian kurikulum,

pedagogi, dan metode penilaian, tetapi juga terkait dengan perbaikan infrastruktur, penyediaan akses teknologi, dan dukungan pendanaan.

Peta Jalan Pendidikan bisa menjadi dokumen rencana strategis bagi pendidikan nasional, dengan semangat pembaruan memunculkan harapan lahirnya generasi baru (guru, murid, dan bangsa) yang maju. Selain itu, Peta Jalan Pendidikan menunjukkan iktikad baik sebagai lokomotif penggerak pembangunan pendidikan nasional.

Pertanyaannya, bagaimana proyeksi kebijakan pendidikan nasional ke depan? Lalu apa perubahan yang harus diupayakan untuk beradaptasi dengan kondisi kenormalan baru selama pandemi? Serta, bagaimana Peta Jalan Pendidikan Nasional dapat menjawab pencapaian target pendidikan serta indikator-indikator seperti dalam survei PISA (*Programme for International Student Assessment*).

Untuk ikut membedah masalah pendidikan yang sedang dihadapi Indonesia dan memberikan kontribusi pemikiran, Forum Diskusi Denpasar 12 bekerja sama dengan DPP Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis mengadakan diskusi bertopik Peta Jalan Pendidikan Nasional.

Diskusi diadakan pada Rabu, 29 Juli 2020, dengan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidang pendidikan. Mereka ialah Hamid Muhammad (Stafsus Kemendikbud, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud 2015-2020), H Kasiyarno (Ketua Majelis Dik-

dasmen PP Muhammadiyah), Ahmad Baedowi (Direktur Eksekutif Sekolah Sukma-Aceh), Ismail Suardi Wekke (Ketua Forum Dosen Indonesia Wilayah Papua), dan Suyoto (Ketua DPP Partai NasDem Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis). ■

“

Ilmu diberikan kepada orang yang lebih pandai, atau guru lebih aktif, tapi muridnya pasif. Sistem pendidikan seperti itu masih berjalan di negeri ini.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Terbelit Paradigma Lama

KONSTITUSI UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 amanatkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan menjamin pendidikan untuk setiap warga negara Indonesia. Tujuan dari konstitusi ialah pendidikan harus bisa membawa kemajuan dan terus bisa mengikuti perkembangan zaman.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberikan pengantar pada diskusi ini, di tengah zaman yang demikian maju, sistem pendidikan di Indonesia justru masih menggunakan paradigma lama. Sebagai contoh, ilmu diberikan kepada orang

yang lebih pandai, atau guru lebih aktif, tapi muridnya pasif. Sistem pendidikan seperti itu masih berjalan di negeri ini.

Selain itu, kata Rerie--sapaan akrab Lestari Moerdijat, ada yang hilang dalam konteks pendidikan saat ini. Bagaimana seorang guru seharusnya dapat memotivasi, mendorong, memfasilitasi, dan menemani murid bersama-sama mencari ilmu, selama ini hal tersebut tidak terjadi. Yang terjadi malah sebaliknya, seorang siswa/anak didik mencari sendiri ilmu tanpa ada pendampingan dari guru.

Peta Jalan Pendidikan, kata Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI, sesungguhnya memberi kita model pendidikan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

Oleh karena itu, saat menghadapi pandemi covid-19, mau tidak mau kita membutuhkan pemikiran-pemikiran yang mendalam. Apa yang dirumuskan dalam diskusi ini diharapkan betul-betul bisa menjawab semua permasalahan yang ada. ■



Terdapat dua prinsip utama yang menjadi landasan strategi peningkatan kualitas guru, yaitu semua guru harus mendapatkan penghasilan yang layak dan penghargaan lebih akan diberikan kepada guru dengan kompetensi yang baik atau performa yang berkualitas.”

Hamid Muhammad
 Staf Khusus Kemendikbud

3 Covid-19 Percepat Perubahan

SEJAK 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengintrodusir kebijakan Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Staf Khusus Kemendikbud yang pernah menjabat Dirjen Dikdasmen Kemendikbud 2015-2020, Hamid Muhammad, menga-

takan strategi utama kebijakan Merdeka Belajar menyangkut sejumlah hal, yaitu:

- Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antarsekolah (TK-SD-SMP-SMA, informal).
- Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah.
- Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi.
- Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian.
- Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata.
- Membangun sekolah/lingkungan belajar masa depan.
- Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan.
- Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi.
- Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia.
- Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih.

Terdapat pula dua prinsip utama yang menjadi landasan strategi peningkatan kualitas guru, yaitu semua guru harus mendapatkan penghasilan yang layak dan penghargaan lebih akan diberikan kepada guru dengan kompetensi yang baik atau performa yang berkualitas.

Menurut Hamid, pusat perubahan pendidikan ada di sekolah

sehingga manajemen anggaran pendidikan ke depannya harus dipusatkan di tingkat sekolah. Adapun penyalurannya dengan memaksimalkan anggaran pendidikan yang diberikan langsung kepada sekolah.

“Manajemen anggaran berbasis sekolah dengan meningkatkan otonomi sekolah dalam penggunaan anggaran, baik untuk SDM maupun kebutuhan operasional. Penyalurannya dilakukan transparan dengan menyediakan platform teknologi tunggal dalam pembelanjaan sekolah nontunai (*cashless*) untuk barang dan jasa yang sudah terjaga kualitasnya,” kata Hamid.

Untuk memastikan kebijakan Merdeka Belajar tetap berlanjut dan semua target akan tercapai 15 tahun ke depan, ada beberapa prinsip keberlanjutan yang diterapkan. Antara lain mencapai 20% massa yang kritis (*critical mass*) pada semua perubahan kebijakan. Contohnya, 20% sekolah akan menjadi sekolah penggerak.

Selain itu, untuk memastikan kondisi yang baik bagi sistem pendidikan beroperasi secara mandiri, mentransformasi kepemimpinan internal di dalam kementerian dan di tingkat daerah, serta merevisi berbagai peraturan perundangan (saat ini yang sedang berjalan ialah UU Sisdiknas/Sistem Pendidikan Nasional) agar para pemangku kepentingan pendidikan dapat melanjutkan kebijakan itu serta mengintegrasikan peran pihak ketiga dalam sistem pendidikan, misalnya dunia industri dan perguruan tinggi.

Menurut Hamid, perubahan struktural yang disebabkan pandemi covid-19 akan semakin mendorong percepatan pelaksanaan

beberapa inisiatif dalam Peta Jalan Pendidikan. Di antaranya membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi, juga memperbaiki kurikulum nasional dan penilaian.

Di samping itu, membangun sekolah/lingkungan belajar masa depan, memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan, mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi, serta membentuk pendidikan tinggi kelas dunia.

Proses pendidikan melibatkan manusia serta perangkat keras dan lunak. Intinya pendidikan tidak terjadi dalam ruang kosong. Pendidikan zaman sekarang dilakukan tanpa ada peran atau turut serta tokoh-tokoh di masa lalu. Oleh karena itu, rancangan program pendidikan dengan konsep Merdeka Belajar harusnya berpijak pada kondisi sekarang sebagai hasil pengalaman masa lalu.

Bagi Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, H Kasiyarno, Merdeka Belajar bukanlah sebuah konsep baru. Pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan, dahulu sudah menyuarakan bahwa anak-anak sekolah harus dimerdekakan cara berpikirnya. Kemudian Ki Hadjar Dewantara memiliki konsep pendidikan yang dimaknai sebagai penyebarluasan hidup merdeka di kalangan rakyat. Kemerdekaan itu untuk menghidupkan dan memerdekakan anak.

Jadi, kata Kasiyarno, jangan sampai konsep Merdeka Belajar yang menjadi program Kemendikbud hanya dilihat dari sisi logika dari berbagai keadaan.

Misalnya, sekarang zamannya 4.0, anak-anak diharuskan bisa



MIRAMDANI

Siswa kelas 7 menggunakan buku pelajaran sekolah elektronik dari telepon selular saat mengikuti sekolah tatap muka di SMP 245, Petukangan, Jakarta, Senin (30/8/2021). Perubahan struktural yang disebabkan pandemi covid-19 akan semakin mendorong percepatan pelaksanaan beberapa inisiatif dalam Peta Jalan Pendidikan. Di antaranya membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi, juga memperbaiki kurikulum nasional dan penilaian.

mengakses berbagai informasi melalui teknologi yang ada. Padahal pendidikan itu tidak cukup dengan *skill*, tapi memerlukan pula keahlian yang lain.

Terkait Program Organisasi Penggerak (POP), Muhammadiyah menilai banyak keanehan dalam program tersebut. Banyak penerima POP dinilai Muhammadiyah sebenarnya tidak layak. Hal itu bisa dilihat dari program-program yang mereka ajukan.

Misalnya program *Baby Methods English*. Tujuan program itu ialah meningkatkan kompetensi sekolah dan guru, tetapi bayi yang diberikan program itu. Ada juga program pelatihan presen-

tasi guru, apakah memerlukan waktu sampai satu tahun? Apakah tidak cukup dengan satu sesi atau satu bulan saja sehingga tidak memerlukan dana besar?

Masih terkait POP, kata Kasiyarno lagi, harus ada perbedaan jumlah anggaran yang diterima antara organisasi besar dan organisasi kecil. Tidak adanya perbedaan itulah yang menyebabkan mereka (Muhammadiyah) keluar dari program tersebut. Kalau hal itu jalan terus, program Peta Jalan Pendidikan dan POP tidak akan sampai pada tujuan.

Jangan sampai organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah, yang memiliki banyak lembaga pendidikan, serta PGRI yang sudah banyak berbuat dalam pembangunan pendidikan, disamakan dengan organisasi yang baru muncul. Kelihatan programnya bagus, tapi realisasinya tidak sesuai dengan harapan.

Di sisi lain, Ahmad Baedowi, Direktur Eksekutif Sekolah Sukma-Aceh, mengatakan pemerintah menetapkan empat aspek sebagai strategi dasar Merdeka Belajar, yaitu infrastruktur dan teknologi, prosedur dan pendanaan, peran serta masyarakat dan *leadership*, serta penyampaian (*delivery*).

Namun, dari keempat aspek tersebut, pada program tahun pertama Kemendikbud tidak menyebutkan program mana yang dilaksanakan terlebih dahulu. Karena itu, Baedowi mengusulkan agar pemerintah fokus terlebih dahulu pada aspek prosedur dan pendanaan.

Selama *unit cost analysis* yang digunakan Kemendikbud

melalui dana BOS adalah siswa, kata Baedowi, maka semua program yang dipaparkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan sia-sia. Sebagai contoh sekolah di Jakarta, apabila memiliki 1.000 siswa dikalikan sekian ratus ribu, maka kepala dinas terkait bermain dengan calon-calon kepala sekolah.

Oleh sebab itu, lagi-lagi Baedowi mengusulkan agar *unit cost analysis* dana BOS yang semula untuk siswa dijadikan untuk sekolah sehingga paralel dengan program-program yang dibuat Kemendikbud, seperti sekolah penggerak, POP, dll.

Soal eksistensi guru, menurut data yang ada, kata Baedowi, dahulu kondisi guru sangat memprihatinkan sehingga diadakan program sertifikasi dengan harapan kualitas guru meningkat. Akan tetapi, riset Bank Dunia secara berturut-turut mulai 2012 hingga 2015 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan guru naik, tapi inovasi dan pembelajaran guru untuk siswa tidak naik atau tidak ada perubahan. Yang naik justru kredit di Bank BRI lantaran guru bisa kredit mobil karena adanya sertifikasi tersebut. Oleh karena itu, dana sertifikasi dinilai sebagai pemborosan dan tidak berimplikasi pada kualitas guru terhadap siswa.

Persoalan POP, mengapa banyak organisasi masyarakat mundur?. Sebab, imbuhnya, Kemendikbud sepertinya tidak percaya diri, makanya menggunakan lembaga lain untuk melakukan asesmen. Lembaga independen yang digunakan memang bagus melakukan asesmen terkait ekonomi dan kemiskinan, tetapi apakah dia pernah melakukan asesmen tentang pendidikan? ■

“

Guru yang unggul
tidak akan didapatkan
apabila profesi tersebut
belum menjadi profesi
yang dibanggakan oleh
setiap orang.”

Saur Hutabarat
Wartawan senior

4 Guru Profesi Membanggakan

INDONESIA yang demikian luas dan terdiri atas pulau-pulau membawa sejumlah konsekuensi. Salah satunya di bidang pendidikan. Sejak berpuluh tahun selalu dikeluhkan adanya perbedaan kualitas dan infrastruktur pendidikan antara Jawa dan luar Jawa, khususnya di Indonesia Timur. Namun, hingga sekarang belum ada solusi komprehensif untuk memperkecil kesenjangan itu.

Ketua Forum Dosen Indonesia Wilayah Papua, Ismail Suardi Wekke, memberikan beberapa contoh akibat adanya kesenjangan kualitas dan infrastruktur pendidikan itu.

Tanpa menyebut lokasi, Ismail mengatakan ada anak yang jatuh dari atap karena mencari sinyal untuk kuliah daring. Padahal pemerintahan yang lalu sudah membuat program mobil belajar. Ada juga anak-anak terpisah dari orangtua karena tidak ada

sekolah di kampung sehingga mereka harus ke kota kecamatan. Di tempat lain ada lahan sekolah, ada gedung sekolah, tetapi tidak ada guru. Biaya pendidikan juga mahal. Ukuran UKT (uang kuliah tunggal) didasarkan pada kemampuan orangtua, padahal bisa jadi orangtua sama-sama ASN (aparatur sipil negara) tetapi beban hidup tidak sama.

Disparitas pendidikan juga masih terjadi. Masih cerita Ismail, sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta pasti akan berbeda dengan sekolah Muhammadiyah di Papua. Sebut saja, di Kampung Warmon, Sorong, Papua Barat, telah didirikan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Di sana sekolah Muhammadiyah justru menjadi sekolah orang-orang Protestan.

Tujuan pendidikan ialah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peserta didik. Namun, serentak dengan itu kita menyuburkan bimbingan belajar. Dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN), justru yang terjadi ialah kecurangan nasional. Pembelajaran daring dianjurkan, tapi listrik dan akses internet tidak ada.

Pandemi covid-19 membuka secara revolusioner banyak hal yang selama ini dianggap tidak mungkin menjadi mungkin. Semua elemen dipaksa masuk ke era teknologi dan digitalisasi, tidak terkecuali dunia pendidikan.

Suyoto, Ketua DPP Partai NasDem Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis, mengatakan untuk mempercepat proses teknologisasi dunia pendidikan maka harus dibuat *open science*, yakni membuat platform yang bisa diakses setiap guru

sesuai dengan sekolah masing-masing. Dengan demikian, akan mudah diketahui guru yang tidak menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

“Kita harus berterima kasih dengan adanya pandemi covid-19 ini sebab membuat semakin jelas buruknya sistem pendidikan di Indonesia. Baik kurikulum, tata kelola, maupun infrastruktur semakin ruwet,” kata Suyoto.

Oleh karena itu, kita kembali ke tujuan dari pendidikan yakni memperbaiki kualitas manusia dan menghadirkan masa depan yang lebih baik.

Untuk mencapai tujuan itu, kata Suyoto, harus dapat mengukur relevansi dan komposisi akan kebutuhan, sebab antara profesi dokter dan profesi sarjana agama, misalnya, pasti berbeda kebutuhannya.

Guna mencapai tujuan besar dari pendidikan, harus ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergi bisa berupa pembagian peran dan jangkauan kewenangan.

Wartawan senior yang juga anggota Dewan Redaksi Media Group, Saur Hutabarat, dalam penutupan diskusi mengatakan Peta Jalan Pendidikan justru akan menjadi buntu pada 2024. Alasannya, karena presidennya akan berganti. Hal itu dapat dibuktikan pada pelaksanaan Ujian Nasional. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ujian Nasional berjalan, tetapi di masa Presiden Joko Widodo jilid II, rencananya UN akan dihapus.

Pendidikan tinggi di masa pemerintahan pertama Presiden

Jokowi berada satu atap dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Namun, pada masa pemerintahan Jokowi jilid ke-2, memindahkan kembali pendidikan tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Itu membuktikan bahwa sejarah kebijakan di bidang pendidikan Indonesia mengalami sejarah yang terputus-putus, sejarah yang retak-retak, sehingga program pendidikan hingga 2035 itu terlalu jauh.

Saur mengusulkan agar lebih baik dipikirkan Peta Jalan Pendidikan untuk 4 tahun 2 bulan ke depan (siswa masa periode Presiden Jokowi). Kebijakan apa yang dianggap tepat untuk dilakukan selama periode itu? Misalnya Kemendikbud mengambil kebijakan makromanajemen, tetapi tidak ikut campur dalam mikromanajemen pendidikan.

Sebagai contoh, menarik kembali guru menjadi kewenangan pusat, 60% anggaran yang disalurkan ke daerah dipertajam lagi. Kemudian, persoalan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yakni lembaga perguruan tinggi yang mempersiapkan tenaga pendidik profesional (guru). Jangan gurunya saja yang dipersoalkan, sekolah yang menghasilkan gurunya pun harus dipersoalkan.

Dalam kasus POP, Kemendikbud telah menunjuk sebuah lembaga independen untuk melakukan asesmen organisasi masyarakat yang berhak menerima bantuan. Penunjukan tersebut sebenarnya kebijakan mikro dan seharusnya tidak diambil pada level kementerian. Imbasnya terjadi kekisruhan antara organisasi

masyarakat dan kementerian.

Semua perbincangan dari waktu ke waktu terkait pendidikan muaranya kepada guru. Oleh sebab itu, ada dua strategi bagaimana meningkatkan kualitas guru. Pertama, setiap orang berhak atas mutu guru yang unggul. Makanya ada pertukaran guru antara daerah satu dan daerah yang lain sehingga tercipta mutu guru yang berkualitas merata sekaligus meningkatkan pluralisme. Kedua, guru yang unggul tidak akan didapatkan apabila profesi tersebut belum menjadi profesi yang dibanggakan oleh setiap orang. Jadi pendidikan itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi guru merupakan pekerjaan yang paling didambakan oleh setiap orang.

Profesi guru yang sangat berarti di masa lalu harus kembali dipulihkan; guru sebagai profesi yang sangat terhormat di masa kini dan mendatang. ■

IV

Polemik Guru Honorer dan Tata Kelola Pendidikan Nasional



1 Latar Belakang: Status Guru dan Kesenjangan Kualitas

PERSOALAN guru honorer di Indonesia sampai saat ini belum juga terpecahkan. Begitu juga hal-hal yang terkait dengan tata kelola pendidikan nasional.

Masalah guru honorer di Indonesia meliputi beberapa hal. Di antaranya, pertama, ketidakpastian status kerja. Persisnya, guru honorer tidak memiliki kepastian status kerja yang jelas.

Mereka biasanya bekerja dengan kontrak atau tanpa kontrak, tanpa jaminan sosial dan tunjangan pensiun. Akibatnya, mereka tidak memiliki keamanan finansial yang cukup dan sulit untuk merencanakan masa depan mereka.

Kedua, upah yang rendah. Guru honorer sering kali mendapatkan upah yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan guru

yang memiliki status pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan dapat menghambat motivasi dan dedikasi mereka dalam melaksanakan tugas mengajar.

Ketiga, keterbatasan pelatihan dan pengembangan profesional. Guru honorer sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang memadai untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional. Ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam menyampaikan materi pembelajaran secara efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Keempat, keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Guru honorer sering bekerja di sekolah-sekolah yang kurang memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Hal itu pastinya dapat menghambat kualitas pembelajaran dan menyulitkan guru dalam melaksanakan tugas mengajar.

Terkait dengan tata kelola pendidikan nasional di Indonesia, juga menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, pertama, kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah. Persisnya terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan, juga di antara pulau-pulau di Indonesia. Beberapa daerah masih menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas, kualitas guru, dan fasilitas pendidikan.

Kedua, kurikulum yang terlalu padat. Kurikulum pendidikan nasional sering kali dianggap terlalu padat sehingga sulit untuk meng-cover semua materi secara mendalam. Hal itu dapat menyebabkan tekanan berlebihan pada siswa dan membatasi ruang un-

tuk pengembangan keterampilan lainnya di luar akademik.

Ketiga, keterbatasan anggaran. Meskipun anggaran pendidikan telah meningkat dari waktu ke waktu, masih ada keterbatasan anggaran yang memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kurangnya dana dapat memengaruhi fasilitas, pelatihan guru, dan program-program pendidikan lainnya.

Keempat, koordinasi di antara lembaga pendidikan. Koordinasi antarlembaga pendidikan seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan sekolah-sekolah masih perlu ditingkatkan. Hal itu penting untuk memastikan implementasi kebijakan pendidikan yang konsisten dan efektif di seluruh wilayah Tanah Air.

Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan berbagai program dan kebijakan, termasuk meningkatkan status guru honorer, juga meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Namun, harus diakui belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. ■



Kita berhadapan dengan persoalan-persoalan terkait dengan kualifikasi guru, komposisi guru, dan tuntutan mengajar. Kemudian ada lagi beberapa hal yang sifatnya nonteknis seperti kemahiran guru, khususnya di wilayah tertinggal.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Membedah Kondisi Terkini Guru Indonesia

MENGAPA Forum Diskusi Denpasar 12 merasa perlu dan penting mengangkat topik tata kelola pendidikan nasional dan polemik guru honorer secara khusus dalam diskusi kali ini? Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menjelaskan, karena posisi guru teramat penting dalam upaya melahirkan generasi cerdas bangsa.

Diskusi dan perdebatan mengenai polemik guru honorer di berbagai forum, termasuk di Komisi X DPR RI, sampai saat ini pun belum mampu melahirkan solusi konkret. Apalagi saat ini, menurut Lestari, pemerintah juga tengah berupaya merevisi Undang-Undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang terus memunculkan pro dan kontra.

Ketetapan, gagasan atau usulan dari pemerintah terkait dengan revisi UU tersebut juga masih bergeser-geser.

Dari beragam informasi dan data yang diperoleh dan dirangkum Tim Denpasar 12, ada sejumlah catatan. Antara lain, institusi pendidikan kita seperti sekolah menghadapi tantangan, apalagi sekarang kita masih berada dan berhadapan dengan pandemi covid-19.

Kita juga berhadapan dengan kondisi kualitas layanan pendidikan yang tidak baik-baik amat. Kita berhadapan dengan persoalan-persoalan terkait dengan kualifikasi guru, komposisi guru, dan tuntutan mengajar. Kemudian ada lagi beberapa hal yang sifatnya nonteknis seperti kemahiran guru, khususnya di wilayah tertinggal.

Data dari UNESCO dan Global Monitoring 2016 mencatat bahwa Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 catatan negara berkembang mengenai kualitas layanan pendidikan. Bulan November, Bank Dunia melakukan survei yang mengukur kualitas layanan pendidikan. Hasilnya, kita mendapatkan catatan-catatan yang harus kita pelajari dan tindak lanjuti.

Lestari menjelaskan, temuan utama saat ini ialah ada krisis pembelajaran siswa dan tingkat ketidakhadiran guru di kelas yang mencapai lebih dari 23%. Pun, ada temuan bahwa pengetahuan guru, materi pembelajaran, termasuk infrastruktur sekolah kurang memadai.

Persoalan sekarang yang mesti dilihat, kata Lestari, apakah



MI/SUSANTO

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memerhatikan pertanyaan anggota dewan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020). Permasalahan guru honorer masih menjadi pekerjaan rumah kementerian terkait dan pemerintah.

masalah yang dihadapi di dunia pendidikan kita berdiri sendiri atau berkorelasi dengan faktor-faktor lain? Jika ya, apakah tidak seharusnya dicermati dan dilihat secara komprehensif. Apakah ada benang merahnya dengan kondisi-kondisi terkait dengan kesejahteraan guru, kondisi tentang kepastian masa depan dan karier para guru, serta kondisi situasi guru itu sendiri.

Jika memang ada benang merahnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti kita berhadapan dengan banyak tuntutan yang harus kita dengarkan dan sebisa mungkin tentu secara objektif dicarikan jalan keluarnya, bagaimana kita mengakomodasinya.

Kita memahami bahwa Presiden Joko Widodo memunyai Visi Pendidikan Indonesia 2035, yaitu membangun rakyat agar menjadi manusia pembelajar seumur hidup, menjadi pembelajar yang unggul, dan dapat terus berkembang menjadi manusia Indonesia yang sejahtera dan berakhlak mulia dengan mengedepankan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.

Perempuan yang akrab disapa Rerie itu mengatakan visi ini sangat mulia, tetapi sungguh amat berat untuk merealisasikannya karena memerlukan para guru yang memiliki kemampuan dan dapat memaksimalkan tenaga, pikiran, daya dan upaya untuk membawa anak didik mencapai apa yang dicita-citakan.

Jika kita memberikan sepenuhnya tanggung jawab itu kepada guru, Rerie kembali mengajukan pertanyaan, “Apakah kita juga sudah memiliki tata kelola pendidikan yang membuat para guru mampu mengemban visi tersebut? Mungkinkah para guru mampu mengesampingkan berbagai masalah yang dihadapi dan sifatnya sama sekali tidak berhubungan dengan kondisi para guru sebagai seorang pendidik?”

“Inilah catatan-catatan yang menjadi pekerjaan rumah kita semua,” ungkap Rerie. ■

“

Penataan ulang sistem rekrutmen harus berbasis kebutuhan. Angkat guru honorer yang sudah lama mengajar, baik dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) maupun PNS.”

Unifah Rosidi

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia

3 Harapan agar Guru Diprioritaskan

BEGITU besar tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Apakah guru-guru kita mampu menjamahnya? Apakah jumlah guru di negeri ini sudah memadai?

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosidi menjawab bahwa sesungguhnya jumlah guru di Indonesia sudah sangat memadai. Ada sekitar 3 juta orang, dengan rasio 1:16.

Menurut Unifah, jumlah dan rasio guru dan murid seperti itu adalah sebuah kemewahan, melebihi negara-negara maju. Sidang UNESCO pada 2005 mengatakan *the quality of education can not exceed the quality of teacher* (kualitas pendidikan tidak bisa melebihi kualitas guru).

Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan umum dalam

bidang pendidikan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru.

UNESCO sebagai organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan mempromosikan peningkatan kualitas guru sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh dunia. Organisasi ini secara konsisten menggarisbawahi pentingnya pelatihan yang memadai, pengembangan profesional, dan pengakuan atas peran guru dalam mencapai pendidikan berkualitas.

Banyak penelitian dan dokumen UNESCO lainnya yang menekankan pentingnya guru yang berkualitas dalam mencapai tujuan pendidikan yang baik. Ini termasuk memastikan guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat, mendukung pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru, serta memperkuat status dan nilai profesi guru.

Dalam mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik, upaya yang komprehensif harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru, termasuk seleksi dan perekrutan yang cermat, pelatihan dan pengembangan yang efektif, dukungan dan supervisi yang tepat, serta pengakuan dan penghargaan yang memadai bagi prestasi guru.

Unifah menegaskan, pastinya kualitas pendidikan sebuah negara tidak melebihi kualitas dari gurunya. Jadi kalau kita melihat bahwa kondisi guru saat ini, seperti apa cerminan kualitas gurunya, semua itu tergantung pribadi tiap-tiap guru. Atau, ada faktor

lain yang melingkupinya?

Apa pun jawabannya, “Seharusnya guru mendapatkan prioritas tertinggi dalam upaya kita meningkatkan mutu pendidikan,” kata Unifah.

Persoalannya, apakah betul guru-guru di Indonesia telah mendapatkan prioritas di dalam *policy* kita? Ternyata tidak. Menurut Unifah, sepuluh tahun tidak ada pengangkatan guru. Perbandingan guru dan murid yang 1:16 memang tidak salah, tapi tidak berdasar sebab data itu termasuk guru-guru honorer. Kalau dibagi dengan guru yang berstatus ASN, tinggal 1.700.000. Jadi guru ASN 47,5%, sisanya 52,5% guru honorer.

Katakanlah komposisi itu masih dianggap ideal, mengapa kualitas pendidikan Indonesia terpuruk? Unifah mengatakan, apabila kita membandingkan dengan negara-negara Skandinavia, *output* pendidikan mereka bagus sekali. Sebaliknya, Indonesia tidak bagus.

Akan tetapi, kita tidak pernah membandingkan tentang *policy*-nya. Bagaimana membuat mereka bagus? Salah satu faktor yang paling penting mengapa kualitas pendidikan kita menurun ialah karena *continuing professional development* tidak berjalan. Salah satu penyebabnya, ya itu tadi, tidak ada pengangkatan guru selama 10 tahun dan *continuing professional development*.

“Kami tentu berharap jangan cuma melihat *output* gurunya tidak berkualitas, tapi lihat juga prosesnya, *policy*-nya. Ini harus diperhatikan,” tambah Unifah.



123RF

Seorang guru sedang mengajarkan peserta didiknya. Guru yang berkualitas dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik. Ini termasuk memastikan guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat, mendukung pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru, serta memperkuat status dan nilai profesi guru.

Unifah lalu mencoba menelusuri melalui Peta Jalan Pendidikan. Di sana guru bukan unsur yang diprioritaskan, tetapi hanya menjadi tempelan. Ada LPTK, tapi tidak diberdayakan. Tidak ada upaya bagaimana LPTK harus diperkuat di dalam Peta Jalan Pendidikan, padahal LPTK tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk meningkatkan kualitas guru.

Konkretnya, menurut Unifah, terjadi ‘tragedi besar’ dalam

dunia pendidikan kita. “Kemunduran pendidikan ini mengancam masa depan bangsa kita. Terjadi darurat kualitas dan kuantitas guru,” katanya.

Apa sih syaratnya guru untuk melengkapi dunia pendidikan kita? Jawabnya pasti ialah tersedianya guru, juga *continuing professional development* yang berkualitas untuk menjamin ketersediaan dan kualitas guru.

Bahwa dalam 10 tahun terakhir tidak ada pengangkatan guru, maka menurut Unifah, “Kita harus berterima kasih kepada guru honorer, terlepas dari berbagai kekurangannya. Tanpa mereka, pendidikan kita lumpuh karena tidak ada guru. Dengan segala kekurangannya, kita harus katakan bahwa mereka sangat berjasa. Setelah itu, mari kita tata bagaimana sebaiknya.”

Unifah membandingkan pendidikan kita dengan negara lain dengan *output* kebijakan, tentu tidak adil karena yang seharusnya dibandingkan ialah prosesnya.

Terkait dengan visi Presiden Jokowi menuju Indonesia maju dengan pengembangan kualitas pendidikan, sesungguhnya kita sedang dalam euforia bonus demografi. Seharusnya ini menjadi sebuah potensi kekuatan bangsa untuk melanjutkan kebijakan pendidikan berkualitas, baik secara inovatif, produktif, maupun program belajar sepanjang hayat.

Unifah memberikan contoh, tahun 1950-an Jepang mengalami bonus demografi, tapi mereka melakukan *policy* yang sangat tepat dalam pengembangan SDM. Dua puluh tahun kemudian Jepang

merasakan panen dari bonus demografi. Hal yang sama juga terjadi di Singapura, Hong Kong, dan Korea.

Unifah mengingatkan, apabila Indonesia tidak hati-hati dalam menangani pendidikan, khususnya keberadaan guru, bisa menjadi beban bangsa. Pendidikan menjadi sangat penting dalam konteks untuk menuju Indonesia maju.

Oleh karena itu, pemerintah dan DPR kemudian menata kebijakan tentang pendidikan. Kewenangan absolut ada di Kementerian Agama untuk pendidikan keagamaan dan pesantren, sementara Kemendikbudristek berwenang menangani pendidikan umum dan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Unifah, ke depan kewenangan penting sektor pendidikan harus dipegang oleh Kemendikbudristek. Ia menengarai larangan pengangkatan guru honorer menjadi awal dari persoalan membengkaknya jumlah guru honorer. “Ketiadaan kesempatan CPNS bagi guru adalah kebijakan yang diskriminatif, mengancam LPTK sebagai lembaga penghasil guru serta menyebabkan mutu pendidikan semakin menurun dan generasi muda yang akan datang tidak tertarik menjadi guru.”

Lalu bagaimana dengan tata kelola guru? “Kami mengusulkan dengan sangat hormat, keberadaan dan peran guru harus mulai ditata. Apa-apa saja yang menjadi kewenangan Kemendikbudristek. Kementerian ini harus diberi kewenangan yang jelas dan tegas bahwa pendidikan itu demi kesatuan dan persatuan yang harus diwujudkan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan

UUD 1945,” tegas Unifah.

Lalu, tata kelola guru seperti apa yang harus dibenahi? Unifah menunjuk soal sertifikasi, pembayaran TPG (tenaga pendidik guru), standardisasi rekrutmen, dan standardisasi pembinaan profesi guru. LPTK harus difasilitasi untuk dikerjasamakan dengan pemerintah daerah guna mengetahui kebutuhan guru di daerah. LPTK harus betul-betul diperkuat untuk mempersiapkan guru kredensial.

Unifah menambahkan, penataan ulang sistem rekrutmen harus berbasis kebutuhan. Angkat guru honorer yang sudah lama mengajar, baik dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) maupun PNS. “Kami memohon agar ada revisi UU tentang ASN untuk memberikan ruang bagi para guru honorer agar menjadi PNS, PPPK, dan memberikan ruang kepada mereka yang sudah begitu lama berdedikasi sebagai guru, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil.” ■



Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lebih adaptif dengan digitalisasi pendidikan sehingga manusia Indonesia bisa menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global.”

Eduart Wolok

Rektor Universitas Negeri Gorontalo

4 Solusi Digitalisasi Pendidikan

GURU besar Surya University, Yohannes Surya, berpendapat bahwa kesenjangan kualitas guru dan distribusi guru menjadi masalah yang dihadapi bangsa ini.

Digitalisasi pendidikan memang menjadi salah satu solusi, tapi permasalahannya, menurut Surya, di mana dan bagaimana strategi untuk mengaplikasikannya?

Pandemi covid-19 memang bisa mempercepat solusi. Diakui atau tidak, pandemi membawa sisi positif karena bisa mempercepat digitalisasi pendidikan.

Surya mengajak bangsa ini membayangkan sedang belajar dari guru yang hebat. Dari guru-guru tersebut, kualitas kita meningkat. Oleh sebab itu, sungguh ideal jika pelatihan yang

diberikan kepada para guru ialah yang mengarah ke TOT (*training of trainers*). Setelah itu guru yang sudah terlatih, kembali melatih guru yang lain dengan pengawasan yang ketat.

Metode seperti itu, jelas Surya, dilakukan di beberapa negara, dan berhasil. Ke depan diharapkan profesor-profesor yang hebat nantinya membuat materi-materi pelatihan yang bisa dipelajari dan dipraktikkan oleh para guru.

“Dengan begitu, para siswa bisa belajar langsung dari guru hebat. Guru-guru yang lain sebagai fasilitator sambil belajar dan memperbaiki diri menjadi guru hebat. Proses seperti ini harus dilakukan secara kontinu sehingga terjadi proses yang sangat menarik,” kata Surya.

Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan pembelajaran digital? Satu di antaranya, menurut Surya, pemerintah harus membuat *smart system*. Untuk langkah awal, pemerintah bisa menyiapkan ruang belajar yang baik. “Kita harapkan, lewat platform dan ekosistem yang baik, kompetensi guru akan meningkat berkelanjutan,” imbuh Surya.

Honor Rp500.000 Per Bulan

Namun, sebaik apa pun rencana dan konsep tentang upaya meningkatkan kualitas guru, tetap akan memunculkan masalah jika hal-hal mendasar yang dialami para guru belum dipecahkan secara konkret.

Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Eduart Wolok, kembali

menyoroti soal guru honorer. Dia memaklumi mengapa sekolah memerlukan guru honorer. Sebab, kata Eduart, keberadaan mereka memang diperlukan oleh sekolah.

Pasalnya, menurut dia, kita tidak pernah berada pada kondisi di mana semua sekolah telah tersedia guru yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pengangkatan guru honorer di daerah ditetapkan dengan SK gubernur, bupati atau wali kota, atau dengan SK kepala dinas dan SK kepala sekolah.

Dari cara pengangkatan itu, imbuh Eduart, sudah muncul gambaran bahwa para guru honorer sudah diperlakukan berbeda-beda, sementara mereka dituntut harus memiliki kualitas yang sama dengan guru-guru lain. Akan tetapi, apa yang mereka dapatkan (imbalan) berbeda. Guru yang ditetapkan dengan SK gubernur mendapatkan insentif sampai dengan Rp2,2 juta per bulan. Akan tetapi, jumlah mereka yang mendapat insentif sebesar itu tidak banyak karena gubernur hanya membawahkan guru-guru setingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Adapun guru honorer SD dan SMP, yang paling banyak dimiliki oleh bupati dan wali kota, kisaran gajinya kurang lebih Rp1 juta. Bahkan ada guru honorer yang diangkat dengan SK kepala sekolah yang digaji dengan dana dari BOS di kisaran Rp500.000 per bulan. Ironisnya, ada guru honorer yang menerima honor per tiga atau enam bulan. Padahal mereka menjalankan tugas setiap hari.

Pada umumnya guru honorer yang direkrut menjadi tenaga

pengajar berkualifikasi sarjana sebagaimana diamanahkan dalam UU Guru dan Dosen. Kemendagri juga sudah mengeluarkan ketentuan pmda tidak boleh membayar, memberikan honor untuk guru-guru honorer dengan kualifikasi pendidikan di bawah sarjana.

Namun, fakta di lapangan, dari 1,8 juta guru honorer, menurut Eduart, banyak yang berkualifikasi ahli madya. Ini menjadi problematika tersendiri ketika akan memindahkan mereka ke dalam kategori PPPK.

Itu artinya, di persyaratan awal, mereka sudah tidak memenuhi persyaratan, tetapi di sisi lain jasa mereka dibutuhkan demi memenuhi ketersediaan tenaga guru yang selama ini memang kurang.

Bahkan, pada sekolah-sekolah tertentu masih terdapat guru honorer mengasuh mata pelajaran yang tidak berkesesuaian dengan bidangnya. Misalnya, guru bahasa Indonesia mengajar mata pelajaran olahraga. Ini dimungkinkan karena di sekolah tersebut tidak tersedia guru pelajaran olahraga, dan itu berlangsung bertahun-tahun.

Guru-guru honorer seperti ini, ketika akan direkrut di dalam PPPK, pasti tidak akan lolos. Di sisi lain, kontribusinya tetap dibutuhkan oleh sekolah. Guru honorer bahkan sering diberi peran dan tanggung jawab secara penuh oleh guru PNS untuk menggantikannya di dalam kelas.

Fakta lain, masih menurut Eduart, pada sekolah tertentu ter-

dapat beberapa guru PNS yang telah berusia di atas 50 tahun, tetapi tidak lagi meng-*update* pengetahuan dan keterampilannya. Guru honorerlah yang akhirnya menggantikan posisi guru yang tidak meng-*update* pengetahuan dan keterampilan tersebut.

Mengapa? Karena guru honorer relatif berusia muda dan cepat beradaptasi. Guru-guru honorer juga berkontribusi bagus kalau sekolah ikut ambil bagian dalam lomba atau kompetisi-kompetisi. Kepala sekolah selalu melibatkan guru honorer sebagai pelatih dan pendamping siswa saat mengikuti lomba.

Solusi yang selama ini dilakukan pemerintah dalam pengangkatan guru honorer ialah dengan melibatkan Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenpan-RB. Persoalan muncul sebab formasi PNS tidak ada untuk guru-guru honorer.

Eduart mengatakan, sampai saat ini kita juga belum memiliki informasi satu pintu terkait dengan kebutuhan guru lima tahun ke depan. Idealnya, berapa ketersediaan guru harus dikelola dengan baik, bukan tiba-tiba keluar angka sekian banyak yang sebenarnya tidak berdasarkan data ketersediaan dan kebutuhan.

Eduart juga menganggap penting perlunya pendidikan berbasis komunitas yang partisipatif. Di tingkat desa, misalnya, pendidikan berbasis komunitas bisa memanfaatkan dana desa untuk proses belajar mengajar.

Menurut Eduart, banyak komunitas di masyarakat yang mulai dan sudah bergerak dalam mengembangkan sumber daya manusia, misalnya Gerakan Indonesia Mengajar, 1.000 guru, dan Kelas

Inspirasi Musawarna. Mereka adalah komunitas-komunitas milenial yang merekrut secara partisipatif relawan untuk mengajar di lokasi-lokasi terpencil.

“Apakah ini akan kita biarkan sebagai gerakan-gerakan parsial atau kita akan optimalkan menjadi gerakan partisipatif warga, terutama generasi milenial yang peduli terhadap pendidikan kita?” kata Eduart.

Di luar itu, tambah Eduart, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lebih adaptif dengan digitalisasi pendidikan sehingga manusia Indonesia bisa menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global.

“Tetapi yang tidak kalah penting, nilai-nilai Pancasila harus kita tanamkan dan kembangkan di dunia pendidikan kita. Jangan sampai era digitalisasi pendidikan justru akan menghasilkan SDM unggul, tetapi jauh dari jati diri kita sebagai pelajar Pancasila,” tukas Eduart. ■

“

Guru bukan sumber pengetahuan. Guru itu fasilitator untuk menyatukan semuanya.

Kalau guru tidak dianggap sebagai sumber pengetahuan, dia justru akan banyak belajar. Kalau dia banyak belajar, akan banyak dampaknya.”

Butet Manurung
Pemerhati pendidikan

5 Kegagalan Menyusun Kurikulum

DIREKTUR Eksekutif Sekolah Sukma Bangsa, Ahmad Baedowi AR, mengatakan polemik guru honorer di Indonesia bukan masalah baru. Ketika kita membicarakan soal guru, pasti muncul kasus guru honorer. Itu adalah fakta yang turun-temurun, seperti ada pembiaran.

Baedowi setuju dengan argumentasi yang disampaikan oleh PGRI bahwa dalam melihat soal nasib dan masa depan guru serta pendidikan di negeri ini, yang harus dikomparasi ialah proses *policy*-nya.

Memberikan contoh, Baedowi mengatakan, dalam mendesain awal UU Sisdiknas, sebenarnya kita tidak setuju jika Kementerian Agama mengadopsi undang-undang ini. Hal itu karena karakter

madrasah dengan sekolah umum berbeda. Artinya, ketika Kementerian Agama mengadopsi kurikulumnya sama dengan Kemendikbud, maka madrasah kehilangan ciri khasnya. Saat itu pengelola madrasah seperti berlomba-lomba agar kualitasnya sama dengan sekolah-sekolah umum.

Ada pula guru lulusan IAIN syariah mengajar biologi. Ya, seperti ada yang dipaksakan, padahal karakter sekolah madrasah benar-benar berbeda.

Mengutip sebuah buku, Baedowi mengatakan sekolah pesantren dan madrasah sangat islami. Dalam menentukan kurikulum, “Seharusnya pemerintah tidak mengikuti pola pikir kolonial yang ingin menyamakan semua. Itu kegagalan pertama, menyamakan pendidikan di madrasah dengan sekolah umum.”

Keruwetan lain di dunia pendidikan kita ialah ketika terjadi reformasi dan munculnya UU Otonomi Daerah. Sejak itulah pertama kali munculnya sumber keruwetan soal tatanan pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Baedowi menambahkan, masalah kemudian diperkeruh lagi dengan munculnya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Apabila kita membaca pasal-pasal 20-an di UU tersebut, “Semakin kelihatan tata kelolanya parah. Hampir semua *item* di pasal-pasal itu tidak jelas sebetulnya kewenangan pendidikan di mana.”

Terkait dengan guru honorer, menurut Baedowi, sebetulnya hanya terletak pada masalah kebijakan karena pengangkatannya

dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota, bahkan kepala sekolah, sementara pusat pembinaannya tidak dipegang oleh Kemendikbud. Implikasi dari UU Guru dan Dosen, Kemendagri pun ikut mengatur urusan pendidikan.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, menurut Baedowi, DPR dengan lima kementerian terkait (Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, Kemenpan-RB, dan Kementerian Keuangan) harus duduk bersama untuk mengidentifikasi tupoksi mereka berbasis RPJMN.

“Undang-Undang ASN harus dipotong untuk mengatakan bahwa guru khususnya mendidik/mengajar. Jadi kalau guru dan dosen tidak bisa disebut sebagai aparatur sipil negara (ASN), mereka harus punya nama sendiri. Jadi tidak perlu lagi pakai nama-nama ASN sehingga tidak mengganggu tata kelola pembinaan pendidikan yang berkelanjutan,” tutur Baedowi.

Ia menegaskan, DPR dengan kementerian terkait harus membedah dan merevisi UU ASN, UU Guru dan Dosen, dan UU Otonomi Daerah. “Bila perlu, Presiden harus mengambil alih persoalan ini.”

Tanggung jawab atau tugas Kemendikbud terkait dengan guru harus fokus, dari mulai pengangkatan, pemberhentian, distribusi, hingga peningkatan kapasitas guru dengan memberikan pelatihan.

Setelah mengelola tata kelola kebijakan pendidikan, baru kita masuk ke isu-isu lain, misalnya kapasitas guru. “Saya meli-

hat Peta Jalan Pendidikan Nasional ini seperti mengulang-ulang saja. Menginginkan sesuatu yang baru, tetapi bermainnya di luar sistem. Padahal kita punya LPTK yang harus lebih dikembangkan dan dimodifikasi,” saran Baedowi.

Menyinggung soal kurikulum, Baedowi mengatakan, kurikulum sebaiknya hanya mengatur prinsip-prinsip dasar. Pengembangan kurikulumnya kita serahkan kepada sekolah supaya para siswa, guru, dan kepala sekolah menjadi lebih kreatif.

Tantangan Lokal Guru Pedalaman

Pemerhati pendidikan, Butet Manurung, sependapat dengan Ahmad Baedowi bahwa masalah PNS dan pegawai honorer (termasuk guru) sudah lama. Bahkan, kata Butet, sudah muncul setelah Perang Dunia I 1918.

Mengapa? Karena para pegawai negeri dan guru tidak mau dipecat atau kehilangan kontrak pekerjaan. “Mereka khawatir tidak punya pekerjaan lagi setelah perang dunia,” ujar Butet.

Sejarah mencatat, banyak negara yang tidak peduli dengan status para PNS dan guru. Di Australia, guru-guru tidak punya status permanen sebagai guru. Guru disebut pegawai dengan kontrak panjang. Di Amerika Serikat, setelah PD I, jumlah pegawai permanen yang tadinya 94%, malah menurun menjadi 60%. Sementara itu, di Prancis, Malaysia, dan Argentina, malah 100% permanen. Maklum, karena tiap-tiap negara punya ukuran sendiri.

Berdasarkan sejarah itu, Butet menyimpulkan bahwa perma-



M/SUSANTO

Seorang guru membantu merapihkan seragam anak muridnya saat memberikan pengajaran kepada anak-anak di SD YPK Ifar Babrongko, Kampung Yoboi, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (4/10/2021). Guru honorer masih menjadi andalan di daerah pedalaman, tapi sayangnya mereka dibayar dengan sangat rendah. Padahal tugas mereka mendidik anak bangsa.

nen atau tidaknya profesi seorang guru tidak berkorelasi dengan maju atau hebatnya sebuah negara dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, menurut Butet, guru honorer lebih kuat konteks lokalnya. Dalam artian, mereka lebih lentur dan tidak kaku dalam bertugas karena kebanyakan orang lokal.

Butet Manurung adalah seorang guru dan memimpin komunitas bernama Sokola Rimba. Di hutan ia mengajar anak-anak yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal.

Butet mengungkapkan, dari jumlah penduduk di Indonesia,

26% di antaranya tinggal di hutan dan di sekitar hutan. Sokola Rimba menjangkau daerah-daerah terpencil. “Kami sudah menjangkau 15 ribuan orang di 17 lokasi selama 20 tahun terakhir.”

Sebanyak 1,3 juta warga masyarakat Indonesia, kata Butet, tidak punya sekolah. Yang buta huruf bahkan mencapai 3 jutaan. Bisa dimaklumi, sebab di pedalaman tidak ada sekolah. Ada pula di antara mereka yang menolak sekolah karena sekolah formal tidak cocok dengan budaya mereka.

Butet berpendapat kurikulum kitalah yang menjadi penyebab porak-porandanya pendidikan di Indonesia. Guru-guru sendiri banyak yang kebingungan. Apabila mengikuti kurikulum nasional, lalu sistem pendidikan seperti apa yang bisa diterapkan di daerah?

Di daerah pedalaman, jelas Butet, kehidupan manusia diatur oleh musim. Diatur oleh alam. Tidak seperti kita yang tinggal di kota, dari Januari sampai Desember sama saja. Dari pukul 08.00 hingga 17.00. Tapi kalau masyarakat di pedalaman ada beragam musim. Di rimba bahkan ada musim berburu babi selama tiga bulan. Ada musim mengambil madu di pohon, dan itu memerlukan perjalanan yang cukup lama. Petani dan nelayan melakukan pekerjaan juga berdasarkan musim, sementara pendidikan formal waktunya tetap.

Di Papua, kalau aturan sekolahnya kaku, maka muridnya setelah sekolah selesai tidak bisa berburu lagi, tidak bisa memangkur sagu lagi karena setiap hari memangkur sagu yang pa-

ling baik itu ialah dari pagi hingga siang, atau pukul 06.00 sampai pukul 12.00.

Guru-guru honorer, menurut Butet, sebenarnya cukup diberikan semacam tambahan kompetensi saja agar bisa membantu menguatkan potensi-potensi lokal di pedalaman.

“Kalau pendidikan kita hanya ditujukan untuk mengejar PISA, nantinya kita akan kehilangan potensi-potensi daerah karena PISA itu, kan hanya untuk mengejar ketertinggalan global, sementara tantangan pendidikan di pedalaman adalah tantangan lokal,” jelas Butet.

Apabila di pedalaman banyak kelapa, kakao, dan kayu manis, tetapi di sekolah belajar logaritma, lalu apa manfaatnya buat warga pedalaman?

Butet mengibaratkan kurikulum nasional kita seperti resep kue, semua orang akan jadi seragam keahliannya. Padahal, geografis kita saja ada yang terdiri atas lautan, juga ada pegunungan.

Menurut Butet, masyarakat yang tinggal di hutan punya potensi yang sangat luar biasa. “Tetapi pendidikan kita tidak punya ruang bagi guru untuk kreatif menciptakan anak-anak pedalaman yang kuat,” ujar Butet.

Apabila ada yang bilang murid-murid harus belajar dari guru yang hebat, menurut Butet, pengalaman di pedalaman justru terbalik. Guru yang hebat harus belajar dari muridnya. Guru yang diutus ke pedalaman sebaiknya tidak didatangkan dari luar

yang tidak punya pengetahuan apa-apa tentang kearifan lokal. Bagaimana seorang guru datang ke tengah hutan Mentawai, sementara dia tidak tahu bagaimana mengobati warga yang terkena bisa kobra, sedangkan murid-muridnya tahu caranya yakni daun apa yang dipakai untuk mengobati luka orang yang digigit ular kobra.

Butet tidak bisa membayangkan bagaimana kalau ada guru dari luar yang mengajar, lalu ada muridnya yang digigit ular kobra, dan saat temannya spontan menolong dengan ramuan daun, sang guru malah marah dan melarang pengobatan dengan cara apa yang dilihatnya kemudian mengajak ke rumah sakit.

Oleh sebab itu, Butet memberikan masukan, standar kompetensi guru sebaiknya disesuaikan dengan mekanisme rekrutmen yang lebih kontekstual. “Kalau gurunya di daerah, rekrutmennya jangan seragam. Misalnya kalau merekrut guru untuk Papua, jangan sama dengan guru yang akan ditempatkan di Jakarta.”

Guru honorer atau guru PNS, tambah Butet, seharusnya diberi kemampuan untuk menganalisis situasi tempat dia berada dan kemudian kemampuan untuk memberdayakan ekosistem pendidikan di daerahnya, termasuk Komite Sekolah, aspek sosial, dan lingkungan. Potensi dan masalah harus menjadi satu kesatuan untuk dijadikan kurikulum.

Menurut Butet, guru bukan sumber pengetahuan. Guru itu fasilitator untuk menyatukan semuanya. Kalau guru tidak dianggap sebagai sumber pengetahuan, dia justru akan banyak belajar.

Kalau dia banyak belajar, akan banyak dampaknya. Guru yang baik belajar dari muridnya. Ini maksudnya guru harus mengenali betul karakter muridnya.

Guru Honorer yang Menjadi Tumpuan

Jurnalis senior *Kompas*, Yovita Arika, mengungkapkan pemerintah merencanakan untuk merekrut 1 juta guru PPPK. Salah satu tujuannya ialah mengisi kekosongan guru. Saat ini ada sekitar 1,2 juta guru PNS. Guru sebanyak itu belum mencukupi untuk ditugaskan di sekolah-sekolah negeri.

Mengacu pada data Kemendikbudristek, kebutuhan guru PNS saat ini sekitar 2,2 juta orang. Kalau melihat realitas ini, menurut Yovita, pendidikan kita bertumpu pada guru honorer. Dari sekian banyak guru di Indonesia, 36%-nya adalah guru honorer. Jumlah yang tidak sedikit untuk kondisi pendidikan Indonesia saat ini.

Diakui atau tidak, mereka tidak memiliki standar dan kualifikasi yang sama saat mengikuti perekrutan, walaupun kita tidak menampik bahwa banyak atau ada guru honorer yang punya kualitas bagus. Mereka juga punya kemampuan bagus dalam menyampaikan pelajaran, tidak kalah dengan guru-guru PNS yang sudah punya status tetap.

Sayangnya, dalam hal kesejahteraan, tidak ada standar yang sama. Ada guru honorer yang digaji hanya Rp200 ribu-Rp300 ribu, sementara mereka punya tanggung jawab pendidikan yang sama dengan guru-guru lain.



123RF

Para siswa menyimak penjelasan yang disampaikan oleh guru mereka. Mengacu pada data Kemendikbudristek, kebutuhan guru PNS saat ini sekitar 2,2 juta orang. Pendidikan kita bertumpu pada guru honorer. Dari sekian banyak guru di Indonesia, 36%-nya adalah guru honorer. Jumlah yang tidak sedikit untuk kondisi pendidikan Indonesia saat ini.

Apakah perekrutan guru honorer menjadi berstatus PNS bisa mengurangi atau mengatasi permasalahan? Tampaknya tidak semudah itu.

Yovita mengatakan, kalau kita lihat terkait dengan guru PPPK atau pegawai PPPK, meski pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menjamin bahwa guru PPPK yang akan direkrut nanti akan dibayar oleh pemerintah pusat, di sisi lain ada Peraturan Presiden Nomor 98/2020 yang mengatur tentang gaji dan tunjangan guru PPPK. Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa gaji dan tun-

jangan PPPK yang bekerja di instansi daerah dibebankan kepada APBD.

Persoalan seperti itulah yang selama ini menjadi kendala untuk penetapan sekitar 34 guru PPPK yang sudah lolos saat perekrutan tahun 2019. Disebutkan bahwa gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada APBD. Mungkin ada keraguan dari pemerintah daerah karena di satu sisi masih ada perpres yang mengatakan ditanggung pemerintah pusat.

Yovita menjelaskan, pemerintah memberi kesempatan kepada semua guru honorer yang ada di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk mendaftar sebagai guru PPPK. Pemerintah juga memberi kesempatan hingga tiga kali kepada guru honorer untuk mengikuti perekrutan. Kalau tahap pertama tidak lolos, bisa ikut tahap berikutnya sampai tiga kali.

Akan tetapi, kalau kita melihat ke belakang lagi bagaimana para guru honorer itu direkrut, tidak ada standar yang sama dan tergantung daerah masing-masing, bahkan tiap-tiap sekolah yang merekrut.

“Di satu sisi, saya melihat memang ada peluang. Tapi kemungkinan ada juga guru honorer yang tidak lulus meskipun sudah mengikuti tiga kali kesempatan. Nah, bagaimana penanganan mereka selanjutnya? Sampai sekarang ini belum ada solusi,” ungkap Yovita.

Pemerintah hanya mengatakan bahwa mereka akan diberi kesempatan sampai posisi mereka terisi oleh guru ASN. Artinya,

tidak secara langsung bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi para guru honorer.

Senada dengan para pembicara terdahulu, Yovita mengakui guru honorer menjadi andalan, tapi mereka dibayar dengan sangat rendah. Padahal tugas mereka mendidik anak bangsa.

Dilatarbelakangi permasalahan-permasalahan di atas, Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus, Rusnoto, menegaskan bahwa persoalan guru dan tenaga honorer harus dituntaskan, khususnya para guru yang sudah lama mengabdikan, terutama yang berorientasi menjadi PNS.

Guru honorer sebenarnya sudah melakukan akselerasi, khususnya untuk peningkatan studi dan lain-lain. Namun, hal itu belum mendapat apresiasi dari berbagai lembaga terkait.

Menutup diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat mengutip berita, Senin, 11 Januari 2021, mengenai sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang melakukan unjuk rasa ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka mengatakan bahwa lebih berharga toilet daripada guru honorer karena pemda membangun 488 toilet sekolah di Kabupaten Bekasi dengan biaya Rp96,8 miliar alias satu toilet seharga Rp196 juta.

Bupati pernah menjanjikan honor (guru) naik dari Rp1,8 juta ditambah Rp1 juta. Namun, yang terjadi ialah pembangunan toilet. “Jadi, marilah kita membangun masa depan bangsa melalui toilet, bukan melalui guru,” kata Saur bernada satire.

Saur menjelaskan fakta itu perlu disampaikan karena dari semua pembicaraan dalam forum diskusi, muncul pernyataan pendek sebagai nomenklatur horor, tercecce, pengantirian.

Keruwetan tata kelola ini, kata Saur, memang harus dibereskan dengan ‘menyembelih’, bukan hanya membedah perundang-undangan, bahkan sampai tingkat peraturan pemerintah. *Omnibus law* di bidang pendidikan adalah ide yang cemerlang.

Saur juga menganggap penting ke depan pilkada tidak lagi langsung karena selama ini selalu membawa implikasi buruk. Otonomi yang berlebihan juga membawa implikasi buruk, termasuk di sektor pendidikan.

“Kalau sebuah negara tidak mampu menyelesaikan persoalan guru honorer yang berlangsung puluhan tahun, itu menunjukkan buruknya manajemen berbangsa dan bernegara,” katanya.

Menurut Saur, soal guru honorer, kini tinggal dua pilihan, diseleksi dan kemudian diangkat. Ini sebenarnya yang harus segera diselesaikan jika kita ingin mengambil keputusan. ■



V



**Mempersiapkan
Generasi Penerus
Menuju Indonesia 2045**

1 Latar Belakang: Mengurai Benang Kusut Putus Sekolah

UNDANG-UNDANG Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003 menginisiasi lahirnya program wajib belajar. Pasal 34 UU itu menyebutkan, “Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar (1). Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (2). Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (3).”

Untuk mewujudkan program wajib belajar, pada 3 November 2014 Presiden Joko Widodo meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tujuan membuka kesempatan sebesar-besarnya

bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan sejak dini.

Program wajib belajar 12 tahun dari SD, SMP, hingga SMA dirintis sejak 2012. Namun, untuk tahap awal, baru wajib belajar 9 tahun bagi tingkat SD dan SMP. Kemudian program itu menjadi penuh sampai tingkat SMA pada 2016.

Meski program wajib belajar 12 tahun sudah berlangsung cukup lama, angka putus sekolah masih saja tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, terdapat satu perseribu (1/1.000) siswa putus sekolah di jenjang SD, lalu 10 dari 1.000 siswa putus sekolah di jenjang SMP, dan 12 dari 1.000 siswa yang putus sekolah di tingkat SMA.

Hal itu diperparah dengan jumlah anak-anak yang tidak terdaftar di tingkat SD, SMP, dan SMA sesuai dengan rentang usia masing-masing.

Banyak pertanyaan yang muncul mengenai fenomena putus sekolah. Misalnya, apakah akar masalah putus sekolah? Bagaimanakah sistem identifikasi anak-anak yang putus sekolah? Mengapa program wajib belajar belum mampu menghilangkan angka putus sekolah? Apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka putus sekolah?

Forum Diskusi Denpasar 12 mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dalam diskusi yang diselenggarakan pada Rabu, 7 Juni 2023, dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten. ■



Sudah semestinya negara mengoptimalkan semua sumber daya untuk mempersiapkan secara maksimal terwujudnya generasi yang cerdas, juga membuka ruang pembelajaran seluas mungkin bagi seluruh anak bangsa.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Sekolah sebagai Pusat Kemajuan

ANGKA putus sekolah kian merisaukan. Laporan BPS terakhir menunjukkan bahwa angka putus sekolah kembali meningkat pada 2022, padahal sebenarnya sudah mengalami tren penurunan beberapa waktu sebelumnya. Kondisi ini terjadi di seluruh jenjang pendidikan dari SD sampai SMA.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, risau dengan keadaan tersebut. Apalagi ketika pandemi covid-19 melanda dunia, bangsa ini kehilangan sebuah masa yang cukup krusial jika berbicara perihal anak usia sekolah.

Ketika membuka diskusi tersebut, Lestari mengatakan pandemi covid-19 yang menyebar pada 2020, 2021, dan mulai normal pada 2022 membuat kita harus menyatukan langkah menata ber-



MUBARY FATHAILAH

Seorang anak sedang mengamen mencari uang di pertigaan lampu merah Margonda, Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Laporan BPS terakhir menunjukkan bahwa angka putus sekolah kembali meningkat pada 2022, padahal sebenarnya sudah mengalami tren penurunan beberapa waktu sebelumnya.

sama mengatasi masalah yang dihadapi anak usia sekolah.

Peningkatan angka putus sekolah akibat pandemi maupun karena disrupsi menunjukkan bahwa bangsa ini tidak siap menghadapi situasi krisis dan ketidakpastian global serta belum mampu melewatinya dengan *smooth*.

Selain itu, imbuhan perempuan yang biasa disapa Rerie itu, fenomena putus sekolah tidak boleh dianggap remeh karena sekolah—apalagi berbicara Indonesia Emas 2045—adalah tempat menemba generasi penerus yang nantinya menerima tongkat estafet bangsa ini. Merekalah yang akan mewujudkan tujuan bernegara

Indonesia adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi UUD 1945. Intinya sekolah adalah pusat untuk memajukan bangsa ini.

Oleh karena itu, sudah semestinya negara mengoptimalkan semua sumber daya untuk mempersiapkan secara maksimal terwujudnya generasi yang cerdas, juga membuka ruang pembelajaran seluas mungkin bagi seluruh anak bangsa.

Fenomena putus sekolah yang terjadi di Indonesia, kata Rerie, disebabkan oleh berbagai faktor. Yang agak mencemaskan, survei menunjukkan ada ketidakinginan individu melanjutkan sekolah karena beban belajar yang terlampau berat, selain faktor kemalasan hingga finansial keluarga dan lingkungan.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI berharap seluruh elemen, para pemangku kepentingan, pemerhati pendidikan, keluarga, komunitas, pemerintah, memiliki kesadaran dan pemikiran yang sama bahwa pendidikan nasional harus menjadi perhatian semua pihak.

Sejatinya, kata Rerie, dibutuhkan *political will* dan dukungan dari semua pihak untuk mengurangi angka putus sekolah. Para pengambil keputusan, pemilik kewenangan dan kekuasaan harus melakukan intervensi dengan berbagai cara yang mampu mencegah penambahan angka putus sekolah.

“Mudah-mudahan forum ini bisa membukakan mata seluruh hadirin dan bersama-sama merapatkan barisan untuk mengatasi masalah putus sekolah ini,” kata Rerie. ■

“

Penuntasan wajib belajar 12 tahun bernilai strategis terutama untuk menciptakan kelompok masyarakat berpendidikan menengah ke atas sebagai basis sosial dalam membangun masyarakat demokratis, toleran, dan inklusif.”

Ratih Megasari Singkaru
Anggota Komisi X DPR RI

3 Libatkan Publik sejak Perencanaan

MESKI program wajib belajar 12 tahun dimulai sejak 2016, ternyata hingga sekarang masih banyak anak putus sekolah. Menurut anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkaru, banyak faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah.

Penyebab anak putus sekolah di antaranya karena lemahnya ekonomi keluarga sehingga orangtua memaksa anak turut membantu keluarga mencari nafkah di usia yang sebenarnya anak harus sekolah.

Ratih menyebut contoh di daerah pilihannya (Sulawesi Barat). Kalau bertemu anak-anak dan ditanya alasan putus sekolah, mereka menjawab karena ikut orangtua. Kebanyakan anak

petani dan nelayan. Mereka ke kebun atau melaut membantu ekonomi keluarga.

Hal lain yang mendorong anak putus sekolah ialah daya tampung yang tidak memadai. Ratih menyebut daya tampung SMA/SMK negeri hanya 50% lulusan SMP.

Karena itu, kehadiran sekolah swasta sangat membantu menyerap lulusan SMP. Akan tetapi, sekolah swasta memiliki tantangan tersendiri terkait dengan biaya.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa pandemi covid-19, tambah legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Barat itu, juga menimbulkan beberapa masalah. Ada siswa yang tidak kebagian kuota penerimaan atau daya tampung di sekolah negeri di wilayah domisilinya. Dalam mengatasi itu, beberapa provinsi melakukan kerja sama dengan sekolah swasta untuk menampung siswa dengan berbagai kemudahan.

Namun, di masa PSBB itu, banyak keluarga mengalami pengetatan ekonomi dengan akibat pendapatan keluarga berkurang. Padahal, sekolah swasta tetap memerlukan biaya yang harus ditanggung siswa.

Faktor geografis juga memicu anak putus sekolah. Beberapa wilayah memiliki kepadatan penduduk rendah, domisili penduduk terpencar. Ini menjadi tantangan dan kesulitan tersendiri baik bagi pemerintah maupun anak untuk melanjutkan pendidikan.

Jika tidak ada sekolah di wilayah terdekat, konsekuensinya

ada biaya transportasi yang harus disiapkan orangtua ataupun siswa. Jika sekolah dibangun di wilayah seperti itu, tantangannya ialah belum tentu ada guru. Terkadang pemerintah daerah juga tidak memiliki anggaran untuk pengalokasian guru.

Di masa pandemi covid-19, pemerintah menyiapkan sekolah jarak jauh, dan untuk itu butuh gadget. Tetapi si anak dan orangtua tidak memiliki alat pendukung itu sehingga akhirnya tidak bisa juga melanjutkan sekolah.

Penyebab lain dari anak putus sekolah, kata Ratih lagi, ialah rendahnya kesadaran orangtua mengenai wajib sekolah bagi anak-anak. Ada juga anak putus sekolah karena terpaksa nikah muda atau hamil di luar nikah, faktor *bullying* di sekolah, bahkan yang mungkin agak menyeramkan belakangan ini ialah kecanduan bermain gim.

Apa dampak dari putus sekolah ini? Apakah degradasi moral? Apakah bertindak kriminal? Apakah hidup tidak layak dan sulit keluar dari jaringan kemiskinan?

Tanpa bermaksud menggeneralisasi, Ratih mengatakan, sering muncul berita entah di TV atau medsos tentang kenakalan ataupun kejahatan remaja, khususnya kriminalitas yang dilakukan anak-anak yang memang sebagian besar putus sekolah.

Pertanyaannya, kenapa wajib belajar belum berhasil? Menurut Ratih, sekarang hampir semua SMA negeri sudah gratis, tapi daya tampungnya bagaimana? Kalau ke sekolah swasta, kembali lagi harus ada biaya ekstra.

Sebetulnya, kata Ratih, pemerintah belum sanggup menerapkan wajib belajar 12 tahun. Mayoritas anggaran pendidikan di pemerintahan daerah dialokasikan untuk gaji guru dan hanya menyisakan sedikit untuk membenahi ataupun mengembangkan aktivitas pendidikan, baik untuk kebutuhan sarana prasarana maupun akses. Di sisi lain, masyarakat juga belum berpartisipasi dalam menerapkan wajib belajar 12 tahun.

Ratih berharap data kependudukan dan data peserta didik semakin terintegrasi sehingga pemerintah dapat dengan cepat dan mudah mengidentifikasi anak yang rentan tidak bisa melanjutkan sekolah. Dengan identifikasi tersebut, pemberian bantuan finansial dan lainnya dapat mencegah anak meninggalkan bangku sekolah.

Selain itu, Ratih pun berharap adanya antisipasi penegak hukum terkait dengan anak-anak yang diduga putus sekolah yang lebih banyak menghabiskan waktu nongkrong bersama kelompok berisiko melakukan tindak kejahatan dan kenakalan. Perlu pendekatan dan pengawasan supaya mereka bisa melanjutkan pendidikan melalui pilihan alternatif yang mungkin mereka sanggup menjalaninya.

Perlu pula memantau pelaksanaan program yang sudah berjalan yang berkontribusi langsung untuk penanganan anak putus sekolah. Misalnya bantuan Kemendikbud melalui PIP serta Kementerian Sosial melalui PKH (Program Keluarga Harapan). Program-program itu sangat membantu anak melanjutkan pen-

didikan.

Seluruh pemangku kepentingan di daerah diharapkan mendukung, memfasilitasi, juga mengoordinasikan keterlibatan masyarakat dalam seluruh fase perencanaan serta pelaksanaan strategi penanganan anak putus sekolah di daerah masing-masing.

Penuntasan wajib belajar 12 tahun, kata Ratih, bernilai strategis terutama untuk menciptakan kelompok masyarakat berpendidikan menengah ke atas sebagai basis sosial dalam membangun masyarakat demokratis, toleran, dan inklusif. Ini juga sangat berguna untuk menyiapkan penduduk usia produktif masuk ke masa transisi jenjang pendidikan tinggi atau masuk ke pasar kerja.

Saat ini banyak anak dan mungkin juga orangtua yang bertanya kenapa harus sekolah tinggi-tinggi setelah melihat *youtuber influencer* atau sejenis itu dengan *job* yang tidak membutuhkan ijazah.

Orangtua, kata Ratih, harus dapat menjawab secara tepat pertanyaan seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling penting ialah lingkungan keluarga. Ratih mengingatkan para orangtua agar selalu *men-support* anak-anak mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan. ■

“

Jika mandat mencerdaskan bangsa tidak dilaksanakan oleh dunia pendidikan, jangan salahkan jika teknologi kemudian menjadi faktor yang memengaruhi cara pandang anak-anak.”

Halili Hasan

Direktur Eksekutif Setara Institute

4 Mimpi Menjadi Kaya tanpa Sekolah

MELIHAT pendidikan sebagai instrumen investasi masa depan belum menjadi cara pandang kebanyakan masyarakat Indonesia. Justru masyarakat Indonesia berpandangan bahwa pendidikan tidak memberikan dampak bagi kehidupan yang lebih baik.

Menurut Halili Hasan, Direktur Eksekutif Setara Institute, pemahaman seperti itu justru diperkuat dengan pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, bahwa pendidikan tidak menjamin masa depan atau keahlian apa pun. Pernyataan itu mendegradasi peran pendidikan dan menimbulkan pesimisme tentang pendidikan.

Jika mengamati fenomena sosial, ternyata perubahan di seki-

tar kita antara lain dipengaruhi oleh teknologi telepon. Kecanggihan teknologi membuat masyarakat menganggap pendidikan berada di nomor sekian. Apalagi, kata Halili, banyak orang yang memamerkan kekayaan itu tanpa mempunyai rekam akademik yang tinggi. Fenomena *youtuber* yang tidak perlu sekolah tapi kaya raya memengaruhi masyarakat.

Kondisi tersebut bisa mendorong masyarakat tidak lagi melihat pendidikan sebagai instrumen penting. Anak-anak muda pun akhirnya bermimpi menjadi kaya tanpa harus menempuh rute ideal yakni pendidikan.

Bangsa ini membutuhkan pendidikan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika mandat mencerdaskan bangsa tidak dilaksanakan oleh dunia pendidikan, jangan salahkan jika teknologi kemudian menjadi faktor yang memengaruhi cara pandang anak-anak.

Hal lain yang memengaruhi dunia pendidikan ialah konservatisme beragama. Di banyak tempat, tambah Halili, konservatisme beragama bisa membuat anak-anak menjadi malas sekolah. Dengan cara pandang bahwa ‘rezeki sudah ada yang atur’, bagi kaum konservatif tidak terlalu penting membuat anak-anak menjadi literal.

Persoalan pendidikan, kata Halili lagi, jangan semata diteropong dari Jakarta. Harus ada pendekatan *bottom up* dan partisipasi. Jadi jangan membayangkan bahwa apa yang menjadi kebijakan Jakarta, pasti berjalan mulus di daerah. Tidak seindah itu.

Penyimpangan program KIP (Kartu Indonesia Pintar) dengan transfer dana serta deviasinya, misalnya, mengandung pesan bahwa hendaklah melihat persoalan lokal dengan kacamata lokal sehingga lebih presisi.

Soal kualitas guru juga sangat penting. Guru-guru, kata Halili, harus melihat sesuatu yang *inspiring* dari pendidikan sehingga mereka tidak meninggalkan pendidikan. ■



Pendidikan harus dibuat relevan dan bermakna sehingga peserta didik tidak hanya sekolah, tetapi ketika sekolah juga mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi kehidupan mereka.”

Anindito Aditomo

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek

5 Kurikulum Merdeka dan Bingkai Indonesia

SEJAK sekitar tahun 2000, bangsa ini sebenarnya sudah meningkatkan angka partisipasi sekolah secara sangat signifikan. Untuk SD dan sederajat sudah mendekati 100%. Untuk SMP dan sederajat sudah 96%. Memang jenjang SMA dan sederajat menjadi PR karena masih 73,15%, sedangkan 20 tahun lalu sekitar 50% .

Jadi, kata Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek, bangsa Indonesia boleh berbangga karena selama beberapa dekade terakhir berhasil menciptakan kesempatan pendidikan bagi anak-anak di seluruh wilayah Tanah Air.

Salah satu program yang terus digencarkan untuk memperke-

cil angka putus sekolah ialah Program Indonesia Pintar (PIP). PIP, tambah Anindito, merupakan jaring pengaman yang sangat luar biasa untuk negara seperti Indonesia yang *resources*-nya belum sekelas negara maju.

Pendidikan, kata Anindito, harus dibuat relevan dan bermakna sehingga peserta didik tidak hanya sekolah, tetapi ketika sekolah juga mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi kehidupan mereka.

Jadi kalau orangtua tidak melihat manfaat yang diperoleh anaknya ketika sekolah, tentu mereka menghitung *cost benefit* atau *opportunity cost*-nya. Jika sekolah 3 tahun, tidak bisa ikut bekerja mencari nafkah mendukung ekonomi keluarga, dan yang diperoleh setelah 3 tahun itu hanya selembar kertas yang tidak menambah nilai yang relevan meningkatkan harkat ekonomi keluarga, maka pilihan yang rasional bagi orangtua ialah tidak menyekolahkan anaknya. Dalam konteks itu orangtua tidak bisa disalahkan.

Dengan demikian, kualitas kesempatan belajar harus diperbaiki sehingga ketika lulus anak-anak memiliki keterampilan, kecakapan, dan karakter seperti gotong royong, daya nalar, kecakapan, kreatif, toleransi, dan kemampuan bekerja. Jika sejumlah kecakapan itu dimiliki, orangtua akan memilih menyekolahkan anak mereka karena yakin anak-anak punya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik setelah lulus.

Melalui PIP, kata Anindito, pemerintah berupaya meningkat-



M/PIUS ERLANGGA

Siswa Sekolah Dasar Negeri Kapuk Muara 01 bergotong royong memindahkan meja, kursi, dan lemari kedalam ruang kelas saat kegiatan kerja bakti bersama, Jakarta, Senin (6/1/2019). Kualitas kesempatan belajar harus diperbaiki sehingga ketika lulus anak-anak memiliki keterampilan, kecakapan, dan karakter seperti gotong royong, daya nalar, kecakapan, kreatif, toleransi, dan kemampuan bekerja.

kan akses untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Pemerintah ingin agar semua anak yang sudah masuk ke sekolah mendapatkan kesempatan belajar yang bermakna dan berkualitas. Kemendikbudristek ingin agar sekolah menjadi kesempatan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang mewujudkan menjadi akhlak mulia.

Pendidikan tentu merupakan tanggung jawab bersama tanpa

berpretensi bahwa persoalan pendidikan bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Jika mencermati postur APBN, jelas Anindito, memang betul anggaran pendidikan ialah 20% dari APBN, tetapi yang dikelola Kemendikbudristek sangat kecil. Dengan jumlah itu tidak mungkin Kemendikbudristek bisa mengatasi berbagai persoalan pendidikan tanpa partisipasi masyarakat. Karena itu, sekarang banyak program pemerintah yang menarik dana masyarakat melalui *matching fund*.

Kemendikbudristek juga mengubah kurikulum dengan tujuan menyasar pengembangan karakter. Kurikulum 2013 sangat padat materi akademik sehingga pengembangan karakter seperti gotong royong, toleransi, dan nasionalisme sulit dilakukan karena guru kehabisan waktu mengajarkan materi wajib. Kurikulum 2013 pun diubah menjadi Kurikulum Merdeka dengan muatan pengembangan karakter dalam bingkai Indonesia. ■



Ketidaksiapan sekolah inklusi dan guru-guru menangani anak disabilitas dengan baik bisa berakibat anak-anak tersebut tidak mau melanjutkan pendidikan sehingga menambah tingginya angka putus sekolah.”

Jejen Musfah

Wakil Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia

6 Gratiskan juga Sekolah Swasta

MASALAH pendidikan di Indonesia termasuk putus sekolah bersumber dari kemiskinan. Anak-anak yang sekolah gratis di negeri, bukan tidak mengeluarkan biaya.

Dalam variabel sekolah ada biaya transportasi, buku tulis, seragam yang belum di-cover program pemerintah. Apalagi semakin tinggi jenjang, biaya pun semakin besar. Mereka yang tidak diterima di sekolah negeri tidak bisa ke swasta karena mahal, kemudian berhenti sekolah.

Wakil Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) yang juga Pemimpin Redaksi Majalah *Suara Guru*, Jejen Musfah, mengatakan solusi yang tepat dari gejala putus se-



MISUSANTO

Siswa memperoleh buku-buku pelajaran yang dipinjamkan dari pihak sekolah saat daftar ulang di SMP Negeri 4, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (12/7/2023). Masih banyak siswa dari keluarga tidak mampu yang harus membayar kebutuhan sekolahnya, seperti buku dan seragam. Tidak sedikit juga yang akhirnya harus putus sekolah akibat tidak mampu membayar segala kebutuhan tersebut.

kolah ialah pemerintah harus tegas bahwa sekolah gratis tidak hanya negeri, tetapi juga swasta. Artinya ada jaminan dari negara bahwa anak-anak dari keluarga miskin yang sekolah di swasta biayanya ditanggung negara. Karena faktanya jumlah sekolah negeri tidak lebih banyak daripada sekolah swasta.

Putus sekolah juga bersumber pada *mindset*. Era sekarang ditandai dengan kehadiran *youtuber-youtuber* kaya yang kemudian bisa membuat asumsi masyarakat bahwa sekolah menjadi

nomor sekian. Hal itu ditambah dengan banyak orangtua yang belum yakin betul bahwa pendidikan adalah investasi masa depan.

Di daerah-daerah perkampungan, di pulau-pulau, kata Jejen, masih terjadi pernikahan dini. Itu juga menjadi faktor pemutus pendidikan. Artinya putus sekolah terkait pula dengan kualitas keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat harus mengawasi hidup anak-anak serta cara mereka bergaul.

Regulasi juga berpotensi memberikan kontribusi atas putus sekolah. Misalnya soal zonasi. Jumlah sekolah negeri belum cukup sehingga tidak semua anak dalam jarak domisili sesuai zonasi bisa ditampung di sekolah negeri terdekat. Sebagian anak harus keluar dari zonasi untuk mencari sekolah negeri dengan konsekuensi biaya.

Zonasi bisa menjadi jawaban bagi pemerataan kapasitas intelektual siswa, tapi tidak menjawab soal pemerataan sekolah gratis. Zonasi tepat, tetapi perlu dipertimbangkan memberi bantuan kepada sekolah swasta yang siswa-siswinya berkategori miskin.

Akhir akhir ini, kata Jejen, ada rumor bahwa siswa yang ketahuan merokok KIP-nya akan ditahan. Ini bukan solusi tepat, justru berisiko menambah angka putus sekolah.

Angka putus sekolah bisa juga bersumber dari sekolah inklusi untuk anak disabilitas. Jumlah sekolah inklusi tidak sebanding dengan jumlah anak disabilitas. Saat ini, sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang menerima anak disabilitas dengan varian beragam.

Diakui Jejen, tidak mudah menyelenggarakan sekolah inklusi. Kesulitan utamanya ialah kesiapan guru sebab mereka bukan lulusan sarjana untuk sekolah luar biasa, yakni sarjana yang punya *background* pendidikan untuk anak disabilitas. Ketidaksiapan sekolah inklusi dan guru-guru menangani anak disabilitas dengan baik bisa berakibat anak-anak tersebut tidak mau melanjutkan pendidikan sehingga menambah tingginya angka putus sekolah.

Jejen menyarankan agar aparat desa diajak bekerja sama mengawasi dunia pendidikan supaya tidak terjadi anak putus sekolah di desa. Kementerian Dalam Negeri, dalam memberikan penghargaan kepada kepala desa, diharapkan perlu memasukkan kategori rendahnya angka putus sekolah di desa tersebut.

Kebijakan pendidikan khususnya terkait dengan wajib belajar seperti ini anomali. Di satu sisi terdapat sejumlah program yang diarahkan agar siswa dapat terus sekolah, tapi di sisi lain angka putus sekolah masih tetap tinggi.

Karena itu, tambah Jejen, perlu ada *monitoring*, pengawasan yang benar-benar terhadap semua program dan kebijakan yang ada. Setelah itu dilakukan evaluasi tentang kelemahan dari implementasi kebijakan tersebut untuk diperbaiki ke depannya. ■



Flexing kekayaan dari orang-orang yang rekam akademiknya tidak cukup memadai seperti youtuber bisa memengaruhi anak-anak mempertanyakan kembali esensi sekolah.”

Indrastuti

Wartawati bidang pendidikan
Harian *Media Indonesia*

7

Mengubah Mindset

FAKTOR sosial ekonomi termasuk kemiskinan memang dari dulu menjadi salah satu yang menyebabkan anak putus sekolah, meski sekarang sudah ada bantuan pemerintah berbentuk BLT (bantuan langsung tunai), PIP, KIP, dan sebagainya.

Putus sekolah, kata Indrastuti, wartawati bidang pendidikan Harian *Media Indonesia*, tentu berbeda alasannya untuk tiap daerah. Jadi, peran tiap-tiap daerah untuk menekan angka putus sekolah sangat bergantung pada faktor penyebab lokal.

Di sisi lain, tidak bisa ditampik bahwa *flexing* kekayaan dari orang-orang yang rekam akademiknya tidak cukup memadai seperti *youtuber* bisa memengaruhi anak-anak mempertanyakan kembali esensi sekolah.

Seluruh pemangku kepentingan, kata Indrastuti, harus mendorong perubahan *mindset* yang beranggapan bahwa tanpa sekolah seseorang bisa berhasil. Masyarakat harus diyakinkan bahwa tidak sekolah atau tidak perlu sekolah dan nanti bisa membuat konten *Youtube*, memang tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar.

“PR kita banyak dan tentu butuh dukungan banyak pihak. Perubahan *mindset* ini yang perlu kita lakukan,” katanya.

Para orangtua yang menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan tinggi, tetapi akhirnya anak itu tidak bekerja, juga menjadi promosi yang mencemaskan bagi orangtua lain. Namun, sebagai pembuka jalan, tidak dimungkiri bahwa pendidikan harus terus didorong. Para remaja harus diyakinkan bahwa sekolah adalah jalan menuju masa depan.

Menurut Indrastuti, kalau ada keinginan untuk sekolah dari anak dan juga ada dukungan orangtua, pemerintah akan membantu agar lebih banyak lagi anak yang bersekolah. Ini yang diharapkan agar bonus demografi 2045 tidak sia-sia.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memajukan dunia pendidikan. Itu tidak bisa dibantah. Bukti paling kuat ialah anggaran pendidikan 20% dari APBN.

Namun, menurut Ahmad Baedowi AR, Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa, perlu diteliti struktur anggaran pendidikan apakah sehat atau tidak. Kalau anggaran pendidikan tidak sehat, bagaimana berharap tujuan pendidikan bisa berhasil?

Isu pendidikan, kata Baedowi, selalu masuk diskursus politik. Ini agak membahayakan. Munculnya terminologi sekolah gratis itu seakan pemerintah nomor satu. Kalau tidak ada pemerintah, rakyat tidak bisa sekolah. Ini persepsi yang keliru. Bahwa pemerintah punya andil, iya, punya tanggung jawab, iya, tetapi harus ditegaskan bahwa tidak ada sekolah yang gratis.

Menurut Baedowi, sekarang dipolitisasi seakan-akan pemerintah hebat, DPR hebat, karena sekolah gratis. Isu sekolah gratis menjadi jualan di pemilu, seolah jika seseorang terpilih, pendidikan akan gratis. Itu *bullshit*.

Masyarakat diajarkan untuk melihat pendidikan hanya dari sisi BOS, PIP, dan KIP. Itu semua standar rata-rata dan hanya untuk kebutuhan proses belajar mengajar. Tetapi daya dukung dari masyarakat tidak pernah dihitung. Misalnya, biaya makan anak tidak dihitung, biaya transpor anak dari dan ke sekolah juga tidak dihitung.

“Kita tidak adil karena tidak menghitung kontribusi masyarakat terhadap pendidikan terutama dilihat dari pendapatan orangtua. Berapa persen dari penghasilan satu bulan untuk membiayai pendidikan? Itu harusnya dihitung dalam skema APBD atau APBN,” kata Baedowi.

Fakta itu jangan ditutup sehingga muncul anggapan pendidikan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Untuk menekan angka putus sekolah, kata Baedowi, harus dibuka ruang agar orang belajar tidak harus di sekolah klasik.

Kalau masyarakat misalnya mau memilih model hanya dua atau tiga kali pertemuan dalam satu pekan, tapi ada *community teacher* yang disediakan pemerintah dan anaknya bisa dites setiap bulan, itu juga harus mendapatkan pengakuan dari otoritas pendidikan.

Cara belajar seperti itu harus lebih diperbanyak. Akan tetapi, di Indonesia sekolah masih diartikan sebagai lembaga, padahal yang paling penting itu ialah proses.

Susan dari Yayasan Sukma sebagai peserta aktif diskusi tersebut mengatakan pihaknya banyak memberikan keringanan kepada anak putus sekolah yang belajar di Sekolah Sukma Bangsa.

Para guru Sekolah Sukma Bangsa, kata Susan, membantu sejumlah anak dengan menyisihkan sebagian gaji mereka. Anak-anak itu tidak diterima di sekolah negeri, dan akhirnya para guru berinisiatif membantu mereka.

“Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Pemerintah daerah mestinya juga melihat bagaimana anak-anak bisa sekolah dengan baik, kemudian membantu mereka mendapatkan sekolah yang dekat dengan rumah. Kalau itu dilakukan, akan mengurangi angka putus sekolah,” kata Susan.

Menurunkan angka putus sekolah memerlukan komitmen dan langkah bersama seluruh pihak. Harus ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sinergi lintas sektor pemerintahan, proaktif pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat. ■

VI

Kesetaraan dan Inklusi RUU Sistem Pendidikan Nasional

1

Latar Belakang: Kompleksitas UU Pendidikan

SAAT ini ada sejumlah undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara khusus mengatur mengenai guru, dosen, dan pendidikan tinggi.

Terkait dengan guru, dosen, dan pendidikan tinggi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Realitas itu menyebabkan adanya aturan yang beririsan di antara ketiga undang-undang tersebut sehingga fakta di lapangan upaya menerapkan ketiga undang-undang tersebut malah menghadapi kesulitan.

Di luar itu masih ada pendidikan pesantren yang telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Diakui atau tidak, salah satu masalah pendidikan di Indonesia terkait dengan banyaknya undang-undang ialah kompleksitas dan tumpang tindihnya regulasi yang berlaku.

Dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur pendidikan di tingkat nasional maupun daerah sering kali terjadi ketidakharmonisan di antara undang-undang tersebut. Hal inilah yang menyebabkan munculnya kebingungan dan kesulitan bagi lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan yang harus dijalankan.

Selain itu, proses pembuatan undang-undang di Indonesia juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketika ada perubahan akan kebutuhan atau tuntutan dalam sistem pendidikan, proses penyusunan dan pengesahan undang-undang baru sering kali tidak bisa segera dilakukan.

Kenyataan itu mengakibatkan kebijakan dan kurikulum pendidikan kerap kali tertinggal dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Selain kompleksitas dan kecepatan perubahan regulasi, implementasi undang-undang pendidikan juga menjadi tantangan tersendiri. Sering kali bahkan, meskipun ada undang-undang yang baik dan progresif, pelaksanaannya di lapangan bisa kurang efektif karena kurangnya pemahaman, sumber daya yang terbatas, atau masalah tata kelola yang tidak efisien.

Hal inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara daerah yang satu dengan yang lain.

Dalam beberapa kasus, undang-undang yang mengatur soal pendidikan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan tantangan pendidikan saat ini. Perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang cepat dapat membuat regulasi yang sudah ada menjadi usang atau tidak lagi relevan.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang berkala dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan undang-undang pendidikan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat mengatasi masalah aktual.

Dilatarbelakangi persoalan-persoalan itulah, Forum Diskusi Denpasar 12 menganggap penting pengaturan terkait pendidikan dikembalikan dalam satu sistem pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Pemerintah sendiri menyatakan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang sudah disiapkan memiliki prinsip inklusi dan kesetaraan.

Prinsip inklusi dan kesetaraan dalam RUU Sisdiknas disebut

memberikan pengakuan guru kepada para pendidik di pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan, dan pondok pesantren. RUU Sisdiknas juga mendorong terwujudnya kesetaraan, baik bagi guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun yang non-ASN.

Nantinya, jaminan penghasilan layak bagi guru berstatus ASN, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), akan mengikuti aturan dalam UU ASN.

RUU Sisdiknas juga diharapkan membuat tata kelola pendidikan yang lebih inklusif bagi kelompok penyandang disabilitas sehingga pelibatan publik menjadi lebih luas sesuai dengan kepedulian berbagai dan beragam elemen bangsa yang *concern* dengan masa depan pendidikan nasional di negeri ini. ■



Pendidikan inklusi harus melihat dan memperhatikan bahwa semua murid dan semua anak pada dasarnya adalah spesial. Semua memiliki kelebihan. Semua memiliki kesempatan dan diberi ruang untuk menjadi manusia pembelajar.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Kawal RUU Sisdiknas dengan Saksama

MENYAMPAIKAN pengantar diskusi, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mencoba melihat kembali ke dunia pendidikan inklusi yang mulai atau banyak dibicarakan secara khusus oleh banyak kalangan pada 1994.

Ketika itu, UNESCO di Spanyol mengadakan sebuah pertemuan dengan berbagai kalangan dan bersepakat bahwa pendidikan inklusi menjadi sebuah gol besar yang diharapkan bisa membuat dunia menjadi lebih manusiawi, lebih adil, dan lebih beradab.

Sesungguhnya kesepakatan itu sama dengan apa yang diciptakan oleh para *founding father* kita. Sebelum kemerdekaan, para tokoh bangsa telah bersepakat bahwa Indonesia harus menjadi rumah bagi semua anak bangsa dan mampu memberikan

kesempatan kepada mereka untuk menjadi cerdas. Pendidikan harus mampu menyiapkan anak bangsa menjadi generasi cerdas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lestari Moerdijat menyinggung Pasal 31 UUD 1945 yang dengan jelas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. “Itu tentu berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Dari sinilah mengapa kita sekarang harus betul-betul mulai memikirkan bagaimana pendidikan inklusi masuk dalam kerangka cetak biru pendidikan di Indonesia.

RUU Sisdiknas kini banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Ada banyak usulan, termasuk dari pemerintah, sehingga menganggap penting mengajukan RUU tersebut.

Lestari berpendapat, ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk bersama-sama mengawal dan memperhatikan RUU tersebut dengan saksama agar semua kepentingan dapat diakomodasi. Dengan demikian, apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa, juga kita, dapat terwujud.

Ia mengingatkan mengenai salah satu pesan penting dalam sebuah laporan yang disampaikan oleh UNESCO bahwa kemanusiaan membutuhkan solidaritas global yang setara dan inklusif agar dapat berkolaborasi membangun infrastruktur pendidikan abad ke-21.

Pertanyaannya sekarang ialah apakah kita mampu meletakkan dasar-dasar tersebut dalam kerangka berpikir kita demi pen-



MIRAMDANI

Para murid SDN 05 Petukangan Jakarta mengikuti kegiatan belajar mengajar di luar ruang kelas dengan mengunjungi kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Museum Nasional di Jakarta, Selasa (31/1/2023). Belajar tidak boleh dibatasi sekadar meningkatkan kompetensi peserta didik, tetapi juga harus merupakan sebuah proses yang dapat mendorong peserta didik untuk memiliki kemampuan berinovasi, kreatif, berpikir kritis, dan memiliki kepekaan akan realitas sosial, serta memahami dan mengaplikasikan berbagai keterampilan penunjang lain yang memang diminati pelajar.

didikan kita ke depan? “Ini adalah salah satu pekerjaan rumah kita yang harus menjadi pikiran kita semua dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk mewujudkannya,” tegas Lestari.

Pengaturan yang terkait dengan pendidikan nasional, masih menurut Lestari, seharusnya berpatokan pada amanat UUD 1945. Prinsip inklusi dan kesetaraan di dunia pendidikan mesti ditanamkan sebagaimana dinyatakan oleh pemerintah dalam

berbagai kesempatan.

Mewujudkan pendidikan di Indonesia ke depan, disebut Lestari, harus dilakukan secara holistik. Proses belajar atau *learning to become* menjadi sesuatu yang penting.

Belajar tidak boleh dibatasi sekadar meningkatkan kompetensi peserta didik, tetapi juga harus merupakan sebuah proses yang dapat mendorong peserta didik untuk memiliki kemampuan berinovasi, kreatif, berpikir kritis, dan memiliki kepekaan akan realitas sosial, serta memahami dan mengaplikasikan berbagai keterampilan penunjang lain yang memang diminati pelajar.

Lestari menegaskan, pendidikan inklusi harus melihat dan memperhatikan bahwa semua murid dan semua anak pada dasarnya adalah spesial. Semua memiliki kelebihan. Semua memiliki kesempatan dan diberi ruang untuk menjadi manusia pembelajar.

Ia berharap apa yang dibicarakan dan dikupas dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dapat menggugah kita untuk memahami pendidikan inklusi bahwa hak asasi manusia haruslah diterapkan sepenuhnya di semua sektor, termasuk di dunia pendidikan.

Kita harus mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang kita hadapi saat ini dan kemudian menilik apakah aturan perundangan dan aturan-aturan pendukung lainnya yang selama ini ada, termasuk di dalamnya aturan-aturan pelaksanaannya, sudah ideal? ■

“

Hilangnya UU Guru dan Dosen akibat dari pembuatan RUU omnibus di sektor pendidikan ini justru menghilangkan landasan mereka sebagai sebuah profesi yang sebelumnya diakui oleh undang-undang.”

Ratih Megasari Singkaru
Anggota Komisi X DPR RI

3 Kesetaraan yang Masih Berupa Angan-Angan

SETELAH membaca draf RUU Sisdiknas yang diajukan pemerintah, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkaru, menyimpulkan ada beberapa perubahan yang memiliki sisi positif. Ia memberikan contoh adanya pengakuan untuk pendidik di PAUD sebagai guru formal dan adanya program pendidikan kesetaraan bagi mereka.

RUU Sisdiknas juga memberikan jaminan kesejahteraan bagi guru walaupun tidak secara eksplisit disebutkan misalnya mengenai pemutihan status guru yang belum melakukan sertifikasi. Diatur pula tentang tunjangan guru yang tetap diberikan.

Ada juga pasal yang berdampak positif pada perbaikan tata kelola yang lebih inklusif bagi kelompok disabilitas dan kelompok

rentan.

Ratih tidak menutup mata ada tekanan publik yang mendesak DPR agar menunda pembahasan RUU ini. “Saya melihat ada dorongan dari berbagai pihak untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita ini yang sebelumnya sempat diusulkan dalam Prolegnas Perubahan 2022,” katanya.

Ia mengatakan, seharusnya desakan-desakan itu tidak dipandang sebagai bentuk antiperubahan atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Peristiwa-peristiwa ini, menurut Ratih, justru patut disyukuri karena itu menjadi bukti meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan.

Beberapa alasan penolakan masyarakat terhadap RUU Sisdiknas, berdasarkan kesimpulan Ratih, meliputi, pertama, ketidakjelasan terkait dengan masalah tunjangan bagi para guru. Sampai saat ini masalah tersebut juga masih jadi bahan perdebatan di DPR. “Kita sempat rapat dengar pendapat umum dengan guru-guru dari perkumpulan PGRI. Mereka juga mempermasalahkan soal tunjangan bagi para guru ke depan akan seperti apa,” ujar Ratih.

Kedua, beberapa rancangan pasal dalam RUU Sisdiknas dianggap merendahkan martabat guru dan dosen. Menurut Ratih, ada hal-hal yang disimpulkan para guru sebagai merendahkan martabat mereka sebagai guru dan juga dosen.

Ketiga, pasal-pasal terkait dengan lembaga akreditasi mandiri (LAM) untuk perguruan tinggi yang dianggap berorientasi bisnis

semata sehingga memberatkan perguruan tinggi, khususnya swasta. Akreditasi ini dapat berdampak pada pembebanan biaya kepada mahasiswa.

Tentang hal tersebut, Ratih mengungkapkan, Komisi X DPR pernah mengadakan kunjungan spesifik ke Universitas Pamulang untuk bertemu dengan para rektor dari universitas-universitas yang berdekatan dengan Universitas Pamulang. Para rektor pun mengatakan hal yang sama bahwa LAM ditengarai hanya berorientasi bisnis.

Keempat, adanya pandangan bahwa RUU Sisdiknas terlalu liberal. Kelima, muncul persepsi publik bahwa penyusunan draf RUU Sisdiknas tidak transparan dan partisipatif. Para *stakeholder* dunia pendidikan merasa tidak pernah dilibatkan dalam mempersiapkan RUU Sisdiknas sehingga muncul praduga bahwa pemerintah tidak transparan dalam menyusun draf RUU.

Terkait dengan itu, menurut Ratih, DPR telah meminta Kemendikbudristek untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada para *stakeholder* dunia pendidikan agar mereka bisa memberikan aspirasi atau masukan seluas-luasnya. Jadi tidak ada yang merasa ditinggalkan.

Ratih menilai semangat kesetaraan dan juga inklusivitas yang diusung oleh Kemendikbudristek dalam draf RUU ini justru malah jadi kabur. Ia memberikan contoh, niat menyetarakan guru agar bisa mendapatkan tunjangan tanpa menunggu antrean sertifikasi justru malah mendapatkan penolakan karena pengaturan tun-

jangan dalam RUU tidak eksplisit, tapi masih bergantung pada peraturan peralihan.

Niat menyejahterakan guru sekolah swasta atau guru non-ASN, termasuk dosen, justru dianggap merendahkan martabat mereka karena menyetarakan dengan karyawan biasa.

Hilangnya UU Guru dan Dosen akibat dari pembuatan RUU omnibus di sektor pendidikan ini, disebut Ratih, justru menghilangkan landasan mereka sebagai sebuah profesi yang sebelumnya diakui oleh undang-undang.

Kesetaraan dan inklusivitas di dunia pendidikan, menurut Ratih, tidak sedikit yang masih sekadar menjadi angan-angan, terutama di daerah-daerah pedalaman, khususnya di wilayah terpencil. Bahkan di kota besar pun ketidaksetaraan tersebut masih dirasakan.

Ratih menambahkan, jika kita bandingkan bagaimana kondisi sekolah negeri dan sekolah swasta, misalnya dari segi fasilitas dan kesejahteraan guru-gurunya, juga masih sangat berbeda jauh. “Ini kita belum bicara masalah tidak tercapainya kesetaraan kondisi siswa dengan latar belakang sosial ekonomi mereka yang juga sangat berbeda-beda.”

Di daerah masih banyak masalah atau PR yang tersisa dalam menjadikan pendidikan di sana bisa setara dengan standar pendidikan yang dinikmati oleh masyarakat di kota besar.

Ratih memberikan contoh infrastruktur di bidang pendidikan. “Implementasinya apakah sudah setara dan inklusif? Faktanya

masih banyak bangunan dan sarana-prasarana pendidikan yang belum dibenahi dan membutuhkan perhatian kita,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, setiap turun ke dapil saat masa reses, “Yang selalu disampaikan terus-menerus kepada saya ialah terkait dengan pembenahan sarana dan prasarana sekolah.”

Ratih menegaskan, tantangan dunia pendidikan kita masih sangat banyak. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga penggunaan anggaran setiap tahunnya--yang berdampak langsung terhadap perkembangan positif dunia pendidikan--harus menjadi perhatian bersama.

Banyaknya kritik dan ketidakpuasan masyarakat, khususnya *stakeholder* pendidikan, menurut Ratih, tidak bisa dibiarkan begitu saja, tapi patut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun sebuah kebijakan pendidikan. ■

“

Teknologi, jika dimanfaatkan dengan tepat justru bisa menjadi solusi paling efisien untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antardaerah.”

Anindito Aditono

Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek

4 Menguatkan Pendidikan Anak Usia Dini

DARI berbagai kritik dan masukan yang disampaikan *stakeholder* pendidikan, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek, Anindito Aditono, melihat bahwa sebenarnya masih banyak hal lain yang tidak terkomunikasikan.

Padahal, menurut Anindito, ada banyak titik temu antara yang diajukan oleh pemerintah dan aspirasi yang disampaikan berbagai kalangan. Ia mengatakan, beberapa isu terkait dengan RUU Sisdiknas memang masih jauh dari sempurna dan harus disempurnakan lebih lanjut.

Lalu apa urgensi dari perubahan UU Sisdiknas? Anindito mengungkapkan ada tiga alasan utama. Pertama, soal kesen-

jangan yang masih sangat tinggi dalam sistem pendidikan kita. Kedua, rendahnya kualitas yang erat kaitannya dengan budaya birokratis di sekolah-sekolah dan kampus, yang orientasinya lebih patuh kepada administrasi sehingga lupa dengan budaya mutu.

Ketiga, kesejahteraan guru. Kita tahu banyak guru yang tingkat pendapatannya jauh dari layak. Kalau kenyataannya seperti ini, “Bagaimana kita menuntut para guru mengajar dengan baik, mengambil keputusan-keputusan kompleks di kelas, dan bisa bertindak secara profesional, jika pendapatannya masih belum memenuhi standar atau layak?”

Ia mengakui, memang ada guru yang bisa melakukannya dalam keterbatasan. “Tetapi kita ingin agar hal itu terjadi bukan *by accident*, melainkan *by decide*. Harusnya semua guru berkesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak,” ujarnya.

Lalu seberapa besar kesenjangan dalam sistem pendidikan? Anindito mengatakan, kementerian memiliki data dari asesmen nasional yang dilakukan pada 2021.

Data yang diperoleh menunjukkan, kira-kira kesenjangan antara siswa dari keluarga kaya dan keluarga miskin sekitar 2-3 tahun pembelajaran. Anindito memberikan contoh ada dua anak di kelas yang sama, dengan usia yang sama, mengalami pembelajaran sekian tahun yang sama.

Kalau mereka berasal dari keluarga kaya dan miskin, akan menghasilkan capaian pembelajaran yang berbeda. Yang dimaksud dengan capaian pembelajaran ialah manfaat yang mereka

peroleh dari pembelajaran di sekolah. Capaian pembelajaran yang mereka alami bisa terpaut 2-3 tahun. “Capaian ini sangat signifikan dan perlu menjadi perhatian kita bersama,” tutur Anindito.

Dia menambahkan, kesenjangan antardaerah lebih besar lagi. Pemanfaatan teknologi komunikasi, menurut Anindito, memang bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan. Namun, fakta di lapangan, masih banyak daerah yang belum terjangkau internet. Banyak sekolah yang belum memadai fasilitas digitalnya.

Kendati demikian, fakta itu seharusnya bukan menjadi alasan untuk tidak melihat teknologi sebagai bagian dari solusi. Teknologi, jika dimanfaatkan dengan tepat, kata Anindito, justru bisa menjadi solusi paling efisien untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antardaerah.

Di luar itu, menurut Anindito, kesenjangan infrastruktur pendidikan harus kita perbaiki dulu sehingga daerah-daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan fasilitas bisa mengambil manfaat paling besar dari hadirnya teknologi yang kini banyak dikembangkan oleh Kemendikbudristek. “Ini solusi paling efisien bagi daerah-daerah untuk mengejar ketertinggalannya.”

Kemendikbudristek sendiri, kata Anindito, sudah melakukan langkah-langkah konkret. Kita sudah merealisasikan program pengadaan dan pengiriman 800.000 laptop ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Namun, Anindito mengakui, program semacam itu tidak



MI/SUSANTO

Anak murid membersihkan papan tulis dengan kertas sebelum dimulainya pelajaran di SD YPK Ifar Babrongko, Kampung Yoboi, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (4/10/2021). Kegiatan pengajaran di sekolah dasar tersebut masih terkendala sarana belajar yang belum memadai.

semuanya bisa dilakukan oleh Kemendikbudristek. Kementerian lain dan terutama pemerintah daerah harus ikut ambil bagian.

Anggaran pendidikan kita, sebagaimana tertuang dalam APBN, ialah 20%. Namun, kata Anindito, anggaran sebesar 20% itu tidak semuanya dikelola Kemendikbudristek. Anggaran 20% digunakan untuk pendidikan lintas sektoral. Kemendikbudristek hanya mengelola tidak lebih atau bahkan kurang dari 3% dari APBN.

Anindito menjelaskan peran Kemendikbudristek ialah membuat program dan kebijakan-kebijakan pendidikan, standar-stand-

darnya, dan regulasinya. Adapun yang menyelenggarakan persekolahan, yang memiliki guru, yang mengelola kepala sekolah, ialah pemerintah daerah. Bukan pemerintah pusat dan bukan Kemendikbudristek karena sebagian besar dari 20% anggaran yang difungsikan untuk pendidikan ditransfer ke daerah, ke pemda.

Melalui UU Sisdiknas, kata Anindito, kita ingin mengatasi kesenjangan melalui penguatan PAUD. Lalu, apa kaitannya PAUD dengan upaya mengatasi kesenjangan? Anindito menjelaskan kesenjangan antarkelompok sosial ekonomi dalam sistem pendidikan bermula sejak hari pertama seorang anak menginjakkan kaki di kelas satu sekolah dasar.

Setiap anak datang ke sekolah dengan kesiapan belajar yang berbeda-beda, tergantung lingkungan keluarga, lingkungan rumah mereka, dan ini sangat terkait dengan kondisi sosial ekonomi. Seberapa berpendidikan orangtuanya, apa profesi orangtuanya, juga fasilitas belajar seperti apa yang dimiliki di rumah.

Fakta di lapangan, anak-anak dari keluarga menengah atas jauh lebih siap untuk mengambil manfaat dari sekolah ketimbang rekan-rekannya yang berasal dari keluarga menengah ke bawah.

Pemerintah ingin gap atau kesenjangan yang sudah ada sejak awal kelas satu SD itu bisa diminimalkan dan bisa dikurangi dengan cara menyediakan akses yang universal pada pendidikan anak usia dini. “Kalau semua anak, terlepas dari orangtuanya berada atau tidak, bisa mendapatkan pengalaman belajar yang membuat mereka jauh lebih siap mengambil manfaat dari se-

kolah dasar, maka akan menjadi penyetara yang luar biasa antarkelompok sosial ekonomi. Karena itu, kita melihat bahwa PAUD merupakan komponen dari sistem pendidikan kita yang harus dikuatkan,” kata Anindito.

Lalu apa saja yang diatur dalam RUU Sisdiknas terkait dengan PAUD? Anindito menjelaskan, pertama kita mengakui PAUD sebagai bagian dari jenjang pendidikan. Jangan kaget, dalam undang-undang pendidikan yang sekarang masih berlaku, PAUD tidak diakui sebagai jenjang pendidikan. “Ini yang kita koreksi dengan Pasal 18 di RUU Sisdiknas. Jenjang pendidikan dimulai dari PAUD.”

Kedua, kita memberikan pengakuan kepada pendidik PAUD sebagai guru. Di undang-undang yang sekarang berlaku, baik UU Guru dan Dosen maupun UU Sisdiknas, pendidik PAUD tidak diakui sebagai guru dan karena itu tidak bisa mendapatkan hak-haknya setara dengan guru lainnya.

“Tentu saja kita tidak mungkin bicara tentang peningkatan kualitas PAUD kalau pendidiknya diakui sebagai guru pun tidak. Di Pasal 108 RUU Sisdiknas, kita mengakui guru sebagai pendidik profesional, termasuk pada jenjang anak usia dini,” kata Anindito.

Selain itu, lewat RUU Sisdiknas, kita juga memperkuat PAUD untuk menutup kesenjangan itu dengan memasukkan TK-B sebagai tahun terakhir dari PAUD, kita masukkan ke periode wajib belajar. Kita sebut sebagai kelas nol atau kelas prasekolah.

Anindito menjelaskan, ini adalah cara untuk memaksa peme-

rintah dan negara membiayai paling tidak satu tahun akhir dari PAUD dan menyediakan akses bagi semua anak.

Begitu anak masuk ke dalam sistem sebagai bagian dari jenjang pendidikan dasar dan wajib belajar, maka pemerintah otomatis wajib membiayainya.

Anindito mengatakan, RUU Sisdiknas justru memaksa negara untuk hadir lebih banyak di dunia pendidikan. Salah satunya dengan memperluas cakupan wajib belajar untuk prasekolah ini. “Jadi kita menambah kewajiban negara, bukan malah mengurangi tanggung jawab.”

Melalui RUU Sisdiknas, imbuh Anindito, kita juga memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menuntaskan isu-isu terkait pemenuhan standar kualitas di PAUD dan pendidikan dasar. Secara tidak langsung, kita memaksa daerah untuk meningkatkan kualitas dan akses di pendidikan anak usia dini dan dasar sebelum ke menengah. “Namun, pemerintah pusat tentu tidak akan membiarkan pemerintah daerah berjalan sendiri.”

Lalu, bagaimana dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan menengah? Anindito mengatakan, memperbaiki kualitas peserta didik di jenjang SMA jauh lebih sulit daripada pendidikan dasar. “Lebih mudah kalau kita memperbaiki kualitas anak didik saat mereka berada di fondasi paling bawah. Ya, sejak PAUD-nya dulu. Karena itu, penguatan PAUD menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas SDM Indonesia ke depan.”

Kalau fondasi di PAUD dan pendidikan dasarnya sudah bagus,

menurut Anindito, maka bisa memperluas akses ke pendidikan menengah. “Kalau kita nekat langsung menyediakan akses mulai kelas 0, kelas prasekolah sampai dengan kelas 12 secara serentak, pasti akan mengorbankan kualitas karena energi dan waktu hanya kita fokuskan bagaimana membuka akses tanpa ada sisa untuk memperbaiki kualitasnya.”

Jika RUU Sisdiknas ini kelak menjadi undang-undang, terkait dengan kesejahteraan guru, Anindito menegaskan, para guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi tetap dijamin akan memperoleh tunjangan profesi tersebut sampai pensiun atau sampai tidak menjalankan pekerjaannya lagi sebagai guru. ■

“

SDM hebat dihasilkan
oleh dan dari sistem
pendidikan yang
bermutu.”

Panut Mulyono
Ketua Forum Rektor Indonesia

5 Menanti Produk Pendidikan yang Bisa Memakmurkan Indonesia

MENCOBA melihat produk pendidikan dalam konteks keindonesiaan saat ini, Ketua Forum Rektor Indonesia, Panut Mulyono, mengajak para peserta diskusi untuk melakukan autokritik sampai sejauh mana dunia pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan tinggi, telah memberikan sumbangsih bagi kemajuan Indonesia.

Panut mengatakan, potensi yang kita miliki atau keunggulan komparatif yang kita miliki ternyata belum bisa sepenuhnya kita manfaatkan untuk menjadikan Indonesia maju dan makmur.

Padahal, kalau negara kita maju dan makmur, pendidikan bisa gratis. Namun, apa pun faktanya, kata Panut, hal-hal semacam ini harus terus kita jadikan sebagai ambisi kita.

Menurut dia, biodiversitas Indonesia seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membuat obat, untuk bikin ini dan itu. Tidak seperti sekarang, bahan baku untuk obat-obatan 94% masih impor. Kita kaya kelapa sawit, tetapi produk-produk kelapa sawit belum menjadi jagoan di dunia.

Kita juga banyak memiliki tambang, tetapi kita belum bisa mengolahnya dengan maksimal, padahal bisa memiliki nilai tambah tinggi sehingga bisa memakmurkan bangsa. “Dengan begitu, masalah pendidikan yang selama ini kita hadapi bisa teratasi. Ya, bisa teratasi kalau kita makmur dan sejahtera,” kata Panut.

Semua itu, imbuh Panut, kuncinya ada di SDM. SDM kita harus hebat. “Tetapi hebat yang bagaimana?” Panut bertanya dan menjawab, “Hebat dalam banyak hal.” SDM Indonesia yang mencintai perdamaian. SDM yang menghargai perbedaan. SDM yang memiliki etos kerja hebat dan menguasai teknologi yang bisa digunakan untuk mengolah sumber daya alam dan menciptakan kemajuan.

SDM hebat dihasilkan oleh dan dari sistem pendidikan yang bermutu. Oleh sebab itulah, Kemendikbudristek berusaha untuk membuat pengaturan-pengaturan di dalam sistem pendidikan kita supaya kita nanti menjadi bangsa yang bisa menghasilkan SDM-SDM unggul.

Mereka kemudian bisa berperan dalam kemajuan bangsa untuk mencapai kemakmuran. Menjadi bangsa yang berdaya saing. Menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang sejahtera. Semua ini idealnya dihasilkan dari dunia pendidikan dan pengajaran.

Panut menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki tiga undang-undang terkait dengan pendidikan, yaitu UU tentang Sisdiknas, UU tentang Guru dan Dosen, dan UU tentang Pendidikan Tinggi.

Pada ketiga undang-undang tersebut, menurut Panut, ada ketidakselarasan atau tumpang tindih. Tiga undang-undang itu kemudian dicoba untuk digabungkan menjadi satu. Harapannya menjadi selaras, pengaturan-pengaturannya menjadi lebih harmoni.

Secara umum, UU Pendidikan Tinggi, disebut Panut, sudah berjalan dengan baik dan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pengelolaan perguruan tinggi secara umum di Indonesia juga sudah baik, terutama dengan adanya otonomi.

Walaupun lambat karena dananya tidak banyak, menurut Panut, perguruan tinggi di Indonesia kini semakin maju dan semakin baik. Buktinya, perguruan tinggi yang masuk 500 besar *world university ranking* terus bertambah.

Menyinggung tentang profesi guru dan dosen, Panut mengatakan, sebagai pendidik profesional, guru dan dosen sudah masuk di Pasal 108 RUU Sisdiknas. Dosen dan guru yang sekarang menerima tunjangan profesi tetap akan menerima tunjangan tersebut selama memenuhi persyaratan. Namun, ada kekhawatiran jika UU Sisdiknas diberlakukan, lalu UU Guru dan Dosen dicabut, bagaimana dengan dosen yang belum menerima tunjangan?

Panut juga menyoroti soal penyediaan fasilitas bagi sekolah

inklusi. “Soal ini harus terus kita kawal agar peraturan-peraturan yang mendorong dan memfasilitasi pemerataan dan kesetaraan betul-betul nyata sehingga nanti siapa pun yang menjadi pelaksana di pemerintahan menjalankan ketentuan itu,” katanya.

Panut melanjutkan, standar pendidikan harus ditetapkan, tetapi tidak disamaratakan, mesti disesuaikan dengan kondisi setempat. ■



Inklusi dan kesetaraan penting untuk mewujudkan rasa keadilan, rasa persamaan hak dan kesempatan. Sejalan dengan filosofi Indonesia, juga sesuai dengan *Global Universal Declaration of Human Right* bahwa setiap orang punya hak untuk mengakses pendidikan.”

Mohammed Ali

Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia

6 Mewujudkan Rasa Keadilan, Persamaan Hak dan Kesempatan

KETUA Umum Asosiasi Dosen Indonesia, Mohammed Ali Berawi, menyebut isu inklusivitas dan kesetaraan bukan sesuatu yang baru buat Indonesia.

Menurut dia, kalau menjalankan secara konsisten dan berkomitmen terhadap inklusi dan kesetaraan, sebenarnya Indonesia sedang menjalankan Pancasila di tataran implementatif.

Ali mengajak bagaimana kita melihat isu inklusi dan kesetaraan ini sebagai sebuah pengejawantahan dari sila Pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana hubungan reaksi antarmanusia dalam menyikapi perbedaan-perbedaan?

Adab, menurut Ali, harus menjadi pola hubungan di antara para pihak. Di saat kita merespons inklusivitas, perbedaan-per-

bedaan muncul dan kesetaraan yang muncul harus tanpa penghakiman dan diskriminasi. Kita sudah melaksanakan bahwa persatuan Indonesia yang tanpa diskriminasi sudah kita lakukan. Selayaknya pula hal seperti itu tecermin dalam dunia pendidikan kita.

Di saat mengeksekusi pemahaman tentang inklusi dan kesetaraan di dunia pendidikan, kata Ali, juga harus memperhatikan kearifan lokal karena negeri ini terdiri atas banyak pulau yang tersebar di mana-mana.

“Bagi saya inklusi dan kesetaraan penting untuk mewujudkan rasa keadilan, rasa persamaan hak dan kesempatan. Ini bagi saya sejalan dengan filosofinya Indonesia, juga sesuai dengan *Global Universal Declaration of Human Right* bahwa setiap orang punya hak untuk mengakses pendidikan,” tambah Ali.

Dia mengingatkan bahwa UNESCO telah menggariskan bahwa keadilan sangat penting untuk memastikan bahwa semua peserta didik harus diperlakukan secara adil. Instruksi-instruksi guru/dosen di kelas harus bisa dipahami sama antara siswa atau mahasiswa biasa maupun yang berkebutuhan khusus. Jangan sampai merasa diperlakukan berbeda.

Hal ini penting untuk dijabarkan dalam tataran konsep maupun kebijakan. Pada tataran konsep bisa dilihat bahwa inklusi dan kesetaraan adalah prinsip menyeluruh yang memandu semua kebijakan, rencana, dan praktik-praktik pendidikan.

Konsekuensinya, menurut Ali, semua kebijakan pendidikan

nasional yang penting harus menekankan rasa inklusif dan kesetaraan.

Peduli terhadap Penyandang Disabilitas

Lalu bagaimana dengan peserta didik yang menyandang disabilitas? Berbicara sebagai penanggap, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufroni Sakaril, mengungkapkan, kewajiban pemerintah terhadap peserta didik khususnya penyandang disabilitas sudah tertuang di dalam UUD 1945 dan juga UU Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur bahwa negara harus memfasilitasi setiap jenjang, jenis, dan jalur pendidikan untuk penyandang disabilitas.

Gufroni menyambut baik adanya UU Sisdiknas baru yang RUU-nya masih dalam proses pembahasan. Namun, kalau kita perhatikan, partisipasi penyandang disabilitas di bidang pendidikan masih sangat rendah jika dibandingkan dengan yang non-disabilitas.

Rendahnya partisipasi sekolah ini, menurut Gufroni, tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan para penyandang disabilitas. Akhirnya mereka sulit mencari pekerjaan, mengakses usaha, dan sebagainya karena pengetahuan, keterampilan mereka relatif rendah.

Untuk membantu mereka, ada beberapa perusahaan, bahkan di pemerintahan, membuka kesempatan atau lowongan pekerjaan. Akan tetapi, formasi-formasi yang dibuka itu tidak bisa dipenuhi karena syaratnya harus punya pendidikan yang setara.

Di sisi lain, pendidikan para penyandang disabilitas, menurut Gufroni, sangat rendah. Survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hanya sekitar 5%-10% saja penyandang disabilitas yang menikmati pendidikan. Realitas ini tentu saja sangat berpengaruh pada kualitas hidup para penyandang disabilitas.

Padahal, ujar Gufroni, pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan *turning point* untuk mengubah nasib mereka. Memang ada para penyandang disabilitas yang pernah mencicipi pendidikan di perguruan tinggi, yang memberikan peluang bagi mereka untuk bekerja atau berkarya. “Tapi bagi mereka yang sama sekali tidak pernah sekolah atau hanya lulusan SD, bahkan tidak lulus, mereka sulit sekali mengakses pekerjaan.”

Gufroni menjelaskan, disabilitas banyak ragamnya. Bukan hanya satu jenis. Ada yang fisik, mental, intelektual, dan sensorik. “Semua penyandang disabilitas yang beragam itu harus mempunyai kesempatan yang sama dalam pendidikan.”

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pentingnya memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas agar bisa berpartisipasi dalam proses pendidikan, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi.

Gufroni mengatakan, di perguruan tinggi sudah ada unit pelayanan disabilitas. Ia berharap unit layanan disabilitas itu ada di semua jenjang pendidikan, baik di PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi.



MICKY GUSTAWAN

Pelajar Sekolah Luar Biasa Negeri 02 Jagakarsa dipandu juru bahasa isyarat saat berkunjung ke Indonesia Museum of Health and Medicine, Jakarta, Kamis (15/9/2022). Dalam rangka memperingati tahun kelima perjalanannya, museum tersebut membuat program edukasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas salah satunya penyandang tunarungu agar dapat memperluas dampak kegiatan edukasi terkait ilmu kedokteran dan kesehatan.

Mengapa ini penting? Karena dari situlah nanti para orangtua, masyarakat, pihak sekolah, dan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan itu bisa mendapatkan banyak masukan mengenai kebutuhan para difabel dengan ragam disabilitas yang berbeda-beda, “Sehingga kita bisa memberikan fasilitas ataupun sarana-prasarana termasuk guru guna memenuhi kebutuhan dari peserta didik penyandang disabilitas,” kata Gufroni.

Ia melanjutkan, “Dari sekian banyak unsur pendidikan, yang

paling penting bagi kami ialah guru karena gurulah yang nantinya mengambil peran lebih atau dominan di dalam proses pendidikan teman-teman, adik-adik kita, atau anak-anak kita penyandang disabilitas.”

Jadi, kemampuan guru di dalam mengajar, mendidik, atau mengembangkan bakat para penyandang disabilitas menjadi sangat penting. “Kehadiran guru yang mempunyai kemampuan atau kompetensi dalam menangani penyandang disabilitas bisa menjamin penyandang disabilitas mengikuti proses pendidikan di sekolah, baik itu formal, informal, maupun nonformal,” jelas Gufroni.

Pendidikan Pascabencana

Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa, Ahmad Baedowi AR, melihat istilah inklusi, khususnya kesetaraan dalam RUU Sisdiknas, hanya terbatas pada diksi. Ia menyarankan kata ‘kesetaraan’ digunakan dalam konteks yang lebih luas.

Menurut Baedowi, ada beberapa buku menarik yang menjelaskan tentang kesetaraan yang identik dengan *equality of condition*. Kesetaraan dalam konteks kondisi, dalam artian kondisi tersebut bukan hanya terbatas pada *disable difable*, tetapi juga kondisi cuaca atau alam.

Posisi geografis kita rentan sekali dengan musibah, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bencana alam lainnya. Artinya, kita juga sudah harus memikirkan bagaimana pendid-

dikan anak-anak pascamusibah. “Sampai saat ini kita belum punya standar, misalnya bagaimana membuat sekolah darurat pascagempa dan sebagainya,” kata Baedowi.

Jika hal seperti itu tidak disiapkan, negara bisa kehilangan kontrol atas hak dasar yang kita sebut dengan *equal*. Menurut Baedowi, prinsip *equality of condition* lebih penting, jauh lebih berarti daripada nondiskriminatif.

Baedowi kemudian memberikan contoh cerita inspiratif di Amerika yang sudah menerapkan sistem yang baik dalam hal kesetaraan. Disebutkan, pada 2009 ada seorang anak perempuan bernama Hadijah Williams. Dia selama kurang lebih 14 tahun posisinya *homeless* layaknya gelandangan.

Hadijah hidup berpindah-pindah lebih dari 12 tahun, belajar di lebih dari 30 sekolah, mulai dari Los Angeles ke Nevada sampai ke Orange Country. Dia berjalan dan berpindah-pindah sekolah. Dia tidak menghadapi masalah karena sistem pendidikannya sama.

Begitu lulus SMA, luar biasa, dia diterima di Harvard University. Hal itu dimungkinkan karena negara menyediakan semua fasilitas untuk semua akses yang dibutuhkan warganya. “Nah, ini catatan saya. Kesetaraan kondisinya jauh lebih berarti untuk kondisi seperti di Indonesia,” kata Baedowi.

Ia melanjutkan, ada beberapa frasa di dalam RUU Sisdiknas yang menggunakan soal bagaimana keterlibatan masyarakat. “Saya menyarankan agar tidak menggunakan frasa ‘peran serta

masyarakat' karena kalau 'peran serta' itu bisa jadi dipaksa atau diajak, tetapi gunakanlah frasa 'partisipasi masyarakat'."

Partisipasi masyarakat, menurut Baedowi, kini sudah hilang dalam dunia pendidikan kita. "Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat perlu kita gelorakan lagi dan harus sederhana, harus dijelaskan apa jenis partisipasi yang diinginkan oleh negara kepada masyarakat, karena selama ini orang tergiur dengan isu-isu politik pendidikan gratis dan sebagainya sehingga partisipasi masyarakat menjadi dilupakan."

Baedowi mengingatkan hal-hal ini penting untuk diperhatikan dalam RUU Sisdiknas, selagi RUU ini belum masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Jadi masih terbuka untuk membatasnya.

Terkait dengan kurikulum, Baedowi mengatakan, di dalam RUU Sisdiknas harus ada tradisi baru untuk mereviu kurikulum, mulai dari kurikulum dasar bahkan prasekolah sampai pendidikan tinggi.

Bayangan sejak dulu hingga hari ini kita terus membicarakan soal bagaimana kualitas guru yang tidak naik-naik. "Mengapa *nggak* sederhanakan saja, misalnya ya sudah kita belajar saja teorinya 30% dan praktiknya 70% sehingga dalam lima tahun *nggak* perlu pendidikan tambahan dan guru sudah memiliki profesionalitas yang cukup," kata Baedowi.

Dia mengkritik, berdasarkan kurikulum yang sekarang berlaku, untuk menjadi guru, belajarnya lima tahun. Praktik la-

pangannya tidak ada. Enam bulan cuma disuruh mengajar begitu saja.

Baedowi menambahkan, RUU Sisdiknas juga harus memasukkan secara terperinci tentang apa yang kita yakini sebagai sumber masalah dari masalah pendidikan di Indonesia. Apa itu? Apa lagi kalau bukan struktur anggaran. Struktur anggaran ini bukan hanya soal kewenangan mengelola anggaran.

Menutup diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat mengatakan, pendidikan sangat kompleks karena menyangkut masa depan anak bangsa. Dia mengingatkan, tidak ada RUU apa pun yang begitu saja menjadi sempurna. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban kita untuk ambil bagian menyempurnakan agar bisa disahkan menjadi undang-undang. ■



**Catatan
Moderator**

Menimbang Peta Jalan Pendidikan Kita

Oleh: **Luthfi Assyauckanie**

PADA Mei 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merilis Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Proposal itu sebagai bagian dari rancangan Kemendikbud untuk memperbaiki kondisi pendidikan Indonesia. Sebagai mana diperlihatkan berbagai statistik, peringkat pendidikan Indonesia berada di bawah banyak negara lain, termasuk negara-negara yang memiliki ekonomi setara, seperti India, Mesir, dan Thailand.

Salah satu indikator penting keberhasilan sistem pendidikan suatu bangsa ialah *output*-nya, dalam hal ini memproduksi manusia yang punya keahlian dan karakter sesuai dengan visi pendidikan yang dicanangkan. Visi yang baik belum tentu menghasilkan produk yang baik. Alasannya sederhana, karena untuk mewujudkan visi itu diperlukan program dan kegiatan pendukungnya. Peta Jalan Pendidikan adalah instrumen untuk mewujudkan visi itu, yakni memproduksi manusia yang unggul, berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia.

Pada Peta Jalan Pendidikan tersebut, visi itu dirangkum dalam konsep Pelajar Pancasila. Masalahnya ialah ada kesenjangan yang nyata antara visi dan produk pendidikan yang kita miliki. Dalam

hal keunggulan, misalnya, kualitas pelajar Indonesia berada di bawah rata-rata negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Numerasi dan literasi dalam PISA (Programme for International Student Assessment) adalah indikator paling konkret dari keunggulan pelajar.

Peta Jalan Pendidikan Indonesia dibangun berdasarkan tiga realitas sosial. Pertama, disrupsi teknologi yang memberikan dampak sangat besar bagi banyak sektor kehidupan. Kedua, perubahan demografi, peningkatan usia harapan hidup, tumbuhnya urbanisasi, dan intensnya mobilitas manusia. Ketiga, perubahan lingkungan, dari masalah energi, limbah, krisis air, hingga perubahan iklim.

Sejak dirilis, Peta Jalan Pendidikan Indonesia direspons secara beragam. Ada yang mendukung dan ada yang mengkritisnya. Mereka yang mendukung menganggap bahwa peta itu merupakan langkah terobosan untuk mengantisipasi dunia yang tengah berubah dengan cepat. Apa yang dilakukan Mendikbud dengan mengubah sistem pendidikan kita patut diapresiasi dan diberi dukungan. Sebaliknya, bagi yang kritis, peta itu dianggap sebagai proposal mentah yang masih memiliki kekurangan di sana-sini.

Beberapa anggota DPR RI, khususnya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mempertanyakan absennya kata ‘agama’ dalam draf itu. Tentu saja hal itu dibantah oleh Kemendikbud karena isu agama sudah tercantum dalam salah satu visi pendidikan,

yakni menjadikan para pelajar sebagai manusia yang berakhlak dan berbudi pekerti. Beberapa pengamat pendidikan melontarkan kritik yang lebih substansial, seperti tidak jelasnya strategi pelaksanaan peta itu dan sumber-sumber pendanaannya. Peta tersebut juga dikritik karena dianggap terlalu bias Jawa, bias kota, dan bias kelas menengah. Padahal kondisi masyarakat Indonesia sangat beragam, baik secara geografi, ekonomi, maupun infrastruktur.

Pro-kontra seputar Peta Jalan Pendidikan itulah yang menjadi latar belakang diselenggarakannya diskusi FDD-12 sekitar dua bulan setelah dokumen tersebut dirilis ke publik. Tema ini penting untuk dieksplorasi lebih jauh. Bukan hanya untuk memahami secara lebih tepat dokumen kontroversial itu, tapi juga untuk menganalisis dan memberikan kontribusi pada perdebatan yang tengah berlangsung. Dalam diskusi itu, panitia FDD-12 mengundang sejumlah tokoh dan ahli, baik dari pemerintahan, akademi, maupun praktisi pendidikan. Ada beberapa poin penting yang bisa saya catat di sini.

Pertama, Peta Jalan Pendidikan yang diajukan pemerintah lewat Kemendikbud adalah dokumen yang patut didukung dan diapresiasi. Tanpa mengabaikan kekurangannya, dokumen ini penting sebagai terobosan untuk mengatasi berbagai problem pendidikan yang kita alami selama ini. Situasi pendidikan kita tidak akan pernah berubah jika kita tidak berani melakukan tindakan-tindakan radikal. Dunia berubah dengan sangat cepat dan

cara kita mengantisipasi perubahan itu tidak lagi sama.

Secara praktis, ada tiga target yang disasar Peta Jalan Pendidikan ini. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Problem utama pendidikan kita dimulai dari sekolah, baik yang terkait dengan sistem pembelajaran, infrastruktur, maupun kualitas guru. Kemendikbud telah berusaha memperbaiki problem dasar itu dengan mengubah sistem pendidikan nasional secara bertahap. Penghapusan ujian nasional adalah salah satu cara untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pembangunan dan perbaikan gedung sekolah juga digalakkan dengan memperhatikan infrastruktur yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, seperti akses terhadap internet. Begitu pun kualitas tenaga pengajar, yang terus ditingkatkan dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi guru.

Target kedua ialah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi. Sudah umum diketahui bahwa perguruan tinggi kita kalah bersaing jika dibandingkan dengan universitas-universitas di luar negeri. Salah satu problemnya ialah ketidaksinkronan antara apa yang diharapkan mahasiswa dan apa yang diajarkan di bangku kuliah. Peta Jalan Pendidikan mendorong mahasiswa untuk lebih independen dalam mengeksplorasi pengetahuan. Mereka juga diberi pilihan untuk menimba pengalaman di luar kampus dengan mengikuti program magang minimal selama satu semester. Akses kepada penelitian juga dibuka luas. Salah satunya dengan memberikan dana riset dan insentif bagi perguruan tinggi

yang inovatif.

Target ketiga, meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Target ini merupakan *output* dari poin pertama dan kedua. Dengan perbaikan sistem pengajaran sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi serta peningkatan kualitas pengajarannya, diharapkan lembaga pendidikan mampu melahirkan manusia yang unggul dan kompetitif. Perubahan global menjadi rujukan penting dalam mengambil keputusan yang terkait dengan pendidikan nasional. Biar bagaimanapun, pada akhirnya, para siswa dan mahasiswa akan terjun ke masyarakat dan langsung menghadapi perubahan itu.

Sejak 2019, upaya mewujudkan target pertama dan kedua sudah dilaksanakan dengan melakukan serangkaian program pembenahan, dari penghapusan ujian nasional, pelatihan guru, pemberian beasiswa, hingga menggalakkan pendirian pusat-pusat penelitian. Secara rutin, Kemendikbud menyelenggarakan acara kurikulum merdeka dan guru penggerak sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim turun tangan langsung mengecek perkembangannya.

Poin kedua yang bisa kita catat dari diskusi FDD-12 ialah bahwa reformasi pendidikan tidak bisa ditentukan hanya oleh Kemendikbud. Sistem pendidikan kita tidak didesain untuk diatur hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga perlu melibatkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Masyarakat

secara luas pun ikut dilibatkan, khususnya yang menyangkut pengelolaan pendidikan oleh swasta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang kewenangan dan aset pendidikan di Indonesia bahwa pendidikan dasar (SD dan SMP) dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dikelola oleh pemerintah provinsi. Hanya perguruan tinggi yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

Dengan struktur seperti itu, Kemendikbud tidak bisa leluasa menerapkan kebijakan-kebijakannya kepada sekolah-sekolah di Indonesia. Peran pemerintah daerah menjadi krusial karena merekalah ujung tombak pelaksanaan kebijakan-kebijakan itu. Perbedaan kondisi ekonomi tiap-tiap daerah menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan dalam pendidikan nasional. Daerah-daerah yang secara ekonomi lebih sejahtera umumnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi ketimbang daerah-daerah yang kurang sejahtera.

Poin ketiga yang menjadi catatan penutup diskusi FDD-12 ialah tentang masa depan Peta Jalan Pendidikan yang dibuat Menteri Nadiem. Seperti kita tahu, kebijakan pendidikan di Indonesia selalu berubah-ubah. Ganti menteri, ganti kebijakan. Tidak ada jaminan bahwa Peta Jalan Pendidikan yang ideal ini bisa diteruskan setelah 2024. Tantangan ke depan ialah meyakinkan pemerintahan baru untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan. Jangan sampai hal-hal positif yang sudah dimulai dibatalkan dan menteri baru kemudian membuat program baru lagi dari nol. ■

Transformasi Guru Berkualitas Pasca-Perhelatan Presidensi Indonesia G20

Oleh: **Radityo Fajar Arianto**

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ibu Dr. Lestari Moerdijat selaku pengagas Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD-12) membuka diskusi dengan topik mengenai pendidikan ini. Diskusi yang rutin digelar setiap Rabu itu membahas berbagai persoalan, seperti kesehatan, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, sejarah, pertahanan dan keamanan, juga luar negeri.

Ibu Lestari menggarisbawahi bahwa belajar adalah suatu proses dialogis dan guru-guru adalah instrumen yang sangat penting untuk memiliki kapasitas melakukan transformasi siswa sehingga mampu menggali semua potensinya.

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, menjadi salah satu narasumber pada diskusi itu. Profesor Nunuk memberikan sosialisasi tentang beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Indonesia selama satu tahun atau selama dua semester. Dia menekankan bahwa pemerintah gencar memberikan beasiswa kepada guru-gu-

ru agar dapat meningkatkan kapasitas sehingga mampu menjadi agen perubahan transformasi pendidikan di masa depan.

Narasumber lainnya ialah Dr. Totok Bintoro, M.Pd., yang menjelaskan bahwa peran guru tidak mungkin tergantikan oleh mesin. Menurutnya, guru dapat mengajarkan nilai-nilai etika, kebudayaan dan peradaban, pengalaman, kebijaksanaan, serta empati. Adapun teknologi hanya membantu guru untuk mengemas konten etika, budaya, peradaban, kebijaksanaan, dan empati itu dengan lebih baik.

Selanjutnya ada Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. sebagai narasumber. Dia menyoroti tim *ad hoc* kementerian dalam konteks pembuatan prototipe instrumen digital pendidikan (kurikulum sekolah, proses pembelajaran, asesmen, dan sebagainya) yang tentu sangat berguna. Namun, kata Profesor Unifah, instrumen itu tidak akan banyak gunanya jika ingin disebarluaskan tetapi tidak didukung oleh semua pemangku kepentingan. Guru dan kepala sekolah adalah penggerak yang mungkin bisa digunakan untuk menyebarkan inovasi instrumen digital tersebut. Akan tetapi, aktor-aktor penggerak tersebut harus ada di tiap sekolah, dan itu hanya dapat dilakukan jika kementerian bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan guru yang sudah benar-benar berfungsi selama ini, yakni lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK (*pre-service*) dan lembaga pelatihan guru (*in-service*). Kerja sama itu harus secara sistematis dan tidak sebatas sebagai narasumber. Kalau pengembangan ‘penggerak’ itu dilakukan tanpa memberi

peran kepada kedua lembaga pendidikan dan pelatihan tersebut, sifat pengembangannya hanya proyek.

Menurutnya, solidaritas dan kemitraan yang selama ini dilakukan oleh Kemendikbudristek kurang representatif dan komprehensif. Unifah menyatakan perlu dilakukan kerja sama yang tersistem dengan organisasi mitra yang lebih representatif, baik dari sisi ukuran, pengalaman, maupun keahlian, seperti Muhammadiyah, NU, PGRI, dan Yayasan Penabur. Institusi-institusi itu memiliki jumlah sekolah dan guru yang sangat besar. Bahkan untuk tingkat SMA dan SMK, jumlah mereka jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah. Karena itu, peran lembaga-lembaga tersebut sangat signifikan.

Di sisi lain, Kemendikbudristek juga harus membangun sistem pelatihan guru dalam jabatan untuk pembinaan profesi guru berkelanjutan, yang dikaitkan pula dengan sistem promosi, remunerasi, dan sertifikasi.

Sebagai penanggap, Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa, Ahmad Baedowi AR, menyoroti beban mata kuliah yang berlebihan sehingga pembentukan karakter menjadi tidak efektif dan ketika lulus, aspek pedagogisnya rendah sekali. Dalam pelatihan guru yang dialaminya, Ahmad Baedowi sering mendapati calon guru tidak mengerti teori belajar dan ilmu pedagogi yang sangat substansial untuk menciptakan guru yang berkualitas.

Penanggap berikutnya ialah anggota Komisi X DPR RI, Mohammad Haerul Amri. Dia menyoroti peran guru dalam mem-

persiapkan generasi muda menjemput peluang bonus demografi. Generasi muda yang produktif dapat menjadi aset bangsa jika dipersiapkan dengan baik lewat sistem pendidikan yang mumpuni.

Adapun penanggap terakhir ialah Ester Lince Napitupulu, wartawan bidang pendidikan dari Harian *Kompas*. Ester mengatakan bahwa *passion* mengajar seorang guru merupakan hal yang sangat penting. Namun, *passion* saja tidak cukup. Tantangannya ialah bagaimana melengkapi guru-guru untuk memberikan pendidikan yang relevan dengan perubahan zaman yang terjadi terus-menerus.

Diskusi pun ditutup wartawan senior Harian *Media Indonesia*, Saur Hutabarat. Dia mengajukan pertanyaan penting, “Apakah bangsa ini adalah bangsa yang suka belajar? Apakah bangsa ini adalah bangsa yang mau belajar? Atau, apakah bangsa ini adalah bangsa yang malas belajar?” Apa pun jawaban kita, Saur memotivasi untuk meningkatkan gairah belajar.

Kesimpulan dari diskusi ini ialah bahwa guru merupakan instrumen penting pendidikan yang perannya tidak dapat tergantikan oleh mesin dalam memberikan motivasi dan empati, juga membentuk karakter siswa. Karena itu, program pendidikan dan peningkatan kualitas guru menjadi faktor kunci mempersiapkan generasi Indonesia memanfaatkan bonus demografi melalui pemberian pendidikan yang relevan dengan perubahan zaman. Pendidikan guru menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari para pemangku kepentingan. ■



Biodata Tim Ahli



Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T. lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Memegang gelar master teknik dan manajemen industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, sebelumnya lulus sebagai sarjana sains bidang fisika teoretis dari Universitas Airlangga. Sebagai aktivis, Arief aktif sebagai Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan Ketua PP Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Memiliki rekam kerja di banyak perusahaan media nasional seperti *TV One*, *Trans TV/7*, *CNN Indonesia*, dan *Metro TV*. Saat ini menjabat staf khusus di Chairman Office Media Group. ■



Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. lahir di Wonosobo, 10 Juli 1975. Ia merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Pasundan Bandung, Universitas Parahyangan (2000-2007), dan Dewan Penasihat DPD Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat. Bidang kajiannya ialah hukum tata negara. Meraih gelar S-3 ilmu hukum di Universitas Padjadjaran pada 2011 dan mengenyam sejumlah pendidikan keterampilan seperti bidang jurnalistik dan pelatihan *public learning services* (PLS) di Payap University Chiang May, Thailand. Atang juga menjadi dosen luar biasa di Unikom (2003), Universitas Maranata (2010), Staf Ahli DPR RI 2009-2019, Staf Ahli DPD RI 2009-2019, dan staf khusus pimpinan MPR RI (2019-sekarang). ■



Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si. lahir di Masamba, 1 September 1956. Pendidikan terakhir S-2 administrasi negara. Pengalaman kerjanya dari Camat Wotu, Kabupaten Luwu (1986-1989), dosen IIP/IPDN (1989-2014), Bupati Luwu Utara (1999-2009), Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014), anggota DPR RI (2014-2019), Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang), serta anggota TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan (2021-sekarang). Luthfi mendapat tanda penghargaan Bintang Jasa Utama pada 1999, tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (2005), dan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2008). ■



Arimbi Heroepoetri lahir di Jakarta, 19 September 1966. Perempuan ini meraih gelar LL.M. dengan *major* lingkungan hidup di Dalhousie Law School, Halifax, Kanada, 1992. Gelar S.H. juga dalam *major* lingkungan hidup diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Dia mengikuti berbagai pendalaman, antara lain pendalaman mengenai transisi menuju demokrasi (Jerman, 1994), hak asasi perempuan (Bangladesh; Sao Paulo, Brasil; dan Tanzania, 2003), transisi keadilan (New York, 2007), dan kepemimpinan inovatif untuk berkelanjutan (IDEAS Indonesia 5.0, Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, 2015). Arimbi juga merupakan aktivis Walhi, menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan (2007–2014), dan masuk Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Luthfi Assyaukanie, Ph.D. adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). Ia juga seorang peneliti dan dosen di Universitas Paramadina, Jakarta. Meraih gelar Ph.D. di Universitas Melbourne, Australia, dalam bidang sejarah politik. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat. Luthfi sudah menulis sejumlah buku dan puluhan artikel yang diterbitkan di media dalam dan luar negeri. Salah satu bukunya, *Islam and the Secular State*, diterbitkan oleh ISEAS, Singapura (2009). Dia pernah menjabat Direktur Freedom Institute dan peneliti di SMRC, Jakarta. ■



Sadyo Kristiarto, S.P. lahir di Jakarta pada 25 Juni 1968, merupakan alumnus Jurusan Agronomi IPB Bogor. Sejak 1996 hingga 2014 menjadi wartawan di *HU Media Indonesia* antara lain menangani Desk Polhukam, Ekonomi, Metropolitan, dan Suplemen. Pada 2014 selama kurang lebih setahun bertugas sebagai Pemimpin Redaksi *Borneo News* di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebelum menjadi jurnalis sempat berkarier sebagai asisten kepala divisi di perkebunan kelapa sawit PT Tania Selatan, Palembang, Sumatra Selatan, dan sebagai supervisor data di PT Pillar, kantor konsultan teknik. Saat ini tergabung dalam Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Anggiasari Puji Aryatie, S.S. merupakan sosok yang sangat berpengalaman dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan kesetaraan gender serta upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Perempuan kelahiran Jakarta itu juga memiliki keahlian dalam pelatihan dan berbicara di depan umum. Keterampilan kepemimpinannya ditopang bakat dalam menganalisis masalah masyarakat, meninjau kebijakan publik, mengembangkan dan menyederhanakan prosedur, serta menemukan solusi yang inovatif.

Sarjana sastra Inggris dari Sekolah Bahasa Asing LIA, Yogyakarta, 2007, itu pada Januari 2016 hingga Oktober 2016 menjadi Koordinator Komunikasi Indonesia dan Filipina untuk Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), salah satu organisasi tertua di Jerman yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, sejak September 2019 sampai sekarang ia menjadi konsultan bidang penelitian dan pengumpulan data pandemi yang bekerja sama dengan Asia University, Jepang. Kini, menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A. memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos.) dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) 1991-1994; *master of arts* (M.A.) dari School of Communication, College of Social Science, University of Hawaii at Manoa (UHM) Honolulu, Amerika Serikat (2003-2004); dan doktor (Dr.) dari Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) 2007-2010 (*cum laude*).

Pada 2021 menjadi staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, anggota Senat Antar-fakultas FISIP UI, asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Ketua Bidang Keilmuan ISKI Pusat, Ketua Litbang *Media Indonesia*, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Dr. Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A. lahir di Surabaya pada 4 Juni 1975. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya di bidang manajemen dan menamatkan pendidikan MBA dari University of Hertfordshire Inggris. Radityo aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan (UPH) sejak 2008 dan mendapatkan gelar doktor dari UPH pada 2021, pernah menjabat Direktur Inkubator Bisnis UPH Sparklabs. Saat ini Radityo juga aktif dalam kegiatan FDD12 sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI. ■

**MEDIA
INDONESIA
PUBLISHING**

ISBN 978-623-6165-17-1

